

# PROFIL PENDUDUK PROVINSI BANTEN

HASIL SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS (SUPAS)

# 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BANTEN**

# **PROFIL PENDUDUK PROVINSI BANTEN**

HASIL SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS (SUPAS)

# **2015**



**PROFIL PENDUDUK PROVINSI BANTEN  
HASIL SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS (SUPAS) 2015**

ISBN : 978-602-0932-88-0

No. Publikasi : 36520.1712

Katalog : 2101014.36

Ukuran Buku : 17,6 X 25 cm

Jumlah Halaman : xvi + 120 Halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Penyunting : Bidang Statistik Sosial

Gambar Kover : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Dicetak oleh : CV. Dharmaputra

*"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT yang telah membimbing jajaran BPS Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas sehari-hari, salah satunya publikasi ini. Publikasi Profil Penduduk Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban moral kepada khalayak atas terselenggaranya Supas 2015. Supas menghasilkan data kependudukan dalam berbagai aspek ; demografi (fertilitas, mortalitas, migrasi), kesulitan fungsional, pendidikan, perumahan dan lingkungan hidup (perubahan iklim). Memang ada kegiatan lain serupa yang juga menghasilkan data dengan tema yang sama yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahunan. Tetapi Supas punya makna lebih karena merupakan survei besar yang bertujuan untuk intermediasi hasil Sensus Penduduk bahkan lebih jauh digunakan untuk mengkoreksi hasil penghitungan Proyeksi Penduduk yang sudah tersusun sebelumnya. Dengan kata lain, publikasi Profil Penduduk Hasil Supas 2015 merupakan dokumentasi penting dari perjalanan series data kependudukan yang menggambarkan karakteristik dari penduduk Provinsi Banten.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Mari kita berkarya untuk bangsa.

Serang, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Banten



**Ir. Agoes Soebeno, M.Si**



# DAFTAR ISI

	Halaman :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Sumber Data .....	1
1.3 Tentang Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
BAB 2. GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN .....	5
2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk .....	5
2.2 Distribusi Penduduk .....	9
2.3 Tantangan Masa Depan: Bonus Demografi .....	10
BAB 3. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA .....	13
3.1 Fertilitas Antar Provinsi di Pulau Jawa .....	13
3.2 Fertilitas di Provinsi Banten .....	14
3.3 Keluarga Berencana .....	17
BAB 4. MORTALITAS .....	21
4.1 Angka Kematian Kasar (AKK) atau <i>Crude Death Rate</i> (CDR) .....	21
4.2 Angka Kematian Spesifik menurut Umur atau <i>Age Specific Death Rate</i> (ASDR) .....	23
4.3 Angka Kematian Bayi (AKB)/ <i>Infant Mortality Rate</i> (IMR) .....	24
4.4 Angka Kematian Balita / <i>Under Five Mortality Rate</i> (U5MR) .....	25
4.5 Angka Harapan Hidup (AHH)/ <i>Life Expectancy</i> .....	27
BAB 5. MOBILITAS PENDUDUK .....	29
5.1 Migrasi Risen .....	30
5.1.1 Komposisi Penduduk .....	32
5.1.2 Arus Migrasi Masuk Risen .....	34
5.1.3 Karakteristik Migran Masuk Risen .....	35
5.2 Komuter .....	38

5.3 Migrasi Total	45
<b>BAB 6. KESULITAN FUNGSIONAL .....</b>	<b>49</b>
6.1 Potret Disabilitas	49
6.2 Distribusi Disabilitas	54
6.2.1 Gangguan Penglihatan	55
6.2.2 Gangguan Pendengaran	57
6.2.3 Gangguan Berjalan atau Naik Tangga	59
6.2.4 Gangguan Gerak Tangan Jari	62
6.2.5 Gangguan Mengingat Konsentrasi	63
6.2.6 Gangguan Perilaku	66
6.2.7 Gangguan Bicara Komunikasi	68
6.2.8 Gangguan Mengurus Diri	71
<b>BAB 7. PENDIDIKAN .....</b>	<b>73</b>
7.1 Partisipasi Sekolah	73
7.2 Melek Huruf	78
7.3 Kemampuan Berbahasa Indonesia	80
7.4 Tingkat Pendidikan	83
<b>BAB 8. KETENAGAKERJAAN .....</b>	<b>87</b>
8.1 Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Banten	87
8.1.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur	87
8.1.2 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan	88
8.1.3 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	89
8.1.4 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan	91
8.1.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja	92
8.2 Disparitas Antar Wilayah	93
8.2.1 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	93
8.2.2 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan	94
<b>BAB 9. PERUMAHAN .....</b>	<b>97</b>
9.1 Keadaan Perumahan	97
9.1.1 Kualitas Fisik Rumah Sisi Material	98
9.1.2 Fasilitas Rumah	102
9.2 Pemenuhan Kebutuhan untuk Perumahan	108
<b>BAB 10. PERUBAHAN IKLIM .....</b>	<b>111</b>
10.1 Pengetahuan tentang Perubahan Iklim	111
10.2 Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	115

## DAFTAR TABEL

Halaman :

Tabel 2.1.1	Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Provinsi Banten 2015	6
Tabel 2.1.2	Penduduk menurut Klasifikasi Wilayah, Provinsi Banten 2015	7
Tabel 2.2.1	Jumlah Penduduk, Persentase terhadap Total Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk, Provinsi Banten 2015	8
Tabel 2.2.2	Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	9
Tabel 2.3.1	Penduduk Provinsi Banten menurut Kelompok Umur, 2015	10
Tabel 3.1	Angka Fertilitas Total (TFR) menurut Provinsi Di Pulau Jawa 1997, 2000, 2002, 2007, 2010 dan 2012	14
Tabel 3.2	Jumlah Perempuan usia 10 tahun keatas menurut Status perkawinan dan Kelompok Umur Di Provinsi Banten tahun 2015	15
Tabel 3.3	Persentase Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Cara/Alat Kontrasepsi di Provinsi Banten, Tahun 2015	18
Tabel 3.4	Persentase Wanita Usia 15 - 49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat KB, di Provinsi Banten Tahun 2015	19
Tabel 4.1.	<i>Crude Death Rate</i> (CDR) menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	22
Tabel 4. 2.	<i>Infant Mortality Rate</i> (IMR) menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	25
Tabel 4.3	<i>Under Five Mortality Rate</i> (U5MR) menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	26

Tabel 4.4.	Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	27
Tabel 5.1	Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	33
Tabel 5.2	Penduduk Migran Risen Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	36
Tabel 5.3	Persentase Migran Masuk Risen Menurut Alasan Utama Pindah, Provinsi Banten, 2015	37
Tabel 5.4	Penduduk Komuter Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota, Provinsi Banten, 2015	39
Tabel 5.5	Penduduk Menurut Status Migrasi Total dan Kabupaten/ Kota, Provinsi Banten, 2015	46
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Menurut Jenis dan Tingkat Disabilitas, Provinsi Banten 2015	51
Tabel 6.2	Jumlah Penyandang Gangguan Penglihatan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	57
Tabel 6.3	Jumlah Penyandang Gangguan Pendengaran Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	59
Tabel 6.4	Jumlah Penyandang Gangguan Berjalan Naik Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	61
Tabel 6.5	Jumlah Penyandang Gangguan Gerak Tangan Jari Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	63
Tabel 6.6	Tingkat Kesulitan Gangguan Mengingat dan Konsentrasi	64
Tabel 6.7	Jumlah Penyandang Gangguan Mengingat Konsentrasi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	66
Tabel 6.8	Jumlah Penyandang Gangguan Perilaku Menurut Jenis	

	Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	68
Tabel 6.9	Jumlah Penyandang Gangguan Bicara Komunikasi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	70
Tabel 6.10	Jumlah Penyandang Gangguan Mengurus Diri Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	72
Tabel 7.1	Jumlah dan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah Menurut Jenis Kelamin, Klasifikasi Daerah dan Kelompok Usia Sekolah di Banten, 2015	76
Tabel 7.2	Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Usia Sekolah di Banten, 2015	77
Tabel 7.3	Jumlah dan Angka Melek Huruf Penduduk Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi di Banten, 2015	79
Tabel 7.4	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Banten, 2015	80
Tabel 7.5	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Memiliki Kemampuan Berbahasa Indonesia Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal di Banten, 2015	82
Tabel 7.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Banten, 2015	83
Tabel 7.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Banten, 2015	85
Tabel 7.8	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Banten, 2015	86
Tabel 8.1	Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur di Provinsi Banten, 2015	87

Tabel 8.2	Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Terakhir di Provinsi Banten, 2015	89
Tabel 8.3	Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Banten, 2015	90
Tabel 8.4	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Banten, 2015	91
Tabel 8.5	Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja di Provinsi Banten, 2015	93
Tabel 8.6	Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2015	94
Tabel 8.7	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2015	95
Tabel 9.1	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	100
Tabel 9.2	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	101
Tabel 9.3	Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai Perkapita Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	102
Tabel 9.4	Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Menurut Tipe Daerah, Provinsi Banten, 2015	103
Tabel 9.5	Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Air Minum Menurut Tipe Daerah, Provinsi Banten, 2015	104
Tabel 9.6	Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	105
Tabel 9.7	Penggunaan Bahan Bakar/ Energi Utama Memasak Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	107

Tabel 10.1	Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mendengar tentang	
------------	---	--

	Perubahan Iklim, Provinsi Banten 2015	113
Tabel 10.2	Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mendengar dan Mengetahui tentang Perubahan Iklim, Provinsi Banten 2015	114
Tabel 10.3	Jumlah Rumah Tangga yang Mengetahui Dampak Perubahan Iklim Menurut Wilayah, Provinsi Banten 2015	114
Tabel 10.4	Jumlah Rumah Tangga yang Merasakan Suhu Udara Lebih Panas 5 Tahun Terakhir, Provinsi Banten 2015	117
Tabel 10.5	Jumlah Rumah Tangga yang Merasakan Musim Hujan tidak Menentu 5 Tahun Terakhir, Provinsi Banten 2015	118
Tabel 10.6	Jumlah Rumah Tangga yang Melakukan Upaya Mengurangi Kelangkaan Air Bersih, Provinsi Banten 2015	118



## DAFTAR GAMBAR

Halaman :

Gambar 2.1	Piramida Penduduk Provinsi Banten, 2015	5
Gambar 2.2	Angka Ketergantungan menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	11
Gambar 3.1	Jumlah kelahiran menurut Kelompok Umur Perempuan Di Provinsi Banten tahun 2015	16
Gambar 3.2	Angka Fertilitas Total di Provinsi Banten 1997, 2000, 2002, 2007, 2010, 2012 dan 2015	17
Gambar 4.1.	Tren Mortalitas menurut Kelompok Umur di Kab/kota Se Provinsi Banten Tahun 2015	24
Gambar 5.1	Persentase Migrasi Masuk Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten, 2015	31
Gambar 5.2	Persentase Migran Risen Menurut Asal Provinsi, Provinsi Banten, 2015	32
Gambar 5.3	Persentase Migran Risen menurut Daerah Asal dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	34
Gambar 5.4	Persentase Komuter Menurut Tempat Tujuan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	41
Gambar 5.5	Persentase Komuter menurut Aktivitas Utama di Tempat Tujuan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	42
Gambar 5.6	Persentase Komuter Menurut Waktu Tempuh ke Daerah Tujuan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	43
Gambar 5.7	Persentase Komuter Menurut Moda Transportasi Menuju Daerah Tujuan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015	44
Gambar 5.8	Persentase Migran Total menurut Status Migran	

	Seumur Hidup dan Migran Kembali serta Kabupaten/ Kota, Provinsi Banten 2015	47
Gambar 6.1	Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Menurut Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin, Provinsi Banten 2015	52
Gambar 6.2	Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Menurut Jenis Disabilitas dan Tipe Daerah, Provinsi Banten 2015	53
Gambar 6.3	Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Menurut Jenis Disabilitas dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015	55
Gambar 6.4	Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Penglihatan Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015	56
Gambar 6.5	Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Pendengaran Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015	58
Gambar 6.6	Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Berjalan Naik Tangga Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015	60
Gambar 6.7	Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Gerak Tangan Jari Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015	62
Gambar 6.8	Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Mengingat Konsentrasi Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015	65
Gambar 6.9	Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Perilaku Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015	67
Gambar 6.10	Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Komunikasi Bicara Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015	69
Gambar 6.11	Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Mengurus Diri Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015	71

Gambar 7.1	Kemampuan berbahasa Indonesia Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas di Banten, 2015	81
Gambar 9.1	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Banten, 2015	99
Gambar 9.2	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Provinsi Banten, 2015	106
Gambar 9.3	Persentase Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	109

<https://banten.bps.go.id>



# PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Gambaran mengenai kependudukan dapat dilihat dari berbagai data yang ada. BPS memiliki data kependudukan yang cukup komprehensif misalnya dari data Susenas dapat disajikan secara tahunan Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Belum lagi publikasi turunan yang lain semisal Statistik Pemuda, Statistik Ibu dan Anak, Profil Gender dan lain-lain. Belum lagi data ketenagakerjaan dari Survei Angkatan Kerja Nasional yang mampu menyajikan gambaran situasi ketenagakerjaan secara tahunan. Namun begitu melihat perkembangan kependudukan dalam rentang waktu yang panjang lebih ideal jika menggunakan data dengan periode yang panjang pula. Antar sensus penduduk yang berperiode 10 tahun sekali misalnya akan menyajikan fenomena jangka panjang perubahan karakteristik kependudukan.

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 merupakan survei dengan periode panjang yang identik dengan Sensus Penduduk. Dengan sampel yang paling besar dibanding survei apapun di BPS menyebabkan tingkat kualitas estimasi yang juga handal. Supas bukan saja menarik dianalisis untuk mendapatkan gambaran/profil penduduk tetapi pada dasarnya memang bertujuan mendapatkan parameter demografi untuk kepentingan lebih jauh yakni proyeksi penduduk.

Provinsi Banten memiliki posisi geografis yang strategis sebagai daerah satelit ibukota negara. Perkembangan perekonomian ke arah industrialisasi menyumbang perubahan fenomena kependudukan yang dapat terjelaskan dari hasil Supas 2015. Publikasi profil kependudukan hasil Supas 2015 dengan demikian menjadi media strategis dokumentasi perubahan fenomena kependudukan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

## 1.2 Sumber Data

Sumber utama data yang digunakan pada Profil Penduduk ini adalah hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Data pendukung

untuk perbandingan antar waktu menggunakan Supas sebelumnya dan Sensus Penduduk.

### **1.3 Tentang Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015**

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) adalah survei yang tujuan utamanya mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi diantara dua waktu sensus penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) telah empat kali melakukan SUPAS, yaitu tahun 1976, 1985, 1995 dan 2005. SUPAS2015 merupakan SUPAS yang kelima yang dilaksanakan BPS, dilaksanakan pencacahannya selama bulan Mei 2015.

Data kependudukan yang dicakup dalam SUPAS meliputi : keterangan pokok penduduk, lansia, kelahiran, kematian, kematian ibu, perpindahan penduduk, ketenagakerjaan, perumahan dan keadaan tempat tinggal. Pada SUPAS2015 ditambahkan informasi mengenai: migrasi keluar internasional, perubahan iklim, dan disabilitas.

SUPAS2015 bertujuan untuk ; (1). Memperkirakan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. (2). Menyediakan data untuk penghitungan parameter fertilitas seperti angka kelahiran total/TFR, angka kelahiran kasar/CBR, rasio ibu-anak/CWR, angka kelahiran menurut kelompok umur/ ASFR. (3). Menyediakan data untuk penghitungan parameter migrasi, meliputi migrasi semasa hidup, migrasi risen, migrasi internasional, dll. (4). Menyediakan data untuk penghitungan parameter mortalitas, meliputi angka kematian kasar/CDR, angka kematian bayi/IMR, angka kematian balita/U5MR, dan angka kematian ibu/MMRatio. (5). Memperbaharui proyeksi penduduk yang telah disusun sebelumnya. (6). Menyediakan data yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi berbagai program pemerintah.

Jumlah sampel rumahtangga Supas 2015 di Provinsi Banten adalah 119.309 rumah tangga dengan sebaran sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

ALOKASI JUMLAH SAMPEL BLOK SENSUS DAN RUMAH TANGGA SUPAS 2015, PROVINSI BANTEN		
KAB/KOTA	Blok Sensus	Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)
01. PANDEGLANG	140	12.158
02. LEBAK	150	14.719
03. TANGERANG	220	22.087
04. SERANG	150	15.079
71. TANGERANG	180	20.340
72. CILEGON	80	8.569
73. SERANG	90	9.061
74. TANGERANG SELATAN	150	17.296
<b>3600. BANTEN</b>	<b>1160</b>	<b>119.309</b>

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Hasil Supas 2015 sebenarnya mencakup banyak variabel akan tetapi dalam dalam menggambarkan Profil Penduduk Provinsi Banten hanya beberapa yang akan diulas, dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan.** Berisi latar belakang penulisan dan pemanfaatan data hasil Supas 2015, sumber data apa saja yang digunakan serta metodologi yang digunakan dalam Supas 2015.

**Bab 2 Gambaran Umum Kependudukan.** Menjelaskan beberapa data makro menyangkut penduduk Provinsi Banten. Dari jumlah, tren, komposisi umur, dekomposisi urban/rural, sebaran dan kepadatan antar wilayah, dekomposisi menurut jenis kelamin sampai dengan gambaran mengenai proporsi usia produktif dan angka beban ketergantungan.

**Bab 3 Fertilitas dan Keluarga Berencana.** Memaparkan besaran tingkat fertilitas dari berbagai sumber data. Selain itu ditampilkan juga agregat jumlah perempuan menurut status perkawinan, menurut kelompok umur, jumlah kelahiran menurut kelompok umur perempuan dan pemakaian alat kontrasepsi.

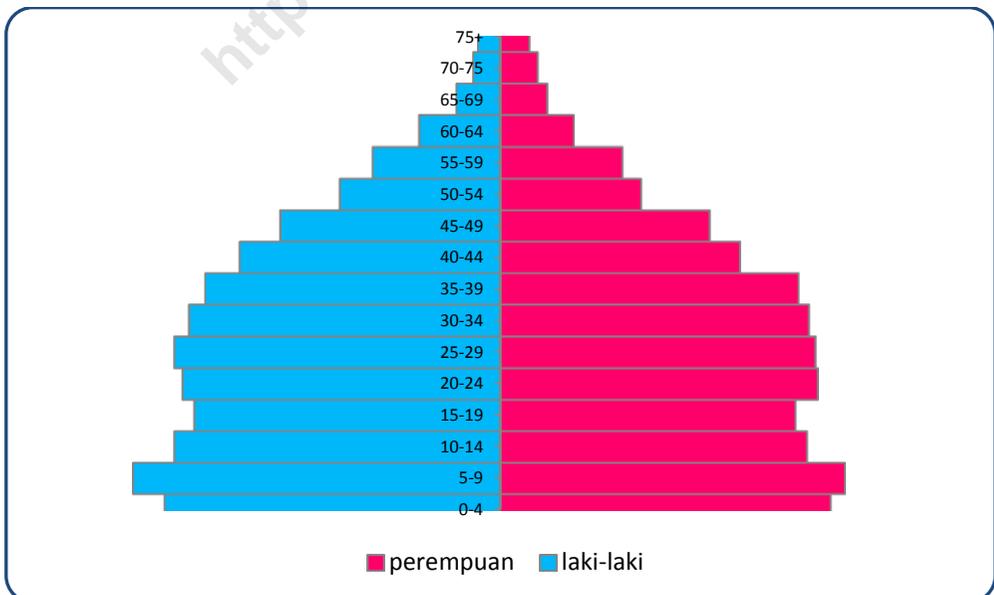
- Bab 4 Mortalitas.** Indikator tingkat kematian yang diuraikan dalam bab ini adalah Angka Kematian Kasar (CDR), ASDR, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan output dari angka kematian yakni Angka Harapan Hidup.
- Bab 5 Mobilitas Penduduk.** Memaparkan turunan dari indikator migrasi masuk, komposisi migran/non migran, penduduk komuter menurut jarak tempuh dan tujuan dan alat transportasi yang digunakan.
- Bab 6 Kesulitan Fungsional.** Tingkat disabilitas/kesulitan fungsional hanya menggunakan indikator persentase penduduk yang mengalami kesulitan. Namun dalam bab ini diuraikan tingkat kesulitan menurut tingkatan (rendah, sedang, parah) menurut jenis kesulitan, kota/desa, kabupaten/kota dan jenis kelamin.
- Bab 7 Pendidikan.** Indikator pendidikan yang ditampilkan pada publikasi ini yakni angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Disajikan menurut kabupaten/kota dan kelompok umur.
- Bab 8 Ketenagakerjaan.** Bab ini menguraikan data ketenagakerjaan mencakup Status Pekerjaan, Jenis Pekerjaan, Lapangan Usaha, Jam kerja menurut kabupaten/kota
- Bab 9 Perumahan.** Bab Perumahan menguraikan data terkait karakteristik perumahan dan fasilitasnya ; jenis dinding, jenis lantai terluas, status kepemilikan rumah, bahan bakar utama untuk masak, jenis jamban yang dimiliki menurut kabupaten/kota
- Bab 10 Perubahan Iklim.** Bab ini menguraikan hal baru dalam Supas yakni terkait dengan lingkungan. Pengetahuan rumahtangga terhadap adanya perubahan iklim, merasakan adanya perubahan iklim dalam kurun 5 tahun terakhir, serta ada/tidaknya upaya dari rumah tangga mengurangi peningkatan suhu global dan upaya mengurangi akibat dari musim hujan tidak menentu.

## GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN



### 2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk

Struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan ke dalam bentuk piramida penduduk. Terdapat tiga bentuk piramida penduduk. Pertama, Piramida Ekspansif, jika sebagian besar penduduk berusia muda, dengan ciri melebar pada bagian bawah dan semakin meruncing pada bagian atas. Kedua, Piramida Konstruktif, jika penduduk yang berada pada kelompok termuda jumlahnya sedikit, dengan ciri mengecil pada kelompok umur muda, melebar pada kelompok umur dewasa, dan mengecil kembali pada kelompok umur tua. Ketiga, Piramida Stasioner, jika jumlah penduduk pada tiap kelompok umur (muda, dewasa, dan tua) relatif seimbang, ciri-cirinya yaitu bentuk yang relatif sama atau rata pada tiap kelompok umur.



Sumber: Supas 2015

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Banten, 2015

Piramida penduduk Provinsi Banten berbentuk ekspansif. Hal ini tampak dari sebagian besar penduduk terdapat pada kelompok usia muda atau bagian bawah piramida melebar dan semakin meruncing pada bagian atas. Bagian bawah melebar menunjukkan terjadinya kelahiran yang cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Piramida ekspansif umumnya terdapat pada negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya angka kelahiran dan menurunnya tingkat kematian (negara berkembang). Berdasarkan hasil Supas 2015, TFR Provinsi Banten sebesar 2,32 yang artinya wanita usia 15-49 tahun rata-rata memiliki 2 hingga 3 anak selama masa suburnya. Permasalahan tentang fertilitas akan dibahas pada bab selanjutnya.

Tabel 2.1.1 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Provinsi Banten 2015

Kelompok Umur	laki-laki	perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	577.985	564.782	1.142.767	102,34
5-9	631.866	589.306	1.221.172	107,22
10-14	560.964	524.890	1.085.854	106,87
15-19	527.314	505.483	1.032.797	104,32
20-24	547.705	543.058	1.090.763	100,86
25-29	561.443	539.463	1.100.906	104,07
30-34	536.218	528.376	1.064.594	101,48
35-39	508.391	510.381	1.018.772	99,61
40-44	449.315	410.191	859.506	109,54
45-49	379.642	358.023	737.665	106,04
50-54	277.650	241.062	518.712	115,18
55-59	221.219	209.254	430.473	105,72
60-64	141.615	125.994	267.609	112,40
65-69	77.894	80.532	158.426	96,72
70-75	48.659	63.971	112.630	76,06
75+	41.078	50.649	91.727	81,10
Total	6.088.958	5.845.415	11.934.373	104,17

Sumber: Supas 2015

Berdasarkan data SUPAS 2015, penduduk Provinsi Banten berjumlah 11,93 juta jiwa yang terdiri dari 6,09 juta jiwa penduduk laki-laki dan 5,85 juta jiwa penduduk perempuan. Struktur kelompok umur menunjukkan proporsi terbesar penduduk Provinsi Banten adalah penduduk pada kelompok umur 5-9 tahun. Lebih tingginya proporsi penduduk 5-9 tahun dibanding penduduk 0-4 tahun dapat mengindikasikan turunnya tingkat kelahiran selama lima tahun terakhir dan tingginya angka migrasi risen pada kelompok umur 0-4 tahun. Proporsi terbesar berikutnya adalah kelompok umur balita (0-4 tahun).

Tabel 2.1.2 Penduduk menurut Klasifikasi Wilayah, Provinsi Banten 2015

Kelompok Umur	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	774.630	368.137	1.142.767
5-9	820.355	400.817	1.221.172
10-14	715.467	370.387	1.085.854
15-19	688.049	344.748	1.032.797
20-24	790.525	300.238	1.090.763
25-29	778.088	322.818	1.100.906
30-34	753.831	310.763	1.064.594
35-39	752.313	266.459	1.018.772
40-44	605.017	254.489	859.506
45-49	513.552	224.113	737.665
50-54	357.027	161.685	518.712
55-59	292.885	137.588	430.473
60-64	175.762	91.847	267.609
65-69	93.348	65.078	158.426
70-75	67.217	45.413	112.630
75+	57.982	33.745	91.727
<b>Total</b>	<b>8.236.048</b>	<b>3.698.325</b>	<b>11.934.373</b>

Sumber: Supas 2015

Dari struktur kelompok umur, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Banten berada pada kelompok umur muda. Jumlah penduduk mengalami penurunan mulai dari kelompok umur 25-29 tahun dan semakin sedikit jumlahnya pada kelompok umur tua. Rasio jenis kelamin

penduduk Provinsi Banten sebesar 104,17. Rasio di atas 100 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Rasio sebesar 104,17 berarti tiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak sekitar 104 penduduk laki-laki. Pada kelompok lansia (65 tahun ke atas), rasio jenis kelamin di bawah 100, berarti pada kelompok umur tersebut penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dibanding yang perempuan.

Penentuan pembagian wilayah ke dalam klasifikasi perkotaan dan perdesaan ditentukan oleh persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan. Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan, sedangkan perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Enam puluh sembilan persen penduduk Provinsi Banten berada di wilayah perkotaan, yaitu sebanyak 8,24 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Banten memiliki akses ke fasilitas-fasilitas perkotaan.

Tabel 2.2.1 Jumlah Penduduk, Persentase terhadap Total Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk, Provinsi Banten 2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Total Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pandeglang	1.194.179	10,01	2.746,89	434,74
Lebak	1.269.041	10,63	3.426,56	370,35
Tangerang	3.361.740	28,17	1.011,86	3.322,34
Serang	1.473.471	12,35	1.734,28	849,62
Kota Tangerang	2.043.213	17,12	153,93	13.273,65
Kota Cilegon	411.554	3,45	175,5	2.345,04

Kota Serang	642.205	5,38	266,71	2.407,88
Kota Tangerang Selatan	1.538.970	12,90	147,19	10.455,67
<b>Total</b>	<b>11.934.373</b>	<b>100,00</b>	<b>9.662,92</b>	<b>1.235,07</b>

Sumber: Supas 2015

## 2.2 Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak 11,93 juta jiwa menyebar di 8 (delapan) kabupaten/kota. Sebagian besar penduduk Provinsi Banten berada di Tangerang Raya (Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). Persentase terbesar penduduk Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang sebesar 28,17 persen, sedangkan persentase yang terkecil adalah di Kota Cilegon sebesar 3,45 persen.

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, wilayah paling padat di Provinsi Banten ialah Kota Tangerang. Kota Tangerang dengan luas wilayah yang hanya sebesar 153,93 km<sup>2</sup> dihuni sebanyak 2,04 juta jiwa penduduk. Kepadatan penduduk Kota Tangerang sebesar 13.273 jiwa per km<sup>2</sup> berarti setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh sekitar 13 ribu jiwa penduduk. Wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Lebak, setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh sekitar 370 jiwa penduduk.

Tabel 2.2.2 Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Kabupaten/Kota	laki-laki	perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pandeglang	610.233	583.946	1.194.179	104,50
Lebak	650.711	618.330	1.269.041	105,24
Tangerang	1.720.918	1.640.822	3.361.740	104,88
Serang	747.618	725.853	1.473.471	102,99
Kota Tangerang	1.043.453	999.760	2.043.213	104,37
Kota Cilegon	210.903	200.651	411.554	105,11
Kota Serang	329.400	312.805	642.205	105,31
Kota Tangerang Selatan	775.722	763.248	1.538.970	101,63
<b>Total</b>	<b>6.088.958</b>	<b>5.845.415</b>	<b>11.934.373</b>	<b>104,17</b>

Sumber: Supas 2015

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk di semua kabupaten/kota berada di atas angka 100 yang menunjukkan bahwa di semua kabupaten/kota jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi adalah di Kota Serang sebesar 105,31. Pada setiap 100 penduduk wanita di Kota Serang terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Sementara perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang terendah adalah di Kota Tangerang Selatan sebesar 101,63.

### 2.3 Tantangan Masa Depan: Bonus Demografi

Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat juga dikelompokkan menjadi kelompok usia produktif dan non produktif yaitu kelompok usia 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas.

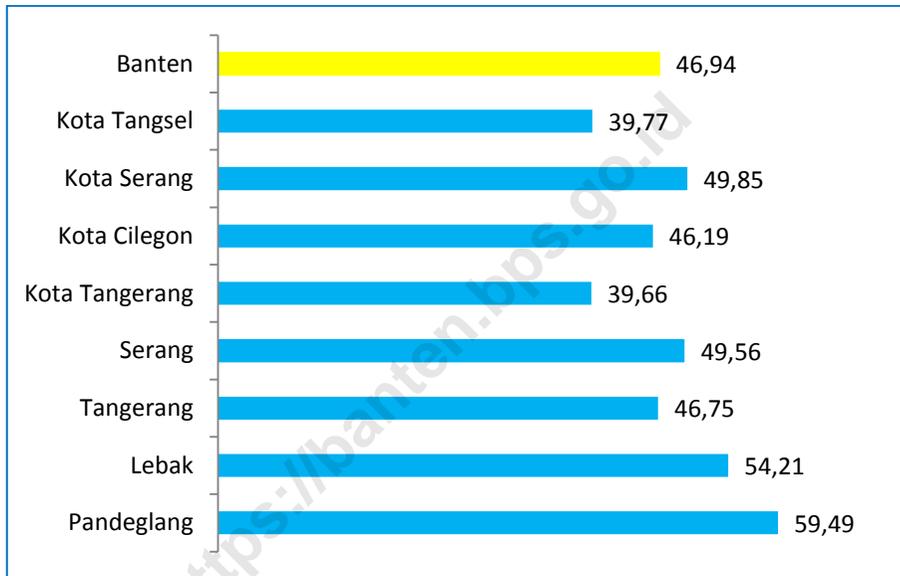
Tabel 2.3.1 Penduduk Provinsi Banten menurut Kelompok Umur, 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Muda (0–14)	1.770.815	1.678.978	3.449.793	28,91
Produktif (15–64)	4.150.512	3.971.285	8.121.797	68,05
Tua (65 +)	167.631	195.152	362.783	3,04
Jumlah	6.088.958	5.845.415	11.934.373	100,00

Sumber: Supas 2015

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun merupakan penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang lain, baik orang tua maupun orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena pada umumnya sudah tidak lagi aktif secara ekonomi. Penduduk usia 15-64 tahun merupakan penduduk usia produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada

penduduk usia kerja atau seberapa besar beban yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif terhadap penduduk non produktif. Perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif disebut Angka Ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ketergantungan atau rasio beban ketergantungan memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.



Sumber: Supas 2015

Gambar 2.2 Angka Ketergantungan menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Pada tahun 2015, *Dependency ratio* Provinsi Banten sebesar 46,94 atau dapat dikatakan bahwa 100 orang produktif akan menanggung sekitar 46 hingga 47 orang non produktif atau kurang lebih 2 berbanding 1. Kejadian bonus demografi di suatu wilayah akan dialami pada saat Angka Ketergantungan berada di bawah 50 yang artinya wilayah tersebut tersedia penduduk usia produktif yang cukup banyak. Adanya Bonus Demografi akan memunculkan suatu kesempatan (*window of opportunity*) bagi suatu wilayah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. The window of opportunity akan terbuka ketika Angka Ketergantungan mencapai titik terendah. Kondisi ini hanya terjadi satu kali dalam kehidupan.

Bonus demografi akan menjadi sebuah peluang ketika ledakan penduduk usia kerja mendapat pekerjaan yang layak pada akhirnya meningkatkan tabungan rumah tangga yang dapat diinvestasikan untuk perluasan kesempatan kerja. Di sisi lain jumlah perempuan di pasar kerja akan meningkat karena jumlah anak sedikit dan hal ini akan meningkatkan tabungan rumah tangga.

Kejadian bonus demografi akan memberikan peluang meningkatkan kesejahteraan apabila wilayah tersebut sudah dapat mempersiapkan sumber daya manusia dengan baik. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi adalah China dan Korea Selatan. Di kedua negara tersebut telah berhasil membangun industri-industri rumahan yang diarahkan pada pembangunan industri penguatan komponen. Apabila sumber daya manusia tidak dipersiapkan dengan baik maka bonus demografi akan menjadi bencana.

Provinsi Banten telah memasuki momentum bonus demografi pada tahun 2007. Namun bonus demografi belum dapat dirasakan manfaatnya, bahkan masih menjadi masalah bagi Provinsi Banten. Dengan rata-rata lama sekolah sekitar 8 tahun yang setara dengan pendidikan kelas 8 di SMP, cukup sulit bagi penduduk usia muda di Provinsi Banten untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten selalu lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran Terbuka nasional dan selalu berada di lima besar TPT tertinggi. Apabila pengangguran yang besar ini tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak pada masalah kerawanan sosial. Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan investasi pada sumber daya manusia.

## FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

# 3

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu komponen demografi yang mempengaruhi jumlah penduduk disamping mortalitas atau kematian dan migrasi. Fertilitas adalah komponen penambah jumlah penduduk, semakin banyak fertilitas maka penambahan penduduk semakin besar. Dengan mengetahui informasi fertilitas, maka dapat menjadi bahan perencanaan dalam mengendalikan jumlah penduduk. Pada tahun 2015 informasi fertilitas di Indonesia dan wilayah provinsi khususnya di Provinsi Banten didapat dari SUPAS 2015.

### 3.1 Fertilitas Antar Provinsi di Pulau Jawa

Keberhasilan berbagai program terkait pengendalian kelahiran dapat dilihat dari angka fertilitas yang semakin menurun. Tabel 1 menunjukkan tren fertilitas menurut provinsi di Pulau Jawa. Secara Nasional dari tahun 1997 dan 2012 terlihat bahwa Indonesia kurang berhasil dalam melakukan pengendalian penduduk. Tahun 2007 angka fertilitas sebesar 2,34 sedangkan pada tahun 2012 terjadi kenaikan angka fertilitas menjadi 2,60. Kondisi yang berbeda terjadi di wilayah Provinsi Banten. Tahun 1997 saat masih tergabung dengan provinsi Jawa Barat, angka kelahiran di Provinsi Banten tertinggi dibandingkan provinsi lainnya yaitu sebesar 2,72, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan angka fertilitas menjadi 2,50. Perkembangan pembangunan di bidang kependudukan Provinsi Banten mulai terlihat setelah terpisah dari Jawa Barat, pada tahun 2002 dan 2010 angka fertilitas Provinsi Banten sudah lebih rendah dari angka fertilitas nasional.

Tabel 3.1 Angka Fertilitas Total (TFR) menurut Provinsi Di Pulau Jawa 1997, 2000, 2002, 2007, 2010 dan 2012

Provinsi	1997	2000	2002	2007	2010	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	1,63	1,66	2,20	2,10	1,82	2,30
Jawa Barat	2,51	2,28	2,80	2,60	2,43	2,50
Jawa Tengah	2,06	2,14	2,10	2,30	2,20	2,50
DI Yogyakarta	1,44	1,79	1,90	1,80	1,94	2,10
Jawa Timur	1,71	1,87	2,10	2,10	2,00	2,30
Banten	2,72	2,37	2,60	2,60	2,35	2,50
INDONESIA	2,34	2,27	-	2,60	2,41	2,60

Sumber : Sensus Penduduk 2000, 2010 , Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985 , Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 1997, 2002, 2007 dan 2012

### 3.2 Fertilitas di Provinsi Banten

Fertilitas dipengaruhi status perkawinan seseorang. Semakin rendah usia perkawinan seorang perempuan maka semakin panjang masa reproduksinya, sehingga peluang melahirkan anak banyak semakin tinggi. Tabel 3.2 memberi informasi jumlah perempuan usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan. Pada tahun 2015 penduduk perempuan di Provinsi Banten sudah ada yang berstatus kawin pada usia 10-14 tahun meskipun kecil yaitu sebesar 0,01 persen, meningkat pada kelompok umur 15-19 sebesar 8,73 persen dan lebih dari 50 persen setelah menginjak usia 25 ke atas.

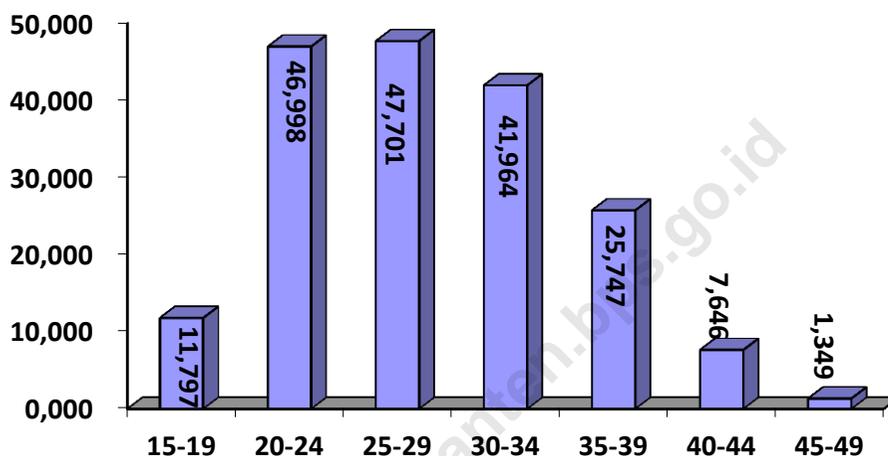
Tabel 3.2 Jumlah Perempuan usia 10 tahun keatas menurut Status perkawinan dan Kelompok Umur Di Provinsi Banten tahun 2015

Kelompok umur	Jumlah Penduduk perempuan	Status perkawinan			Persentase status kawin, Hidup bersama/ cerai hidup dan pisah
		Belum kawin	Kawin	Hidup bersama/ cerai hidup dan pisah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10-14	524.890	524.851	39	-	0,01
15-19	505.483	461.357	42.412	1.714	8,73
20-24	543.058	276.124	255.363	11.571	49,15
25-29	539.463	92.226	428.240	18.997	82,90
30-34	528.376	29.182	474.909	24.285	94,48
35-39	510.381	10.625	469.121	30.635	97,92
40-44	410.191	6.213	367.756	36.222	98,49
45-49	358.023	2.445	302.282	53.296	99,32
50-54	241.062	790	181.777	58.495	99,67
55 +	530.400	3.492	272.625	254.283	99,34
Total	5.845.415	2.561.393	2.794.524	489.498	56,18

Sumber: Supas 2015

Usia subur untuk perempuan melakukan reproduksi adalah kelompok usia 15-49 tahun, di Provinsi Banten jumlah perempuan usia subur dan status kawin mencapai 2,8 juta jiwa. Pada tahun 2015 jumlah kelahiran bayi di Provinsi Banten mencapai sekitar 183.202 bayi atau jumlah anak dengan usia belum mencapai satu tahun. Gambar 3.1 memperlihatkan jumlah kelahiran menurut kelompok umur ibu, berdasarkan SUPAS 2015 kelompok

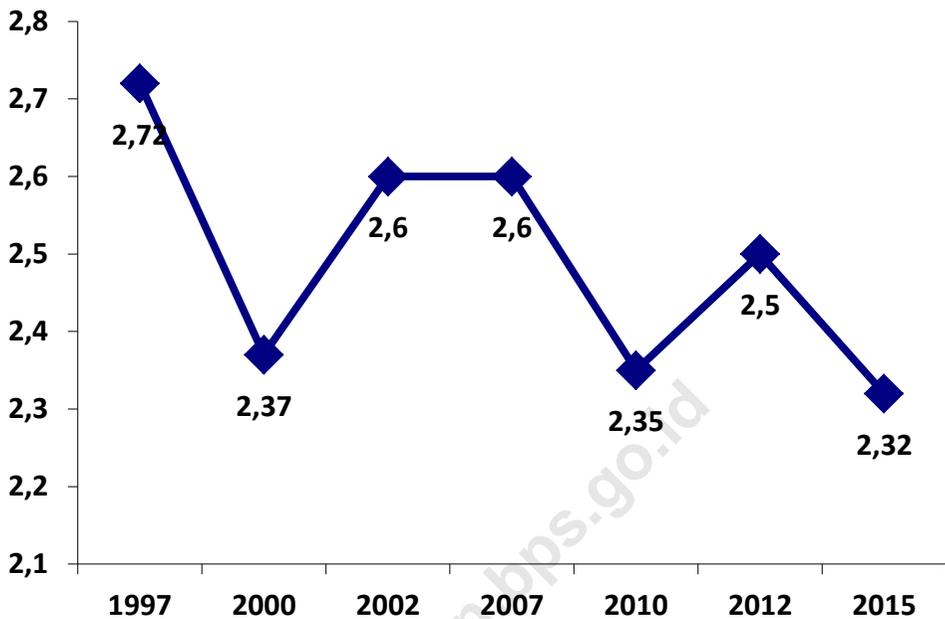
umur 25-29 adalah kelompok umur perempuan yang paling banyak melahirkan pada tahun 2015. Seiring usia perempuan yang semakin tua semakin sedikit pula jumlah anak yang dilahirkan. Pada kelompok usia 45-49 tahun yang mempunyai resiko tinggi pada saat melahirkan, jumlah kelahiran 1.349 bayi.



Sumber: Supas 2015

Gambar 3.1 Jumlah kelahiran menurut Kelompok Umur Perempuan Di Provinsi Banten tahun 2015

Secara rata-rata anak yang dilahirkan oleh setiap wanita sepanjang masa reproduksinya pada kurun waktu 1997-2015 di Provinsi Banten terjadi penurunan. Provinsi Banten termasuk salah satu provinsi yang mampu menurunkan angka fertilitas yaitu dari 2,72 pada tahun 1997 menjadi 2,32 pada tahun 2015 (Gambar 3.2).



Sumber: Supas 2015

Gambar 3.2 Angka Fertilitas Total di Provinsi Banten 1997, 2000, 2002, 2007, 2010, 2012 dan 2015

### 3.3 Keluarga Berencana

Mencegah kehamilan adalah cara menekan kuantitas penduduk. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yaitu keluarga dengan dua anak akan lebih baik sesuai keadaan sosial ekonominya. Penundaan usia perkawinan pertama dan penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara untuk menekan angka kelahiran. Alat kontrasepsi memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan.

Tabel 3.3 Persentase Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Cara/Alat Kontrasepsi di Provinsi Banten, Tahun 2015

Cara/Alat Kontrasepsi	2015	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
STERILISASI WANITA (MOW)	41.015	2.75
STERILISASI PRIA (MOP)	4.249	0.28
IUD/AKDR/SPIRAL	85.280	5.72
SUNTIKAN	1.031.674	69.18
SUSUK KB/IMPLANT	52.371	3.51
PIL	250.671	16.81
KONDOM	13.460	0.90
MAL/METODE MENYUSUI	524	0.04
PANTANG BERKALA	594	0.04
SANGGAMA TERPUTUS	6.683	0.45
METODE MODERN LAINNYA	2.315	0.16
<b>T o t a l</b>	<b>1.491.192</b>	<b>0.16</b>

Sumber: Supas 2015

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan (69,18 persen) dan pil KB (16,81 persen). Mayoritas perempuan menggunakan alat kontrasepsi tersebut karena harganya yang relatif murah, mudah diperoleh dan praktis. Pada Tabel 3.4 menunjukkan persentase perempuan pada kelompok umur 20-44 adalah kelompok perempuan yang menggunakan alat kontrasepsinya lebih dari 50 persen, dan kelompok umur 35-39 adalah kelompok umur dimana perempuan paling banyak menggunakan menggunakan alat kontrasepsi.

Tabel 3.4 Persentase Wanita Usia 15 - 49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat KB, di Provinsi Banten Tahun 2015

Kelompok umur perempuan	Penggunaan Alat Kontrasepsi		Jumlah perempuan	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi
	Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-19	19,746	24,380	44,126	44.75
20-24	162,916	103,770	266,686	61.09
25-29	80,196	166,910	447,106	62.67
30-34	25,949	171,805	497,754	65.48
35-39	325,894	169,374	495,268	65.80
40-44	221,555	175,572	397,127	55.79
45-49	122,152	222,530	344,682	35.44
50-54	32,784	202,232	235,016	13.95

Sumber: Supas 2015

Tingkat kehidupan yang berbeda akan memunculkan kebutuhan yang berbeda pula dalam hal kontrasepsi. Karena itu, kontrasepsi merupakan pilihan individu. Diperlukan sosialisasi kesadaran dan edukasi mengenai kontrasepsi untuk memberdayakan masyarakat tentang informasi yang benar, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat pilihan kontrasepsi dengan penuh kesadaran.



## MORTALITAS

# 4

Mortalitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk selain fertilitas dan migrasi. Mortalitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti demografi, kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Dari sudut demografi, kematian bukan hanya sebagai faktor yang mengurangi jumlah penduduk, tetapi juga dibutuhkan sebagai salah satu komponen untuk keperluan proyeksi penduduk di masa datang. Parameter mortalitas, merupakan informasi yang penting untuk melihat status kesehatan, mengidentifikasi kematian suatu daerah, sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, seperti untuk melihat efektivitas dari suatu program kesehatan. Selain itu, angka kematian juga penting untuk melihat masalah-masalah dalam masyarakat, seperti keadaan sosial dan ekonomi penduduk, penyebab kematian, serta hubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan (kelahiran, pertumbuhan penduduk).

Untuk melihat seberapa tinggi tingkat kematian di Provinsi Banten, maka diperlukan ukuran-ukuran atau indikator kematian. Dengan adanya indikator kematian maka dapat dibandingkan tingkat kematian antar daerah. Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa indikator kematian yang lazim digunakan untuk keperluan evaluasi program pemerintah maupun untuk analisis.

### 4.1 Angka Kematian Kasar (AKK) atau *Crude Death Rate* (CDR)

CDR adalah besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk CDR dapat memberikan gambaran

mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Suatu daerah yang memiliki CDR rendah biasanya tingkat kesejahteraannya tinggi. Namun demikian indikator ini masih sangat kasar, karena tidak memperhitungkan struktur umur, dimana tiap kelompok umur memiliki tingkat kematian yang berbeda.

Tabel 4.1. *Crude Death Rate* (CDR) menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

KAB/KOTA	CDR
(1)	(2)
Kab. Pandeglang	4.37
Kab. Lebak	4.35
Kab. Tangerang	4.61
Kab. Serang	5.77
Kota Tangerang	6.51
Kota Cilegon	5.30
Kota Serang	6.55
Kota Tangsel	4.45
Provinsi Banten	5.13

Sumber: Supas 2015

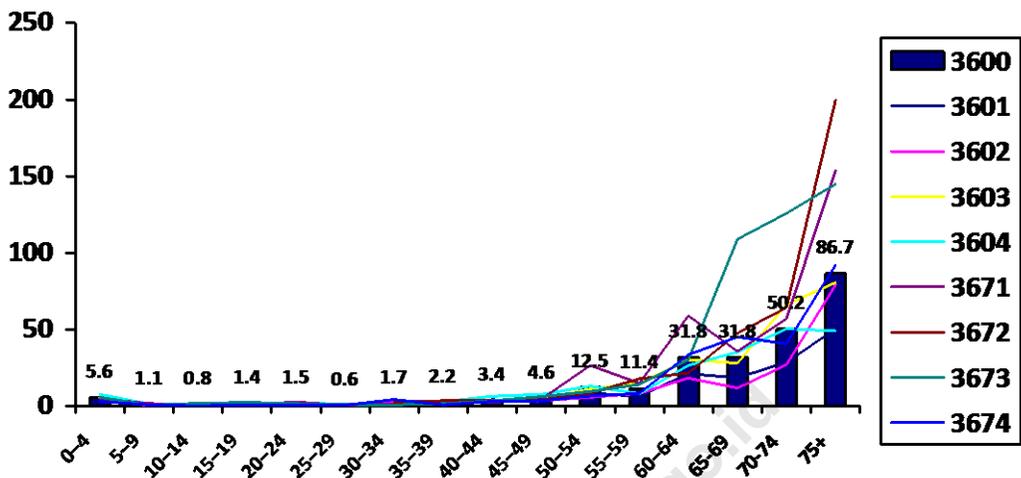
Wilayah Banten yang memiliki CDR rendah adalah Kabupaten Lebak, yaitu sebesar 4,35 pada tahun 2015. Artinya pada umumnya di Kabupaten Lebak terdapat 4 - 5 penduduk meninggal setiap 1000 penduduk. Sementara, Kota Serang pada tahun yang sama memiliki CDR sebesar 6,55. Namun demikian di Kota Tangerang, meskipun tingkat kesejahteraan penduduknya tinggi tetapi CDR nya pada tahun 2015 sebesar 6,51. Di

daerah perkotaan, pola makan dan pola hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan masalah kesehatan dan pada akhirnya berujung pada kematian. Diduga tingginya CDR di Kota Tangerang dan Kota Serang karena disebabkan oleh hal hal tersebut.

#### 4.2 Angka Kematian Spesifik menurut Umur atau *Age Specific Death Rate* (ASDR)

ASDR adalah banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk. Dibandingkan dengan CDR, ASDR lebih baik dan rinci karena ASDR melihat kematian pada kelompok umur tertentu. ASDR dapat dibandingkan antar wilayah, terutama pada umur-umur tertentu yang menjadi isu. Contohnya ASDR untuk kelompok 60 keatas dapat dibandingkan untuk melihat kecenderungan *aging population* dan juga kesehatan/kesejahteraan lansia tersebut. Gambar angka kematian menurut umur secara umum menunjukkan bentuk kurva yang mirip dengan huruf "J". Pada kelompok umur muda, angka kematiannya tinggi, lalu seiring meningkatnya kelompok umur (kelompok umur sedang), angka kematiannya turun lalu pada kelompok umur lebih tua, angka kematiannya meningkat lagi. Bentuk ini hampir sama dengan pola pertumbuhan biologis manusia. Pada tahun-tahun pertama kehidupan anak-anak sangat rentan terhadap penyakit-penyakit, sehingga tingkat kematiannya tinggi. Demikian juga pada kelompok umur tua, tingkat kematiannya tinggi, yang disebabkan oleh daya tahan tubuh yang sudah menurun.

Pada Gambar 4.1 terlihat jumlah kematian cukup besar di kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 5,6. Kemudian berangsur mengecil dikelompok umur berikutnya dan mulai terjadi kenaikan setelah kelompok umur 35-39 yaitu sebesar 2,2 dan semakin besar pada berakhir pada kelompok usia 75 + sebesar 86,7.



Sumber: Supas 2015

Gambar 4.1. Tren Mortalitas menurut Kelompok Umur di Kab/kota Se Provinsi Banten Tahun 2015

#### 4.3 Angka Kematian Bayi (AKB)/ *Infant Mortality Rate* (IMR)

Angka Kematian Bayi atau biasa disebut *Infant Mortality Rate* (IMR) didefinisikan sebagai banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua dari bayi. IMR mencerminkan besarnya masalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernapasan dan lain-lain. Selain itu, IMR juga mencerminkan tingkat kesehatan ibu. Keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit dapat menurunkan IMR, sehingga indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pemerintah, di bidang kesehatan. Angka kematian bayi di Provinsi Banten berdasarkan data SUPAS 2015 dengan menggunakan metode langsung adalah sebesar 26,32. Artinya

setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 26,32 bayi berumur kurang dari satu tahun yang meninggal selama kurun waktu Mei 2014 sampai dengan Mei 2015. Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang adalah dua kabupaten yang IMR nya terbesar yaitu sebesar 46,47 dan 42,98 dan Kabupaten tangerang adalah kabupaten yang IMR nya terendah se Provinsi Banten yaitu sebesar 10,94.

Tabel 4. 2. *Infant Mortality Rate (IMR)* menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

KAB/KOTA	IMR
(1)	(2)
Kab. Pandeglang	39.51
Kab. Lebak	46.47
Kab. Tangerang	10.94
Kab. Serang	42.98
Kota Tangerang	19.65
Kota Cilegon	15.63
Kota Serang	28.82
Kota Tangsel	22.20
Provinsi Banten	26.32

Sumber: Supas 2015

#### 4.4 Angka Kematian Balita/*Under Five Mortality Rate (U5MR)*

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Kondisi kesehatan lingkungan dapat langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Pada kondisi lingkungan yang tidak bersih, gizi buruk, tingginya prevalensi

penyakit menular pada anak dan insiden kecelakaan di dalam atau di sekitar rumah akan menyebabkan tingginya angka kematian anak. Angka Kematian Balita (U5MR) di Provinsi Banten berdasarkan hasil SUPAS 2015 adalah 7,94. Artinya di Provinsi Banten terdapat kematian anak balita (anak berumur 0-4 tahun) sebanyak 7,94 setiap 1000 anak balita selama periode Mei 2014 sampai Mei 2015. Seperti halnya IMR, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang adalah dua kabupaten yang U5MRnya tertinggi di antara kabupaten/kota se Provinsi Banten, yaitu dengan besaran 10,87 dan 10,81. Dan Kota Tangerang Selatan adalah Kota yang U5MRnya terendah yaitu sebesar 4,34.

Tabel 4.3 *Under Five Mortality Rate (U5MR)* menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

KAB/KOTA	U5MR
(1)	(2)
Kab. Pandeglang	7.45
Kab. Lebak	10.87
Kab. Tangerang	7.86
Kab. Serang	10.81
Kota Tangerang	7.21
Kota Cilegon	4.67
Kota Serang	8.14
Kota Tangsel	4.34
Provinsi Banten	7.94

Sumber: Supas 2015

#### 4.5 Angka Harapan Hidup (AHH)/*Life Expectancy*

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata umur seseorang yang diharapkan. AHH ( $e_0$ ) juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke  $x$ . Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir ( $e_0$ ) yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. AHH berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Secara teoritis menurunnya angka kematian bayi, akan menyebabkan meningkatnya angka harapan hidup. AHH juga merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Tabel 4.4. Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

KAB/KOTA	AHH
(1)	(2)
Kab. Pandeglang	67.52
Kab. Lebak	65.93
Kab. Tangerang	75.88
Kab. Serang	66.58
Kota Tangerang	72.76
Kota Cilegon	74.18
Kota Serang	70.15
Kota Tangsel	72.07
Provinsi Banten	70.86

Sumber: Supas 2015

Pada tahun 2015 di Kabupaten Tangerang memiliki AHH tertinggi sebesar 75 tahun, sementara di Kabupaten Lebak pada tahun yang sama memiliki AHH terendah yaitu sebesar 65 tahun. Hal ini sangat sesuai dengan angka kematian bayi (IMR) yang disajikan pada tabel 4.2 dimana IMR Kabupaten Tangerang adalah IMR terendah dan IMR Kabupaten Lebak adalah yang tertinggi.

<https://banten.bps.go.id>

## MOBILITAS PENDUDUK

# 5

Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, dan salah satunya perubahan status pekerjaan (Mantra, 2003). Mobilitas penduduk horizontal, atau sering pula disebut dengan mobilitas penduduk geografis, adalah gerak (movement) penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 1978 dalam Mantra, 2003).

Mobilitas penduduk horizontal selanjutnya akan disebut sebagai mobilitas penduduk atau migrasi. Menurut Everet S. Lee (2000) ada 4 faktor yang menyebabkan orang melakukan migrasi yaitu (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) rintangan-rintangan yang menghambat dan (4) faktor pribadi.

Hasil Sensus Penduduk 2010, migrasi netto di Provinsi Banten tercatat sebesar 2,8. Nilai migrasi netto yang positif menunjukkan bahwa mobilitas penduduk yang masuk lebih besar dibandingkan dengan mobilitas penduduk yang keluar. Keadaan ini memberikan arti bahwa Provinsi Banten adalah salah satu daerah tujuan migran.

Provinsi Banten daerah yang cukup pesat perkembangannya. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 tercatat sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi banyak disumbang oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Kawasan Tangerang, Serang dan Cilegon adalah pusat-pusat industri besar/sedang. Sedangkan perdagangan banyak terpusat di kawasan Tangerang. Kondisi inilah yang menyebabkan Provinsi Banten menjadi daerah tujuan migran. Di samping itu, letak geografis Provinsi

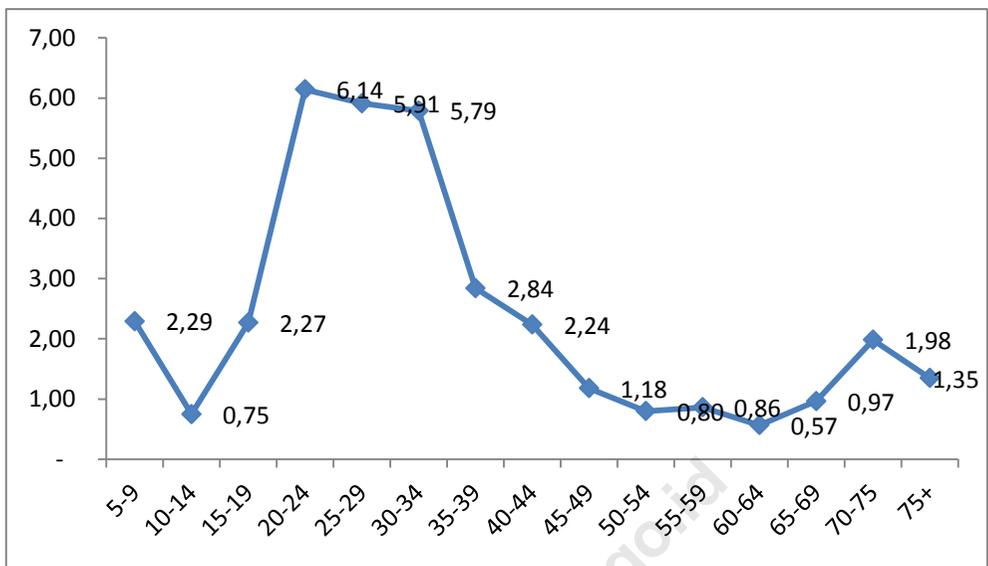
Banten yang berhimpitan dengan ibu kota Negara menjadi faktor penarik lainnya.

Migran selain mempengaruhi perubahan penduduk dari sisi jumlah juga sering berdampak pada perubahan sosial budaya di daerah tujuan. Dalam bab ini akan ulas migrasi risen, komuter dan migrasi total

## 5.1 Migrasi Risen

Migrasi risen adalah perpindahan penduduk saat 5 (lima) tahun yang lalu. Pada SUPAS 2015, yang ditanyakan adalah pada keadaan Mei 2010. Hasil SUPAS 2015, jumlah penduduk Provinsi Banten tercatat sebanyak 11,93 juta jiwa dan 90,42 persen (10,79 juta) diantaranya adalah penduduk usia 5 tahun ke atas. Jumlah penduduk yang tidak tinggal di Provinsi Banten pada 5 tahun yang lalu tercatat sebanyak 324.472 orang yang terdiri dari 165.150 laki-laki dan 159.332 perempuan. Mereka disebut sebagai migran risen di Provinsi Banten. Secara relatif, angka migran risen sebesar 3,01 persen. Berdasarkan jenis kelamin, angka migran risen di Provinsi Banten tidak berbeda nyata.

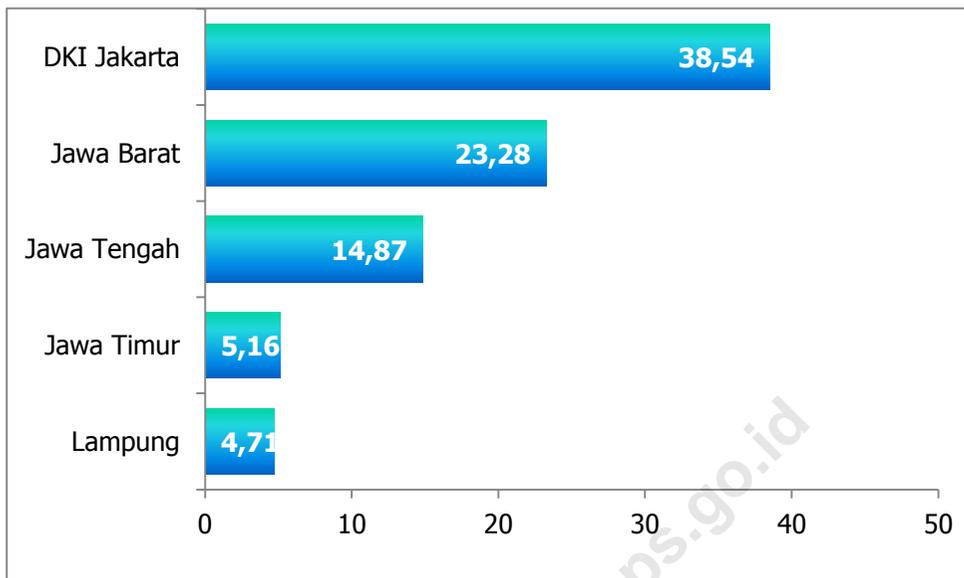
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam melakukan migrasi. Migrasi dilakukan pada usia muda, tujuan mereka melakukan perpindahan umumnya karena faktor ekonomi maupun faktor pendidikan. Berdasarkan kelompok umur, angka migran risen tertinggi terjadi pada kelompok umur 20 – 39 tahun. Pada kelompok usia anak dan lansia, migrasi lebih disebabkan karena mereka harus mengikuti anggota rumah tangga lainnya yang melakukan migrasi (sebagai pengikut). Gambar 5.1 memperlihatkan pola migrasi berdasarkan kelompok umur



Sumber: Supas 2015

Gambar 5.1 Persentase Migrasi Masuk Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten, 2015

Berdasarkan asal daerah migran, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling banyak mengirim migran risen. Banyak alih fungsi lahan dari perumahan menjadi pusat bisnis menyebabkan penduduk DKI Jakarta terpaksa mencari rumah di daerah penyangga ibu kota. Dipilihnya daerah penyangga karena secara geografis letaknya masih di seputaran ibu kota dan ditunjang pula oleh sarana transportasi yang memadai sehingga aktivitas mereka di DKI Jakarta tetap dapat dilakukan. Di samping adanya alih fungsi lahan, harga rumah yang cukup tinggi di DKI Jakarta menyebabkan penduduk DKI Jakarta khususnya keluarga muda harus mencari tinggal di luar DKI Jakarta. Empat daerah lainnya yang menjadi daerah asal migran risen di Provinsi Banten adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung (Gambar 5.2).



Sumber: Supas 2015

Gambar 5.2 Persentase Migran Risen Menurut Asal Provinsi, Provinsi Banten, 2015

Selanjutnya akan dibahas migran risen di Kabupaten/Kota. Batasan wilayah administrasi untuk migrasi adalah kabupaten/kota. Sehingga apabila berbicara dalam level provinsi, seseorang dianggap bukan migran risen karena pada lima tahun yang lalu tinggal di provinsi yang sama. Namun pada level kabupaten/kota, orang tersebut dapat dikatakan migran karena ditinggal di kabupaten/kota lain tetapi masih dalam satu provinsi. Untuk level kabupaten/kota, migran risen ini tidak hanya berasal dari luar provinsi tetapi termasuk juga dalam provinsi. Untuk selanjutnya yang akan dibahas dalam bab ini adalah migran risen level kabupaten/kota.

### 5.1.1 Komposisi Penduduk

Persentase migran risen berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada Tabel 5.1. Kota Tangerang merupakan daerah yang paling tinggi persentase

migran risen yaitu sebesar 8,43 persen diikuti oleh Kota Tangerang Selatan (4,71 persen), Kota Serang (4,27 persen), Kabupaten Tangerang (4,11 persen). Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan dua wilayah yang paling sedikit persentase migran risennya yaitu berada di bawah kisaran 1,5 persen.

Tabel 5.1 Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/Kota	Status Migrasi				Total	
	Migran		Non Migran		Jumlah	%
(1)	Jumlah	%	Jumlah	%		
	(2)	(3)	(4)	(5)		
Pandeglang	7.744	0,72	1.061.931	99,28	1.069.675	100,00
Lebak	15.723	1,37	1.128.331	98,63	1.144.054	100,00
Tangerang	125.285	4,11	2.920.619	95,89	3.045.904	100,00
Serang	33.661	2,54	1.291.617	97,46	1.325.278	100,00
Kota Tangerang	155.790	8,43	1.691.914	91,57	1.847.704	100,00
Kota Cilegon	14.927	4,03	355.317	95,97	370.244	100,00
Kota Serang	24.555	4,27	550.001	95,73	574.556	100,00
Kota Tangerang Selatan	66.668	4,71	1.347.523	95,29	1.414.191	100,00

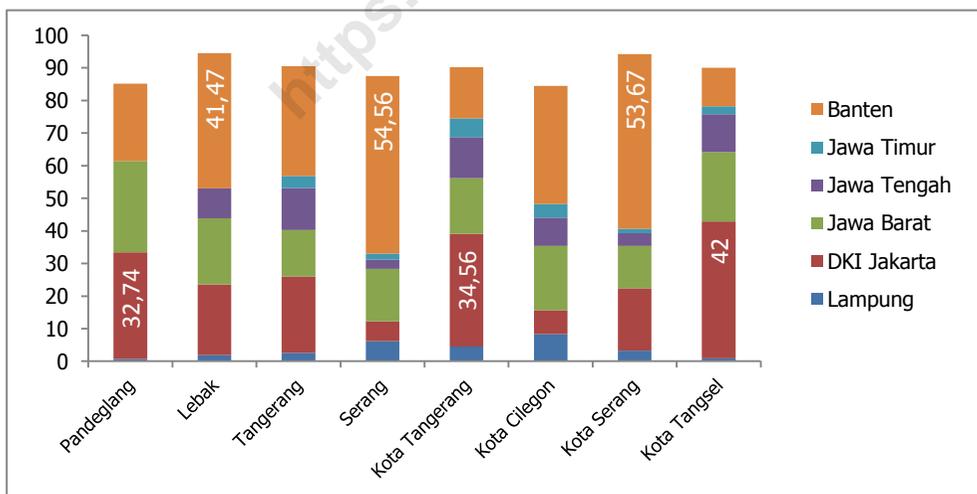
Sumber: Supas 2015

Telah disebutkan di bagian terdahulu bahwa industri besar/ sedang serta perdagangan terpusat di wilayah Tangerang (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang). Keadaan inilah yang menjadi salah satu daya tarik migran untuk datang ke wilayah Tangerang. Posisi wilayah Tangerang yang berhimpitan dengan Jakarta, menjadikan wilayah ini dipilih oleh para migran sebagai lokasi tempat tinggal sementara aktivitas sehari-hari dilakukan di Jakarta.

Kota Serang adalah pusat pemerintahan Provinsi Banten. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Serang mengalami perkembangan yang luar biasa. Berbagai sektor telah tumbuh untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta untuk kenyamanan penduduknya.

### 5.1.2 Arus Migrasi Masuk Risen

Arus migrasi masuk akan memperlihatkan daerah asal migran. Persentase migran risen masuk berdasarkan daerah asal dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 5.3. Pergerakan penduduk di dalam provinsi cukup tinggi, hal ini dapat diketahui dari tingginya migran risen yang berasal dari Provinsi Banten. Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak adalah 3 wilayah yang menerima migran risen dalam provinsi terbanyak. Lebih dari separuh migran risen baik di Kabupaten Serang maupun Kota Serang berasal dari dalam provinsi. Sedangkan persentase migran risen yang berasal dari dalam provinsi di Kabupaten Lebak sebanyak 41,47 persen.



Sumber: Supas 2015

Gambar 5.3 Persentase Migran Risen menurut Daerah Asal dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Di wilayah yang bersinggungan langsung dengan DKI Jakarta seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, persentase migran risen yang berasal dari ibu kota Jakarta tercatat cukup tinggi. Di Kota Tangerang Selatan, 42 persen migran risen berasal dari DKI Jakarta. Sementara di Kota Tangerang tercatat 34,56 persen migran risen berasal dari ibu kota Jakarta. Ada suatu hal yang unik, dimana persentase migran risen di Kabupaten Pandeglang yang berasal dari DKI Jakarta cukup tinggi yaitu 32,74 persen. Kabupaten Pandeglang dengan wilayahnya yang asri menjadi salah satu tempat bagi para orang tua untuk menikmati masa tuanya. Kehidupan di DKI Jakarta yang sangat cepat dan keras mendorong mereka yang sudah lansia mencari daerah yang tenang dan asri. Jawa Barat adalah daerah asal migran terbanyak lainnya. Migran Risen yang berasal dari Jawa Barat tersebar di seluruh kabupaten/kota.

### 5.1.3 Karakteristik Migran Masuk Risen

Berdasarkan jenis kelamin, umumnya migran risen lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan yang perempuan. Hanya di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, jumlah migran risen perempuan lebih banyak dibanding dengan yang lain-laki.

Di Kabupaten Serang cukup banyak industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja perempuan. Sementara di Kota Tangerang selain banyak industri juga banyak pusat-pusat perdagangan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja perempuan. Sedangkan di Lebak, perpindahan perempuan lebih banyak disebabkan karena mengikuti keluarga atau migran pengikut.

Tabel 5.2 Penduduk Migran Risen Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandeglang	4.656	60,12	3.088	39,88	7.744	100,00
Lebak	7.685	48,88	8.038	51,12	15.723	100,00
Tangerang	66.828	53,34	58.457	46,66	125.285	100,00
Serang	16.157	48,00	17.504	52,00	33.661	100,00
Kota Tangerang	76.989	49,42	78.801	50,58	155.790	100,00
Kota Cilegon	7.895	52,89	7.032	47,11	14.927	100,00
Kota Serang	13.182	53,68	11.373	46,32	24.555	100,00
Kota Tangerang Selatan	34.756	52,13	31.912	47,87	66.668	100,00

Sumber: Supas 2015

Banyak alasan kenapa seseorang melakukan migrasi. Telah disebutkan ada 4 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi. Alasan utama seseorang melakukan migrasi risen disajikan pada Tabel 5.3. Hampir di seluruh kabupaten/kota, alasan yang paling banyak menjadi pendorong seseorang untuk melakukan migrasi risen adalah ikut suami/istri/orangtua/anak. Lebih dari separuh migran risen di Kabupaten Lebak, Kota Cilegon dan Kota Serang menyatakan alasan tersebut sebagai penyebab utama kepindahan mereka. Mereka ini dikatakan sebagai pengikut.

Tabel 5.3 Persentase Migran Masuk Risen Menurut Alasan Utama Pindah, Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/Kota	pekerjaan	mencari pekerjaan	ikut suami/istri/orangtua/anak	perumahan	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandeglang	43,58	6,43	40,61	0	9,37	100
Lebak	11,49	1,27	57,17	3,48	22,11	100
Tangerang	21,68	16,86	42,16	10,59	8,42	100
Serang	30,14	5,39	37,07	15,83	10,24	100
Kota Tangerang	26,67	10,35	41,6	8,97	10,94	100
Kota Cilegon	29,69	0	50,65	0	17,14	100
Kota Serang	23,06	4	51,94	4,28	12,14	100
Kota Tangerang Selatan	43,99	2,54	35,02	5,5	11,38	100

Sumber: Supas 2015

Di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan, penyebab yang dijadikan alasan utama melakukan migrasi risen adalah alasan pekerjaan. Baik itu karena mereka mendapat pekerjaan di tempat tinggal saat ini maupun karena mereka dipindahkan lokasi kerjanya ke tempat tinggal sekarang.

Alasan lainnya yang dijadikan penyebab utama kepindahan adalah mencari pekerjaan. Di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang banyak kepindahan yang disebabkan oleh alasan mencari pekerjaan masing-masing sebesar 16,86 persen dan 10,35 persen. Hal tersebut sangat wajar karena di kedua daerah tersebut banyak pusat-pusat industri dan perdagangan.

Perumahan cukup banyak dijadikan alasan utama bagi migran risen di daerah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Sekitar 15,83 persen migran risen di Kabupaten Serang menyatakan bahwa alasan utama

kepindahan mereka adalah perumahan. Sedangkan yang di Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 10,59 persen. Di kedua kabupaten tersebut sangat marak dengan pembangunan perumahan. Mereka diduga berasal dari wilayah yang lokasinya berdekatan dengan kedua kabupaten tersebut, sehingga para migran masih tetap dapat menjalankan aktivitasnya di tempat asal.

Alasan lainnya selain alasan di atas adalah pendidikan, perubahan status perkawinan, ikut saudara kandung, relokasi, kerusakan lingkungan dan bencana. Alasan karena ikut saudara kandung cukup banyak dijadikan penyebab kepindahan oleh migran di Kabupaten Lebak.

## 5.2 Komuter

Jenis mobilitas penduduk lainnya selain migrasi risen adalah mobilitas ulang alik (*commuter*) yang lebih sering disebut nglaju dalam bahasa jawa. Komuter gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dengan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Mobilitas ini umumnya dilakukan dengan tujuan wilayah yang tidak terlalu jauh dari tempat asalnya sehingga dapat ditempuh dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Hugo (1981), dikutip dari Profil Komuter Hasil Supas 2005, membedakan komuter dengan melihat daerah tempat tinggalnya. Pertama *Autochthonous Commuter* adalah penduduk asli luar kota yang melakukan komutasi ke kota untuk bekerja disebabkan oleh faktor ekonomi juga didorong oleh faktor budaya. Di satu pihak mereka enggan tinggal jauh dari lingkungan keluarga dan sanak famili, di lain pihak mereka membutuhkan kota untuk mencari nafkah dan penghasilan yang baik. Dengan adanya transportasi yang makin lancar mereka cenderung untuk tetap tinggal

menetap di desa dan tiap hari pergi ke daerah tujuan untuk bekerja. Kedua *Allochthonous Commuter* adalah penduduk yang sebelumnya tinggal di kota namun karena alasan-alasan tertentu pindah dan menetap di luar kota, mereka tetap bekerja dengan melakukan komuter. *Allochthonous Commuter* merupakan bagian dari sub urbanisasi dimana terjadi perpindahan penduduk dari pusat kota ke pinggiran atau ke luar kota dengan tujuan untuk mendapatkan perumahan yang baik dengan biaya yang relatif murah dan lingkungan yang bersih dan sehat.

Tabel 5.4 Penduduk Komuter Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota, Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(4)	(6)
Pandeglang	3.780	1.354	5.134
Lebak	10.676	2.386	13.062
Tangerang	119.281	52.889	172.170
Serang	43.116	13.739	56.855
Kota Tangerang	167.188	84.931	252.119
Kota Cilegon	5.568	2.862	8.430
Kota Serang	30.197	14.638	44.835
Kota Tangerang Selatan	139.342	64.537	203.879

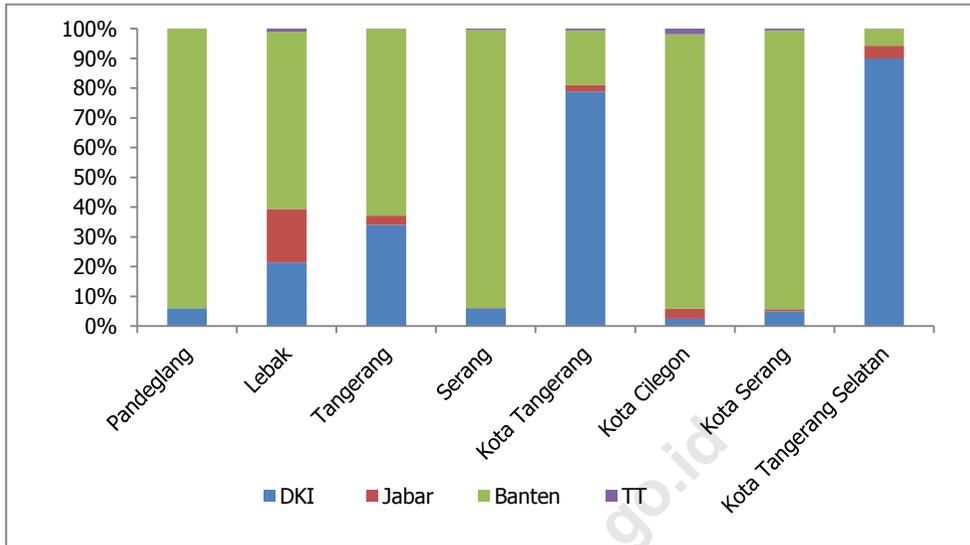
Sumber: Supas 2015

Pada Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa jumlah komuter paling banyak di daerah Tangerang yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Di Kota Tangerang jumlah komuter sebanyak 252.119 orang, di Kota Tangerang Selatan sebanyak 203.879 orang dan di Kabupaten Tangerang sebanyak

172.170 orang. Pada era 90 an, di DKI Jakarta banyak terjadi alih fungsi lahan dari perumahan menjadi pusat bisnis, mereka yang terkena alih fungsi lahan mencari rumah di daerah penyangga ibu kota yang salah satunya adalah kawasan Tangerang. Walaupun rumah mereka sudah berpindah ke luar DKI Jakarta namun diduga aktivitas mereka di daerah asal tetap dilakukan. Mereka ini yang disebut *Allochthonous Commuter*. Disamping itu, kedekatan secara geografis dengan Jakarta serta kemudahan transportasi menyebabkan banyak penduduk Tangerang asli yang memilih beraktivitas di DKI Jakarta. DKI Jakarta memberikan kesempatan yang lebih luas baik untuk bekerja ataupun menimba ilmu. Oleh Hugo, mereka ini disebut *Autochthonous Commuter*.

Selain di Tangerang, daerah lainnya yang banyak komuter adalah Kabupaten dan Kota Serang. Berbeda halnya dengan di Tangerang, di kedua wilayah ini, komuter berbegerak lebih banyak di dalam Provinsi Banten sendiri. Disebutkan di atas, bahwa kepindahan migran masuk risen di Kabupaten Serang banyak disebabkan oleh alasan perumahan. Namun aktivitas mereka di daerah asal masih tetap dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya mobilitas ulang alik dari daerah asal ke Kabupaten Serang. Kondisi yang unik terjadi di Kota Serang, wilayah ini adalah pecahan dari Kabupaten Serang. Kondisi mereka menjadi komuter sebagian besar disebabkan karena perubahan wilayah administrasi.

Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa mobilitas ulang alik banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Di hampir semua kabupaten/kota, persentase perempuan yang melakukan mobilitas ulang alik hanya 30 persen dari keseluruhan penduduk komuter.



Sumber: Supas 2015

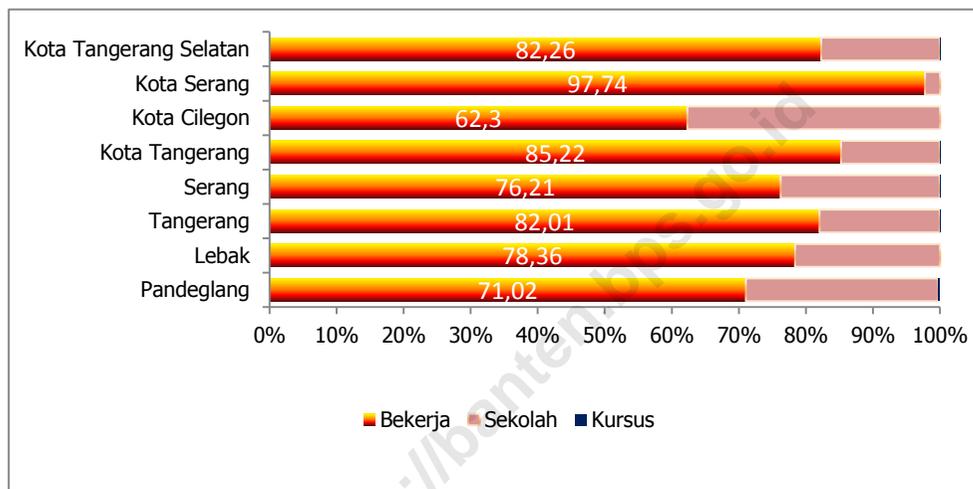
Gambar 5.4 Persentase Komuter Menurut Tempat Tujuan dan Kabupaten/ Kota, Provinsi Banten, 2015

Telah disinggung bahwa untuk Tangerang, daerah yang menjadi tujuan sebagian besar komuter adalah DKI Jakarta. Sedangkan untuk wilayah selain Tangerang, daerah tujuan komuter sebagian besar adalah kabupaten/kota lain di Banten.

Sekitar 90 persen komuter di Kota Tangerang Selatan beraktivitas di DKI Jakarta. Kota Tangerang Selatan berhimpitan dan Kota Jakarta Selatan. Di Kota Tangerang sekitar 79,37 persen komuter melakukan aktivitasnya di DKI Jakarta. Kota ini berhimpitan dengan Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan (Gambar 5.4).

Lebih dari 90 persen komuter yang tinggal di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang melakukan mobilitas ulang alik masih dalam Provinsi Banten. Keempat daerah ini tidak berbatasan langsung dengan provinsi lain sehingga wajar apabila komuter hanya beraktivitas di kabupaten/kota tetangga yang masih dalam satu provinsi.

Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten yang berhimpitan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu berhimpitan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sekitar 18,19 persen komuter di Kabupaten Lebak beraktivitas di provinsi tersebut. Komuter di Lebak, banyak juga yang beraktivitas di DKI Jakarta. Adanya jalur kereta dari ibu kota Kabupaten Lebak ke Jakarta, dapat memperlancar aktivitas para komuter.

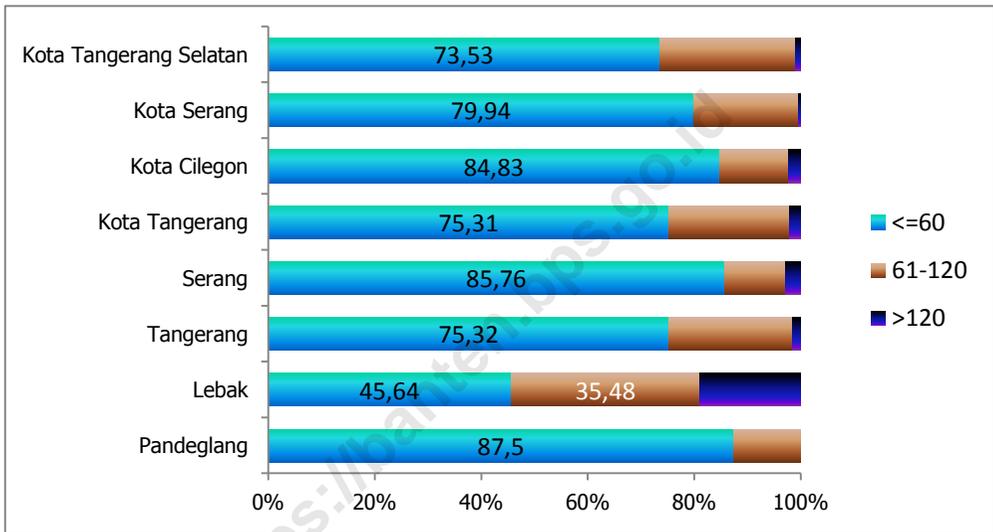


Sumber: Supas 2015

Gambar 5.5 Persentase Komuter menurut Aktivitas Utama di Tempat Tujuan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Apabila dilihat dari aktivitas utama yang dilakukan di daerah tujuan, sebagian besar komuter melakukan mobilitas ulang alik untuk bekerja. Di Kota Serang, 97,74 persen komuter melakukan aktivitas bekerja di daerah tujuan dan hanya 2,26 persen yang melakukan aktivitas bersekolah. Untuk kabupaten/kota lainnya, cukup banyak komuter yang melakukan aktivitas bersekolah di daerah tujuan. Mereka melakukan aktivitas bersekolah di luar kabupaten/kota tempat tinggalnya disebabkan oleh banyak hal, dua diantaranya adalah kurangnya fasilitas pendidikan di tempat asal dan kualitas pendidikan yang lebih baik di daerah tujuan (Gambar 5.5).

Waktu tempuh yang diperlukan oleh sebagian besar komuter untuk mencapai tempat beraktivitasnya di bawah 60 menit. Kondisi ini menandakan lokasi beraktivitasnya tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Kecuali di Kabupaten Lebak, cukup banyak komuter yang memerlukan waktu tempuh antara 61-120 menit untuk mencapai lokasi beraktivitas.

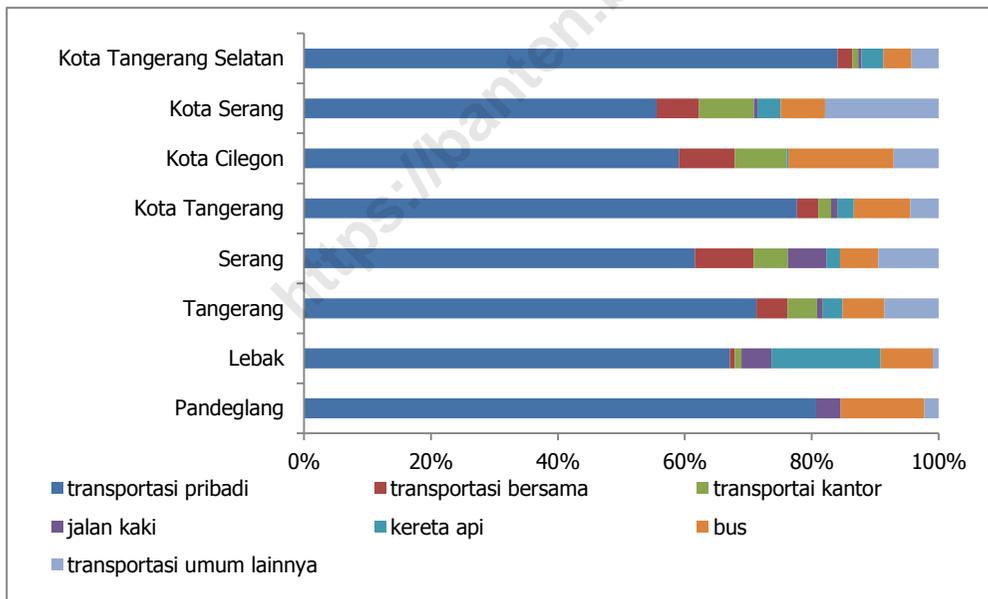


Sumber: Supas 2015

Gambar 5.6 Persentase Komuter Menurut Waktu Tempuh ke Daerah Tujuan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Banyak jenis moda transportasi yang digunakan oleh para komuter untuk menuju lokasi beraktivitasnya (Gambar 5.7). Di seluruh kabupaten/kota, transportasi pribadi menjadi pilihan utama. Sekitar 80,68 persen komuter di Kabupaten Pandeglang menggunakan moda transportasi pribadi untuk menuju tempat beraktivitasnya. Moda transportasi lainnya yang banyak digunakan adalah bus yaitu digunakan oleh sekitar 13,15 persen komuter. Namun demikian, ada komuter yang hanya berjalan kaki menuju lokasi beraktivitas (3,88 persen). Hal ini dimungkinkan untuk desa-desa yang

berbatasan dengan kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lebak atau Kabupaten Serang. Di Kabupaten Lebak, moda transportasi pribadi masih menjadi pilihan bagi 67,11 persen komuter. Moda transportasi umum seperti kereta api, bus dan transportasi umum lainnya banyak digunakan oleh para komuter. Kereta api digunakan oleh 17,19 persen komuter, sedangkan bus digunakan oleh 8,22 persen komuter dan transportasi umum lainnya digunakan oleh 0,93 persen komuter. Di Kabupaten Lebak tersedia trayek bus ke Serang dan ke daerah Jawa Barat seperti Bogor dan Sukabumi. Sekitar 4,72 persen komuter cukup berjalan kaki untuk menuju tempatnya beraktivitas. Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.



Sumber: Supas 2015

Gambar 5.7 Persentase Komuter Menurut Moda Transportasi Menuju Daerah Tujuan dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh komuter di Kabupaten Tangerang adalah transportasi pribadi (71,27 persen), bus (6,56 persen) dan transportasi umum lainnya (8,59 persen). Transportasi umumnya lainnya dapat berupa angkutan kota seperti mikrolet. Tersedia trayek yang melayani route antar kota baik di dalam provinsi maupun antar provinsi. Di Kabupaten Serang dan Kota Serang, moda transportasi umum lainnya menjadi moda transportasi kedua terbanyak yang digunakan oleh para komuter. Cukup banyak trayek angkutan kota yang menghubungkan antara kedua wilayah tersebut dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Di Kota Cilegon, bus merupakan moda transportasi kedua terbanyak digunakan oleh para komuter yaitu sekitar 16,57 persen. Untuk mencapai wilayah di sebelah timur Kota Cilegon seperti Serang dan Tangerang lebih nyaman menggunakan bus karena dapat menghindari kemacetan. Bus dari arah Cilegon yang menuju ke arah timur umumnya melalui jalan bebas hambatan.

### 5.3 Migrasi Total

Migrasi total adalah seluruh kejadian migrasi mencakup migrasi seumur hidup dan migrasi pulang. Jumlah migran total dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang berbeda tempat tinggal sekarang dengan tempat tinggal sebelumnya. Jumlah migran total lebih besar dibandingkan dengan migran risen. Hasil Supas 2015 menunjukkan bahwa migra total terbanyak terdapat di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Di Kota Tangerang Selatan sekitar 708,1 ribu orang yang tinggal di kota ini adalah migran total atau sekitar 46,01 persen dari total penduduknya. Sementara itu di Kota Tangerang tercatat sebanyak 900,8 ribu migran total atau 44,09 persen dari total penduduknya.

Tabel 5.5 Penduduk Menurut Status Migrasi Total dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/Kota	Status Migrasi Total				Total	
	Migran		Non Migran		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandeglang	59.534	4,99	1.134.645	95,01	1.194.179	100,00
Lebak	79.861	6,29	1.189.180	93,71	1.269.041	100,00
Tangerang	772.648	22,98	2.589.092	77,02	3.361.740	100,00
Serang	176.058	11,95	1.297.413	88,05	1.473.471	100,00
Kota Tangerang	900.762	44,09	1.142.451	55,91	2.043.213	100,00
Kota Cilegon	91.439	22,22	320.115	77,78	411.554	100,00
Kota Serang	153.326	23,87	488.879	76,13	642.205	100,00
Kota Tangerang Selatan	708.098	46,01	830.872	53,99	1.538.970	100,00

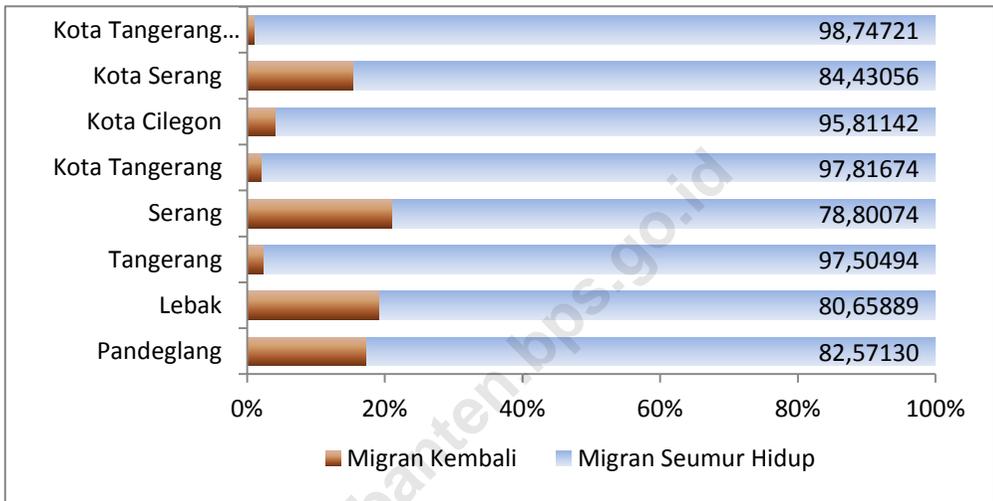
Sumber: Supas 2015

Seperti yang sudah disampaikan bahwa migran total adalah penggabungan dari migran seumur hidup dan migran pulang. Yang dimaksud dengan migrasi seumur hidup adalah migran yang tempat kelahirannya berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Sedangkan migran pulang adalah migran yang tempat lahirnya sama dengan tempat tinggal sekarang tetapi pernah tinggal di tempat lainnya.

Pada Gambar 5.8 dapat dilihat bahwa sebagian besar migran total berstatus sebagai migran seumur hidup. Persentase migran seumur hidup yang paling tinggi terdapat di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon dengan kisaran angka di atas 95 persen. Artinya hampir semua migran total berstatus migran seumur hidup hanya sedikit yang migran kembali.

Angka migran kembali yang cukup tinggi terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang. Di

Kabupaten Serang, sekitar 21 persen migran total adalah migran kembali. Di 3 kabupate/kota lainnya yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang, persentase migran total yang berstatus sebagai migran kembali secara berturut-turut adalah 19,34 persen, 17,43 persen dan 15,57 persen.



Sumber: Supas 2015

Gambar 5.8 Persentase Migran Total menurut Status Migran Seumur Hidup dan Migran Kembali serta Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015



### 6.1 Potret Disabilitas

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, negara-negara di dunia telah menyepakati bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.

Gangguan/keterbatasan fungsi disebabkan oleh kondisi ketidakmampuan atau kehilangan ataupun kelainan baik dari psikologis, fisiologis maupun struktur atau fungsi anatomis. Jenis keterbatasan fungsi antara lain adalah kesulitan melihat (*seeing difficulty*), kesulitan mendengar (*hearing difficulty*), berbicara tidak lancar (*cannot speak fluently*), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (*difficult understand*), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (*slow learning*), keterbatasan berjalan (*walking limitations*), keterbatasan bergerak (*limited movements*) dan kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (*difficulty in picking up small objects*). Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan. Beberapa jenis gangguan tidak dapat terdeteksi dengan hanya melihat

secara fisik, seperti gangguan perilaku dan emosi, mengingat dan konsentrasi, komunikasi, dan mengurus diri sendiri. Oleh karena itu, keputusan bahwa seseorang tidak mengalami disabilitas tidak hanya berdasarkan pada apa yang dilihat secara kasat mata tetapi juga berdasarkan pengamatan.

World Health Organization (WHO) pada tahun 2010, mengungkapkan bahwa jumlah penyandang cacat di negara-negara berkembang mencapai 10 persen dari jumlah penduduk dunia atau sekitar 600 juta jiwa. Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2010 mencatat jumlah orang dengan kebutuhan khusus di Indonesia adalah sebanyak 6,7 juta yang terdiri dari tunanetra, tunawicara, tunarungu, lumpuh dan jenis kecacatan lain. Sementara menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2,45 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 6.515.500 jiwa (Kemenkes RI, 2014). Perkembangan dan perbedaan konsep menyebabkan data mengenai penyandang disabilitas yang dikumpulkan oleh kementerian/lembaga yang berkepentingan dapat berbeda.

Data *ter-update* tentang disabilitas kembali dikumpulkan oleh BPS melalui Survei Pertengahan Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015. Informasi mengenai disabilitas ditanyakan kepada anggota rumah tangga berumur dua tahun ke atas. Identifikasi disabilitas pada balita harus dengan membandingkan antara kesesuaian kemampuan anak dan periode tumbuh kembangnya atau dengan membandingkan aktivitas balita tersebut dengan balita seusianya. Jadi ukuran ada tidaknya gangguan dan sedikit atau parahnya adalah relative terhadap keadaan normal.

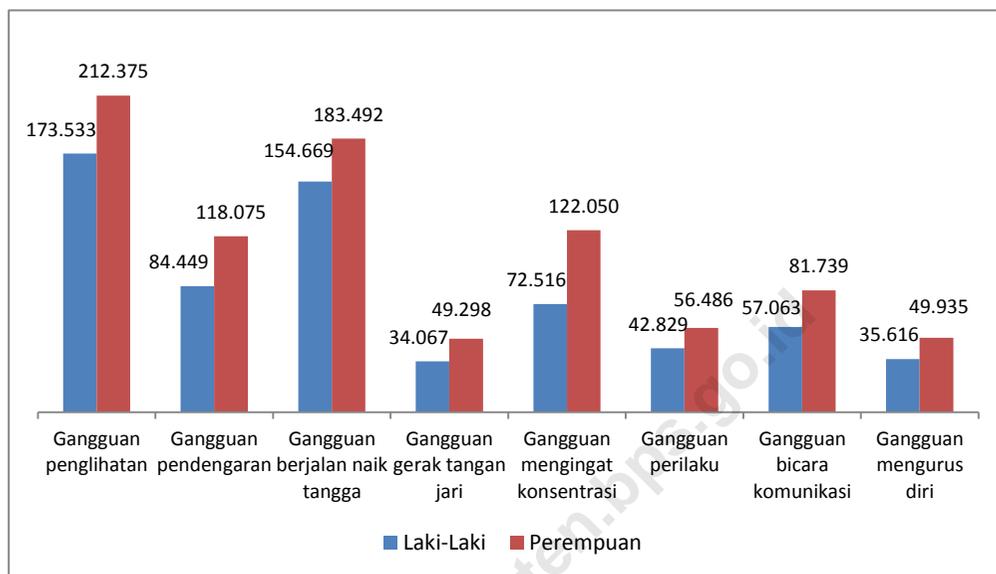
Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Menurut Jenis dan Tingkat Disabilitas, Provinsi Banten 2015

Jenis Disabilitas	Tingkat Disabilitas			Jumlah ART Usia 2 Tahun ke Atas	% Penduduk yang Mengalami Kesulitan
	Sama Sekali Tidak Bisa	Parah	Ringan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gangguan Penglihatan	8.034	39.742	338.132	11.507.109	3,35
Gangguan Pendengaran	5.055	25.506	171.963	11.507.109	1,76
Gangguan Berjalan Naik Tangga	24.650	55.745	257.766	11.507.109	2,94
Gangguan Gerak Tangan Jari	3.527	14.182	65.656	11.507.109	0,72
Gangguan Mengingat Konsentrasi	16.477	34.914	143.175	11.507.109	1,69
Gangguan Perilaku	12.319	18.140	68.856	11.507.109	0,86
Gangguan Bicara Komunikasi	8.946	29.861	99.995	11.507.109	1,21
Gangguan Mengurus Diri Sendiri	12.704	16.126	56.721	11.507.109	0,74

Sumber: Supas 2015

Sampel anggota rumah tangga SUPAS 2015 Provinsi Banten sebanyak 11.934.373 jiwa, dari jumlah tersebut sekitar 11.507.109 jiwa anggota rumah tangga berusia 2 tahun ke atas ditanyakan mengenai kesulitan fungsional. Tabel 1 menyajikan jumlah penduduk usia 2 tahun ke atas menurut jenis dan tingkat disabilitas yang dialami. Dari delapan jenis disabilitas yang ditanyakan, jumlah terbanyak adalah penduduk yang mengalami gangguan penglihatan yaitu sebesar 8.034 jiwa sama sekali tidak bisa melihat, 39.742 jiwa dengan tingkat gangguan parah dan 338.132 jiwa dengan tingkat gangguan ringan. Jenis disabilitas lainnya yang dialami oleh penduduk adalah gangguan berjalan atau naik tangga (338.161 jiwa), gangguan pendengaran (202.524 jiwa), gangguan mengingat atau konsentrasi (194.566 jiwa), gangguan bicara komunikasi (138.802 jiwa),

gangguan perilaku (99.315 jiwa), gangguan menurus diri sendiri (85.551 jiwa) dan gangguan gerak tangan jari (83.365 jiwa).

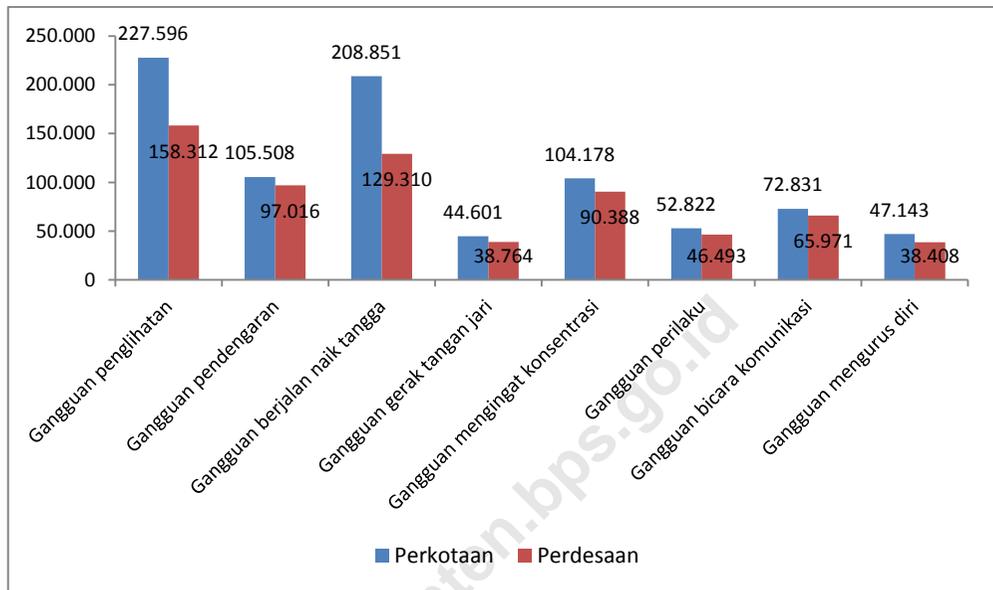


Sumber: Supas 2015

Gambar 6.1 Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Menurut Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin, Provinsi Banten 2015

Penyandang disabilitas di Banten didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 57,16 persen pada semua jenis disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas gangguan mengingat atau konsentrasi perempuan jauh diatas jumlah penyandang disabilitas laki-laki hingga mencapai selisih 49.534 jiwa. Penyandang disabilitas perempuan menerima perilaku diskriminasi yang lebih dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki. Nilai, norma dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas ditentukan oleh peran dan relasi antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Perempuan dengan perannya yg lebih dominan di ruang domestik, seperti tanggung jawab merawat anak dan tugas rumah tangga lainnya, membuat relasi perempuan menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu

stigma dan diskriminasi penyandang disabilitas perempuan menjadi berlapis karena terkait dengan kondisi dan posisinya di masyarakat.



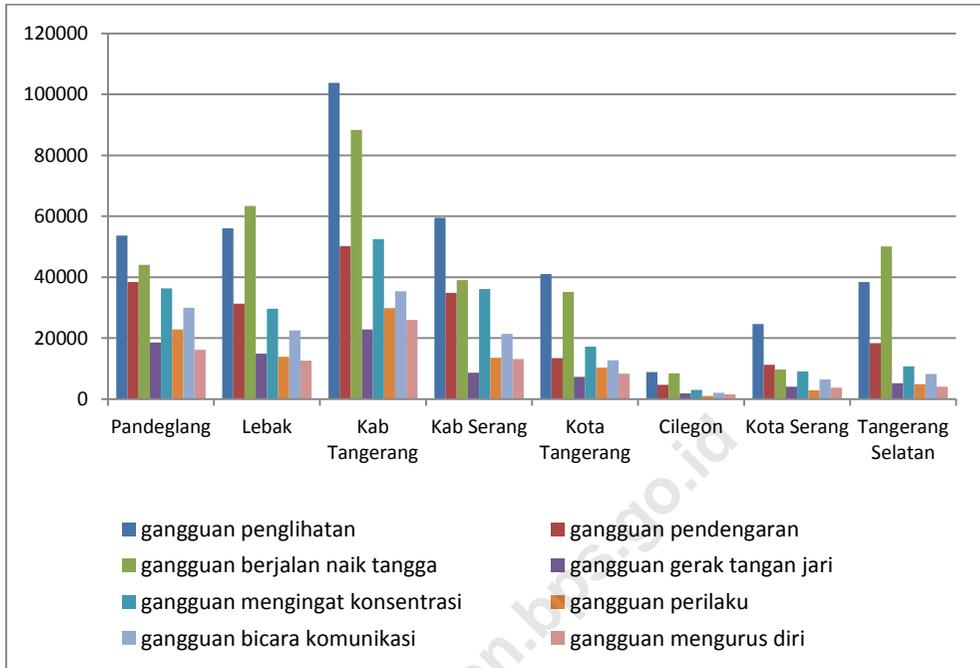
Sumber: Supas 2015

Gambar 6.2 Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Menurut Jenis Disabilitas dan Tipe Daerah, Provinsi Banten 2015

Berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, masyarakat perkotaan lebih banyak mengalami disabilitas. Sebanyak 863.530 jiwa atau lebih dari separuh (56,51 persen) penyandang disabilitas bertempat tinggal di perkotaan. Secara umum, sebenarnya masyarakat perkotaan memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada masyarakat pedesaan. Tetapi perubahan gaya hidup yang cenderung tidak sehat seperti pola makan *junk food*, aktivitas berjam-jam di depan layar komputer, ritme kerja yang tinggi serta kurangnya aktivitas olahraga dapat menyebabkan seseorang mengalami berbagai gangguan fungsi tubuh. Gangguan yang paling tinggi diderita oleh masyarakat perkotaan adalah gangguan penglihatan (227.596 jiwa) dan gangguan berjalan atau naik tangga yaitu sebanyak 208.851 jiwa.

## 6.2 Distribusi Disabilitas

Persentase penyandang disabilitas di Banten berdasarkan hasil SUPAS tahun 2015 adalah sebesar 12,78 persen dari total penduduk. Kabupaten/Kota dengan persentase penyandang disabilitas tertinggi adalah Kabupaten Tangerang (28,76 persen) dan terendah adalah Kota Cilegon (2,06 persen). Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk lebih dari sepertiga total penduduk Banten cukup wajar jika memiliki penyandang disabilitas terbesar yaitu sebanyak 408.907 jiwa dengan rincian penderita gangguan penglihatan (103.760 jiwa), gangguan pendengaran (50.212 jiwa), gangguan berjalan naik tangga (88.364 jiwa), gangguan gerak tangan jari (22.834 jiwa), gangguan mengingat konsentrasi (52.508 jiwa), gangguan perilaku (22.984 jiwa), gangguan bicara komunikasi (35.386 jiwa) dan gangguan mengurus diri (25.950 jiwa). Jumlah penyandang disabilitas yang besar harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, sehingga tidak menjadi beban di kemudian hari. Pada tahun 2016, pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Sosial menyalurkan dana bagi penyandang disabilitas melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masing-masing sebesar 3,6 juta per tahun. Penambahan anggaran akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 dengan harapan dapat meringankan biaya hidup yang harus ditanggung oleh para penyandang disabilitas.

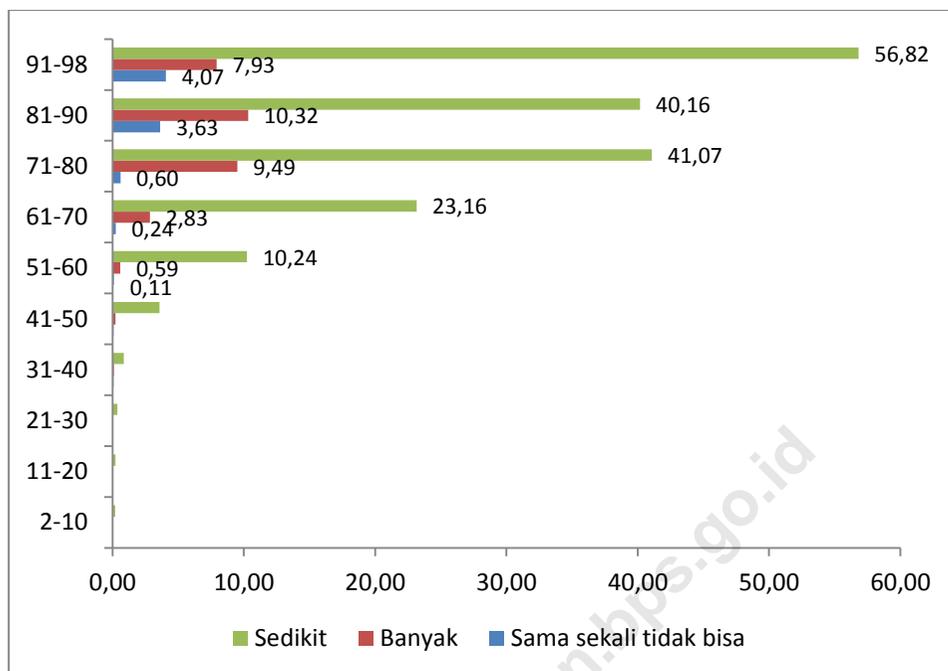


Sumber: Supas 2015

Gambar 6.3 Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Menurut Jenis Disabilitas dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

### 6.2.1 Gangguan Penglihatan

Penyandang gangguan penglihatan adalah seseorang dengan gangguan penglihatan yang tidak awas/jelas sehingga objek/benda yang dilihat hanya terlihat samar/berbayang atau bahkan tidak terlihat sama sekali. ART dikategorikan mengalami disabilitas penglihatan jika masih mengalami kesulitan penglihatan walaupun memakai kacamata/lensa kontak. Termasuk gangguan penglihatan adalah buta total, kurang penglihatan (*low vision*) dan buta warna.



Sumber: Supas 2015

Gambar 6.4 Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Penglihatan Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015

Hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas di Provinsi Banten adalah penyandang gangguan penglihatan. Persentase penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami sedikit gangguan penglihatan sebesar 2,94 persen, kemudian yang mengalami gangguan parah sebesar 0,35 persen dan yang sama sekali tidak bisa melihat adalah sebesar 0,07 persen. Semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami gangguan penglihatan (Gambar 6.4).

Tabel 6.2 Jumlah Penyandang Gangguan Penglihatan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Gangguan Penglihatan							
	Sama sekali tidak bisa		Banyak		Sedikit		Total	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pandeglang	412	992	3.691	3.718	20.486	24.375	24.589	29.085
Lebak	345	1.102	2.841	3.673	20.645	27.455	23.831	32.230
Tangerang	1.668	314	4.169	3.693	42.049	51.867	47.886	55.874
Serang Kota	602	85	2.437	4.802	22.869	28.697	25.908	33.584
Tangerang Kota	424	211	1.741	2.955	16.706	18.987	18.871	22.153
Cilegon	114	286	148	433	3.826	4.063	4.088	4.782
Kota Serang	390	191	973	1.196	9.383	12.465	10.746	13.852
Tangsel	859	39	1.343	1.929	15.412	18.847	17.614	20.815
Banten	4.814	3.220	17.343	22.399	151.376	186.756	173.533	212.375

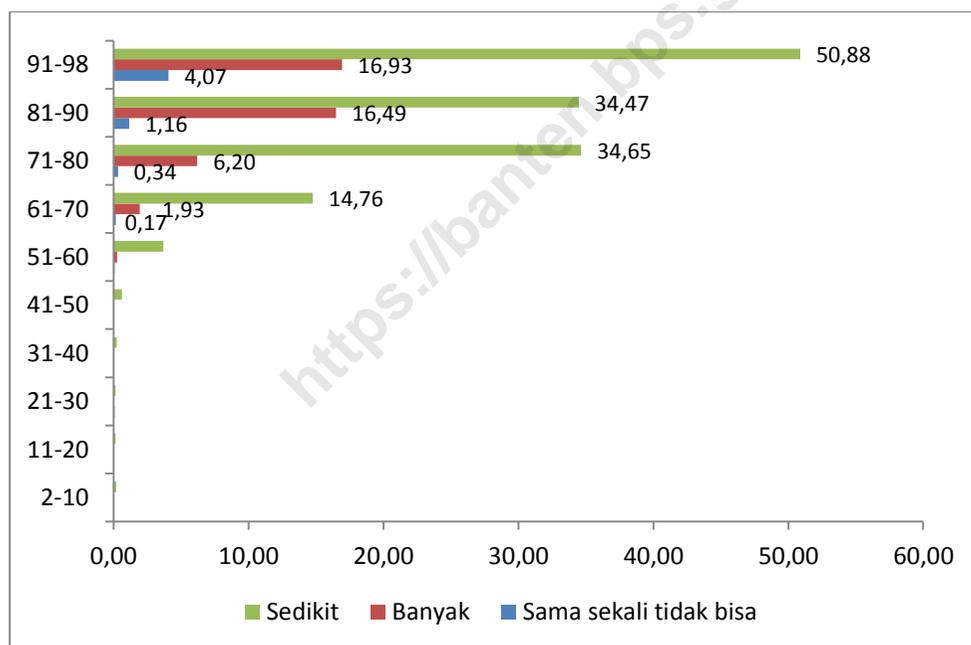
Sumber : SUPAS 2015

Pada Tabel 6.2 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan penglihatan yaitu 212.375 jiwa lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki (173.533 jiwa) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Kabupaten/kota dengan penyandang gangguan penglihatan terbesar secara berurutan adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Serang dan Cilegon.

### 6.2.2 Gangguan Pendengaran

Seseorang dikategorikan mengalami gangguan pendengaran jika mengalami kesulitan mendengar, meskipun sudah memakai alat bantu

mendengar. Jumlah penyandang gangguan pendengaran pada penduduk usia 2 tahun ke atas adalah sebanyak 202.524 jiwa dengan rinci tidak dapat mendengar sama sekali sebanyak 5.055 jiwa, mengalami gangguan berat sebanyak 25.506 jiwa dan mengalami sedikit gangguan pendengaran sebanyak 171.963 jiwa. Kondisi dalam gangguan pendengaran sama halnya dengan gangguan penglihatan, semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami gangguan. Faktor usia menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan derajat kesehatannya, oleh karena itu penduduk lansia memiliki resiko yang lebih tinggi dalam hal gangguan fungsi tubuh termasuk pendengaran salah satunya.



Gambar 6.5 Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Pendengaran Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015

Tabel 6.3 Jumlah Penyandang Gangguan Pendengaran Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Gangguan Pendengaran							
	Sama sekali tidak bisa		Banyak		Sedikit		Total	
	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pandeglang	0	159	2.263	4.090	14.813	17.074	17.076	21.323
Lebak	153	1.114	1.313	3.042	10.610	15.100	12.076	19.256
Tangerang	146	437	1.260	2.925	17.171	28.273	18.577	31.635
Serang	878	622	2.485	3.052	12.580	15.204	15.943	18.878
Kota Tangerang	173	376	882	881	4.314	6.867	5.369	8.124
Kota Cilegon	111	226	37	453	1.561	2.239	1.709	2.918
Kota Serang	305	291	1.151	408	3.781	5.302	5.237	6.001
Kota Tangsel	32	32	387	877	8.043	9.031	8.462	9.940
Banten	1.798	3.257	9.778	15.728	72.873	99.090	84.449	118.075

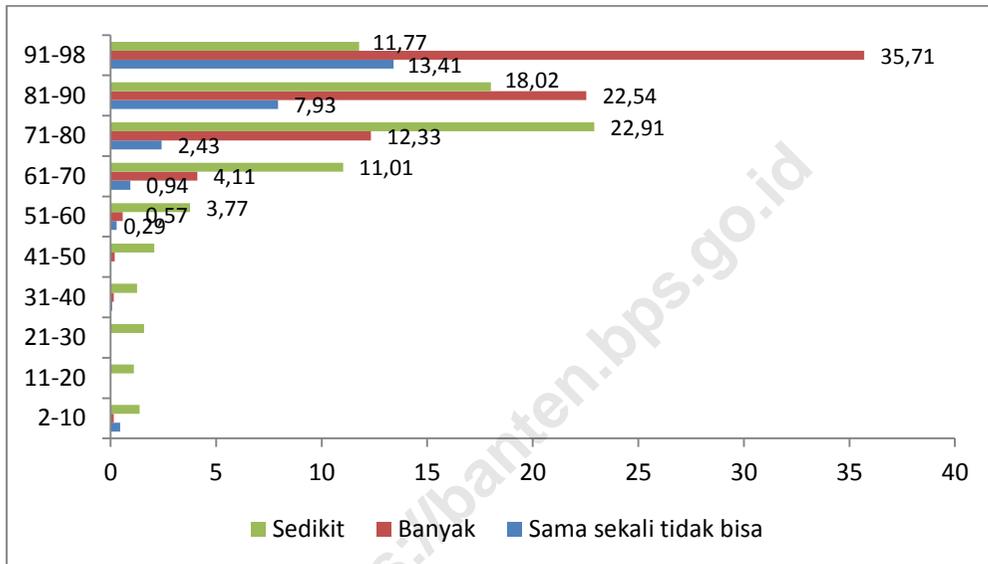
Sumber : SUPAS 2015

Tabel 6.3 menunjukkan bahwa penduduk Banten usia dua tahun ke atas yang mengalami gangguan pendengaran lebih banyak dialami oleh penduduk dengan jenis kelamin perempuan (118.075 jiwa) dibanding laki-laki (84.449 jiwa). Kabupaten/Kota yang cukup besar mempunyai penyandang gangguan pendengaran cukup besar adalah Kabupaten Tangerang (50.212 jiwa), Pandeglang (38.399 jiwa), Kabupaten Serang (34.821 jiwa) dan Lebak (31.332 jiwa).

### 6.2.3 Gangguan Berjalan atau Naik Tangga

Seseorang dikatakan mengalami gangguan berjalan atau naik tangga bila tidak dapat berjalan dengan normal misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan untuk menaiki tangga. Seseorang yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan atau naik tangga dikategorikan mengalami gangguan atau kesulitan. Pada gangguan ini, tingkat keparahan dibedakan menjadi 4 tingkat yaitu sepenuhnya butuh

bantuan orang lain, memakai alat bantu dan membutuhkan bantuan orang lain, memakai alat bantu dan tidak memakai alat bantu. Untuk keseragaman analisis, maka dua jawaban yaitu memakai alat bantu dan membutuhkan bantuan orang lain serta memakai alat bantu dimasukkan dalam tingkat gangguan parah.



Gambar 6.6 Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Berjalan Naik Tangga Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015

Penyandang gangguan berjalan atau naik tangga merupakan jenis disabilitas terbesar nomor 2 setelah gangguan penglihatan. Sebanyak 338.161 jiwa penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan berjalan atau naik tangga dipisahkan menjadi 3 kelompok menurut tingkat keparahan, yaitu sepenuhnya butuh bantuan orang lain (24.650 jiwa), mengalami gangguan parah (55.745 jiwa) dan mengalami sedikit gangguan sebanyak 257.776 jiwa. Seperti jenis gangguan sebelumnya yaitu penglihatan dan pendengaran, semakin tua usia semakin banyak penduduk yang mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga. Kemungkinan

penyebabnya adalah perubahan struktur fisik dan tulang seseorang terutama pada usia lanjut.

Penyandang gangguan berjalan atau naik tangga yang sepenuhnya memerlukan bantuan orang lain cukup besar jumlahnya di Provinsi Banten, yaitu sebesar 12.204 jiwa laki-laki dan 12.446 jiwa perempuan. Ini artinya cukup banyak penderita gangguan yang sama sekali tidak bisa berjalan atau hanya berbaring di tempat tidur saja. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Lebak mempunyai penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan berjalan atau naik tangga dengan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 5,18 persen. Penyandang gangguan berjalan atau naik tangga berjenis kelamin perempuan masih mendominasi di tiap-tiap kabupaten/kota kecuali Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

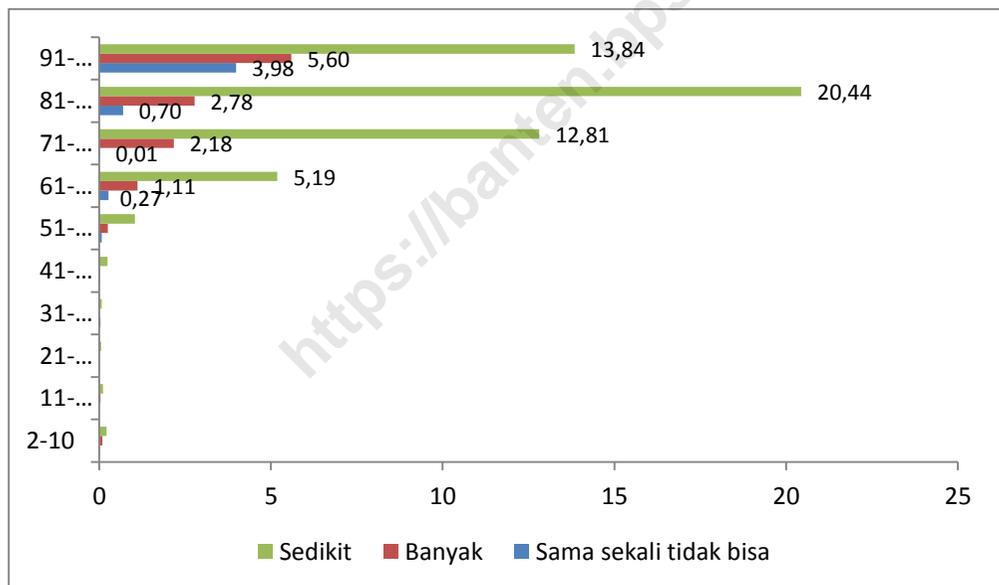
Tabel 6.4 Jumlah Penyandang Gangguan Berjalan Naik Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Gangguan Berjalan Naik Tangga									
	Sepenuhnya butuh bantuan		Memakai alat bantu dan bantuan		Memakai alat bantu		Tidak memakai alat bantu		Total	
	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan	laki-laki	perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pandeglang	1.787	2.100	1.617	1.937	2.790	3.916	13.490	16.442	19.684	24.395
Lebak	516	1.829	800	316	2.613	4.696	26.715	25.858	30.644	32.699
Tangerang	2.829	2.260	579	1.341	7.672	8.916	27.000	37.767	38.080	50.284
Serang	1.434	1.702	787	1.080	1.704	2.430	12.290	17.573	16.215	22.785
Kota Tangerang	3.509	3.017	1.587	1.153	1.927	1.839	8.583	13.529	15.606	19.538
Kota Cilegon	165	740	0	181	180	408	3.448	3.332	3.793	4.661
Kota Serang	549	145	531	65	850	771	3.168	3.615	5.098	4.596
Kota Tangsel	1.415	653	601	833	924	701	22.609	22.347	25.549	24.534
Banten	12.204	12.446	6.502	6.906	18.660	23.677	117.303	140.463	154.669	183.492

Sumber: Supas 2015

#### 6.2.4 Gangguan Gerak Tangan Jari

Seseorang dikatakan mengalami gangguan gerak tangan jari seperti misalnya dalam mengambil/menggenggam atau memungut sesuatu mengalami kesulitan. Penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan gerak tangan jari sebesar 0,72 persen dimana 0,03 persen penduduk sama sekali tidak bisa menggerakkan tangan jarinya, 0,12 persen penduduk mengalami banyak gangguan menggerakkan tangan jari dan 0,57 persen dengan tingkat gangguan sedikit. Peningkatan persentase penduduk yang mengalami gangguan gerak tangan jari mulai terlihat signifikan pada penduduk usia lanjut.



Gambar 6.7 Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Gerak Tangan Jari Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015

Kabupaten Tangerang masih menjadi penyumbang terbesar penyandang gangguan gerak tangan jari yaitu sebanyak 9.751 laki-laki dan 13.092 perempuan. Sama seperti jenis gangguan yang lainnya, penduduk

usia 2 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan masih mendominasi penyandang gangguan gerak tangan jari kecuali di Kota Serang. Penyandang gangguan gerak tangan jari laki-laki jumlahnya justru tiga kali lipat lebih banyak dari perempuan.

Tabel 6.5 Jumlah Penyandang Gangguan Gerak Tangan Jari Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Gangguan Gerak Tangan Jari							
	Sama sekali tidak bisa		Banyak		Sedikit		Total	
	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pandeglang	142	361	2.017	1.558	5.233	9.299	7.392	11.218
Lebak	252	238	805	1.256	3.007	9.341	4.064	10.835
Tangerang	907	0	1.863	1.421	6.981	11.671	9.751	13.092
Serang Kota	223	22	502	1.032	2.898	4.019	3.623	5.073
Tangerang Kota	101	625	1.104	1.210	2.576	1.642	3.781	3.477
Kota Cilegon	92	85	0	216	99	1.351	191	1.652
Kota Serang	344	19	666	154	2.066	811	3.076	984
Kota Tangsel	77	39	0	378	2.112	2.550	2.189	2.967
Banten	2.138	1.389	6.957	7.225	24.972	40.684	34.067	49.298

Sumber: Supas 2015

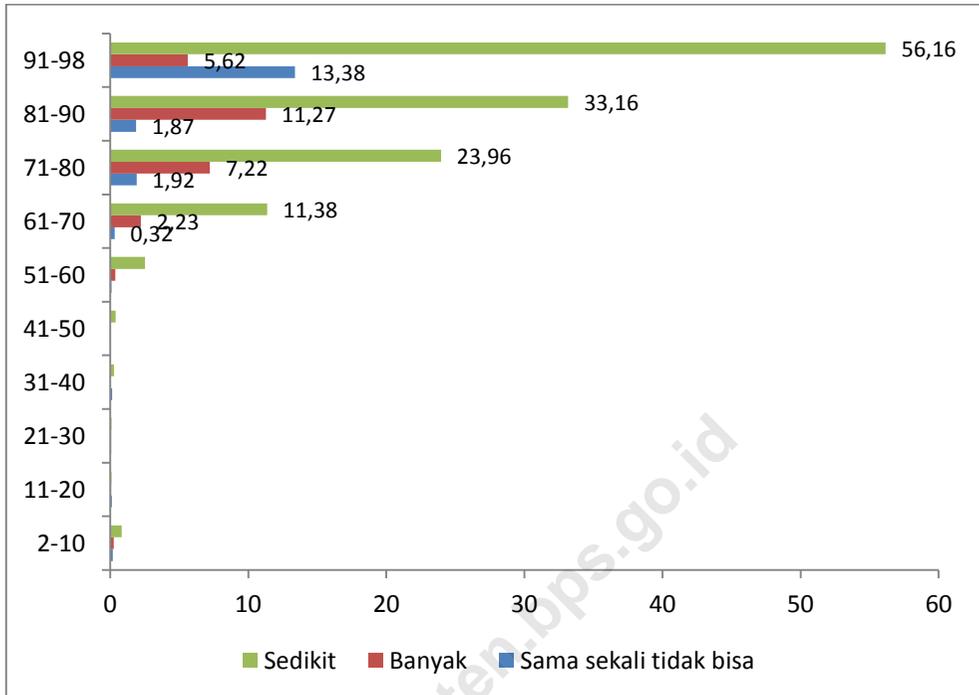
### 6.2.5 Gangguan Mengingat Konsentrasi

Gangguan mengingat adalah situasi dimana seseorang mengalami masalah dalam mengingat kembali hal-hal yang telah terjadi baik masa lalu maupun baru saja terjadi. Gangguan konsentrasi adalah situasi dimana seseorang mengalami masalah dalam mencurahkan perhatian untuk menyelesaikan tugasnya. Tingkat keparahan gangguan mengingat dan berkonsentrasi seperti dirangkum dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Tingkat Kesulitan Gangguan Mengingat dan Konsentrasi

Tingkat Kesulitan	Mengingat	Konsentrasi
(1)	(2)	(3)
Selalu mengalami kesulitan	Tidak bisa mengingat memori jangka panjang dan pendek. Contoh: amnesia, lupa nama dan umur sendiri	Selalu tidak bisa fokus pada hal tertentu seperti membaca, menghitung angka dan mempelajari sesuatu
Seringkali mengalami kesulitan	Tidak bisa mengingat memori jangka pendek (misal kejadian beberapa jam yang lalu)	Seringkali tidak bisa fokus/ tidak dapat berkonsentrasi
Sedikit mengalami kesulitan	Tidak dapat mengingat memori jangka panjang.	Tidak dapat berkonsentrasi pada penyelesaian pekerjaan tertentu dan berpindah pada pekerjaan lainnya.

Penduduk yang mengalami gangguan mengingat atau konsentrasi sebanyak 194.566 jiwa dimana 16.477 jiwa selalu mengalami kesulitan dalam mengingat atau berkonsentrasi, 34.914 jiwa seringkali mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi dan 143.175 jiwa sedikit mengalami gangguan. Semakin tua umur, semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi.



Gambar 6.8 Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Mengingat Konsentrasi Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015

Persentase penduduk perempuan yang mengalami gangguan mengingat atau konsentrasi jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 62,73 persen. Kabupaten/Kota dengan jumlah tertinggi penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami gangguan mengingat/konsentrasi adalah Kabupaten Tangerang (52.508 jiwa), Pandeglang (36.297 jiwa), Kabupaten Serang (36.115 jiwa) dan Lebak (29.657 jiwa).

Tabel 6.7 Jumlah Penyandang Gangguan Mengingat Konsentrasi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Gangguan Mengingat Konsentrasi							
	Sama sekali tidak bisa		Banyak		Sedikit		Total	
	perempuan		perempuan		perempuan		perempu	
	laki-laki	n	laki-laki	n	laki-laki	n	laki-laki	an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pandeglang	1.243	760	2.351	3.305	9.890	18.748	13.484	22.813
Lebak	1.244	802	2.143	3.319	7.271	14.878	10.658	18.999
Tangerang	3.035	2.702	4.232	4.922	10.511	27.106	17.778	34.730
Serang	1.272	1.875	3.158	5.096	9.533	15.181	13.963	22.152
Kota Tangerang	797	658	971	1.842	5.408	7.490	7.176	9.990
Kota Cilegon	22	221	161	229	867	1.556	1.050	2.006
Kota Serang	388	414	867	569	2.205	4.640	3.460	5.623
Kota Tangsel	348	696	542	1.207	4.057	3.834	4.947	5.737
Banten	8.349	8.128	14.425	20.489	49.742	93.433	72.516	122.050

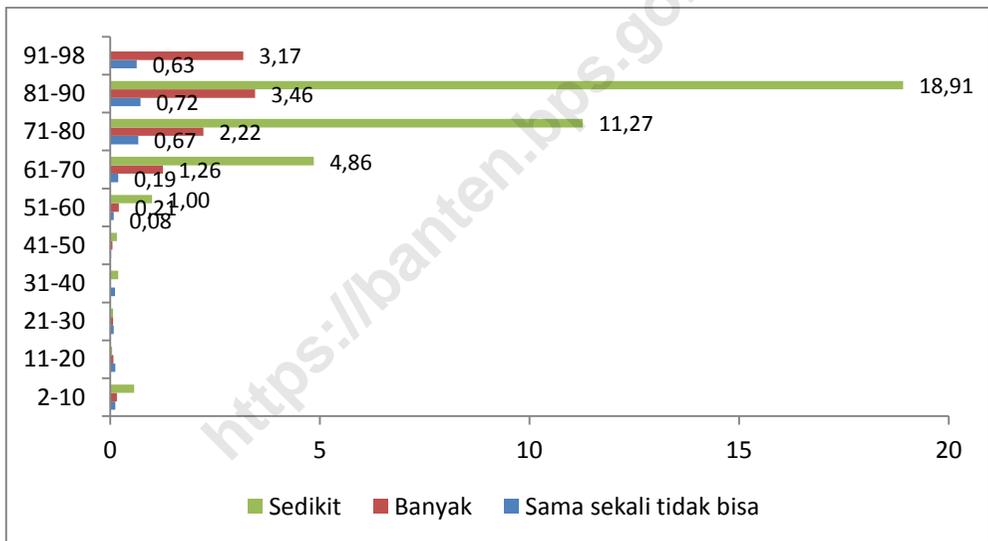
Sumber: Supas 2015

### 6.2.6 Gangguan Perilaku

Gangguan perilaku dan emosi adalah gangguan atau kesulitan atau ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol perilaku dan emosi yang merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti menyakiti diri sendiri dan mengganggu orang lain. Contoh jenis gangguan atau keterbatasan perilaku dan emosi :

- a. Hiperaktif, yaitu gangguan tingkah laku yang tidak biasa, dimana tingkahnya sangat aktif (berlebihan) dibandingkan dengan orang lain/anak lain di sekitarnya.
- b. Depresi, yaitu suatu perasaan sedih/tertekan yang berlebihan yang berakibat pada kesulitan berinteraksi pada orang lain.

- c. Gangguan jiwa, yaitu gejala yang bagi sebagian orang di pandang aneh bahkan menakutkan, mulai dari berhalusinasi, marah-marah, hingga berbicara sendiri.
- d. Autis, yaitu gangguan perkembangan berkomunikasi, berinteraksi sosial dan fokus dalam dunianya sendiri (mengasingakan diri sendiri). Untuk usia anak-anak gangguan perkembangan syaraf yang kompleks dan ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku terbatas. Umumnya gejala autis terlihat pada usia 3 tahun pertama.



Gambar 6.9 Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Perilaku Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015

Penyandang gangguan perilaku atau emosi pada kelompok penduduk usia 2-10 tahun cukup banyak di Provinsi Banten yaitu sebanyak 18.136 jiwa atau sekitar 18,26 persen dari total penyandang gangguan di semua kelompok umur. Kemungkinan besar anak-anak tersebut merupakan anak autis. Selain menyerang anak-anak, gangguan ini juga menyerang orang

dewasa. Tetapi pada lansia kelompok usia 91-98 tahun justru gangguan ini menurun seiring dengan penurunan tenaga dan tingkat emosinya. Penduduk usia 2 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan masih mendominasi penyandang gangguan perilaku di Banten.

Tabel 6.8 Jumlah Penyandang Gangguan Perilaku Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

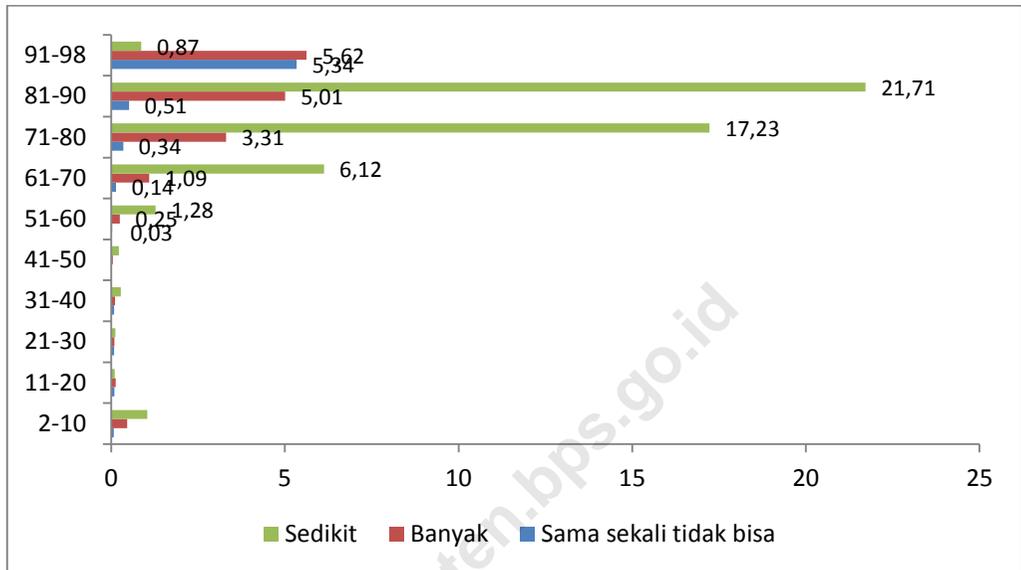
Kab/Kota	Gangguan Perilaku							
	Sama sekali tidak bisa		Banyak		Sedikit		Total	
	laki-laki	perempua n	laki- laki	perempua n	laki- laki	perempua n	laki- laki	perempua n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pandeglang	1.343	447	2.118	1.647	6.937	10.338	10.398	12.432
Lebak	916	1.361	982	871	4.212	5.575	6.110	7.807
Tangerang	2.676	2.868	2.547	3.305	5.938	12.550	11.161	18.723
Serang	290	375	1.677	2.140	4.198	4.854	6.165	7.369
Kota Tangerang	561	0	1.254	958	2.625	4.956	4.440	5.914
Kota Cilegon	29	201	162	20	62	496	253	717
Kota Serang	352	234	276	146	878	1.029	1.506	1.409
Kota Tangsel	311	355	37	0	2.448	1.760	2.796	2.115
Banten	6.478	5.841	9.053	9.087	27.298	41.558	42.829	56.486

Sumber: Supas 2015

### 6.2.7 Gangguan Bicara Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi yang berupa percakapan yang dapat dipahami oleh orang lain dan memahami percakapan orang lain. Gangguan komunikasi adalah situasi dimana seseorang mengalami gangguan atau kesulitan dalam memahami perkataan orang lain dan juga sebaliknya perkataannya sulit dipahami. Termasuk gangguan yang diakibatkan karena gangguan bicara, mendengar, gangguan jiwa/mental antara lain: tuna wicara, sengau/gagap/pelo, tuna rungu, gangguan jiwa/mental, gangguan

koordinasi sensorik dan motorik, gangguan intelektual (idiot, *down syndrome*), gangguan emosi/perilaku (autis).



Gambar 6.10 Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Komunikasi Bicara Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015

Seseorang dikatakan sama sekali tidak bisa memahami/dipahami/berkomunikasi jika responden tidak dapat memahami perkataan orang lain atau perkataannya sulit dipahami orang lain atau bahkan tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Seseorang dikatakan banyak mengalami kesulitan jika responden tidak dapat mendengar dengan jelas dan sulit memahami suara lawan bicara meskipun sudah dikatakan dengan suara yang keras misalnya penderita tuna rungu atau jika responden mengeluarkan suara berupa kata bermakna namun tidak terucap dengan jelas dan sangat sulit dipahami oleh lawan bicara walaupun dengan upaya yang keras. Termasuk orang yang mengeluarkan suara bermakna tapi tidak ada lawan bicara yang mengerti. Sedangkan seseorang dikatakan sedikit

mengalami kesulitan jika responden tidak dapat langsung menangkap makna dari perkataan lawan bicara, perlu sedikit upaya untuk memahami lawan bicara atau jika responden dapat mengeluarkan suara berupa kata bermakna namun tidak terucap dengan jelas dan masih mudah dipahami, seperti misalnya gagap ringan, bibir sumbing, stroke ringan dll.

Sebanyak 138.802 jiwa penduduk usia 2 tahun ke atas merupakan penyandang gangguan bicara komunikasi, 57.063 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 81.739 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tingkat keparahannya, sebanyak 8.946 jiwa sama sekali tidak bisa bicara atau komunikasi, 29.861 jiwa mengalami gangguan bicara atau komunikasi yang cukup parah dan 99.995 jiwa mengalami sedikit gangguan.

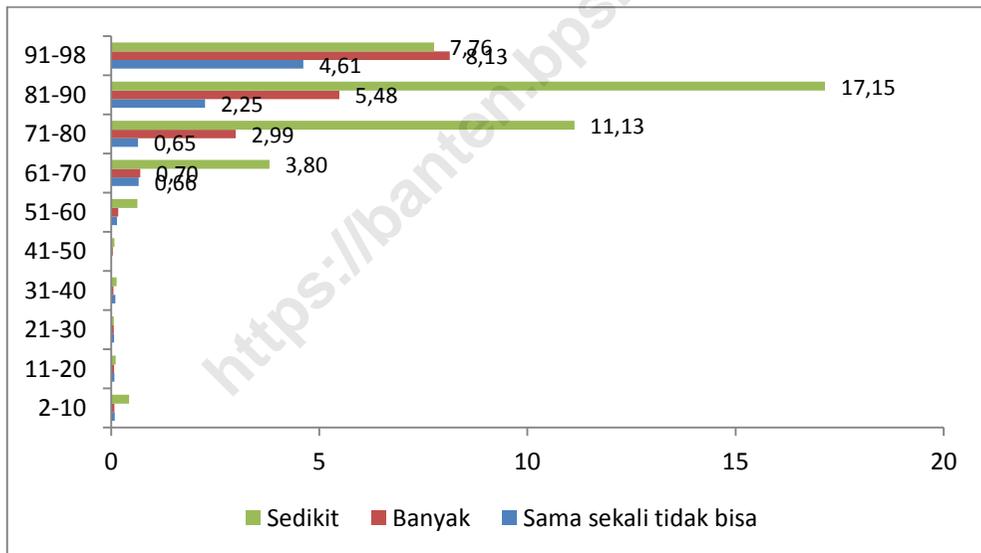
Tabel 6.9 Jumlah Penyandang Gangguan Bicara Komunikasi Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Gangguan Bicara Komunikasi							
	Sama sekali tidak bisa		Banyak		Sedikit		Total	
	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pandeglang	760	147	3.400	4.003	9.090	12.577	13.250	16.727
Lebak	1.029	506	2.521	2.176	5.813	10.540	9.363	13.222
Tangerang	1.238	1.656	3.601	4.318	8.018	16.555	12.857	22.529
Serang	600	808	1.679	2.228	6.706	9.400	8.985	12.436
Kota Tangerang	481	0	1.467	1.117	3.645	5.969	5.593	7.086
Kota Cilegon	29	473	29	113	434	976	492	1.562
Kota Serang	565	198	988	493	1.689	2.520	3.242	3.211
Kota Tangsel	69	387	930	798	2.282	3.781	3.281	4.966
Banten	4.771	4.175	14.615	15.246	37.677	62.318	57.063	81.739

Sumber: Supas 2015

### 6.2.8 Gangguan Mengurus Diri

Mengurus diri sendiri adalah kemampuan seseorang untuk merawat kesehatan diri dimulai mandi, makan, berpakaian, buang air kecil (BAK), buang air besar (BAB) tanpa bantuan orang lain. Persentase penduduk usia 2 tahun ke atas yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri sebesar 0,74 persen dengan 0,49 persen yang mengalami sedikit kesulitan dalam mengurus diri sendiri, 0,14 persen yang mengalami kesulitan parah dan 0,11 persen sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri. Sama hanya dengan gangguan-gangguan yang telah dibahas sebelumnya, gangguan mengurus diri banyak dialami oleh penduduk usia lanjut.



Gambar 6.11 Persentase Penduduk Usia 2 Tahun ke Atas Penyandang Gangguan Mengurus Diri Menurut Kelompok Umur, Provinsi Banten 2015

Persentase perempuan yang mengalami gangguan mengurus diri sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki di seluruh kabupaten/kota kecuali di Kota Tangerang, Kota Serang dan Tangerang Selatan.

Tabel 6.10 Jumlah Penyandang Gangguan Mengurus Diri Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Gangguan Mengurus Diri							
	Sama sekali tidak bisa		Banyak		Sedikit		Total	
	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pandeglang	595	678	1.292	1.721	5.010	6.899	6.897	9.298
Lebak	501	895	611	2.114	3.665	4.797	4.777	7.806
Tangerang	1.969	1.071	2.004	2.754	5.597	12.555	9.570	16.380
Serang	1.317	1.374	1.167	1.535	2.905	4.816	5.389	7.725
Kota Tangerang	999	1.331	841	1.112	2.446	1.574	4.286	4.017
Kota Cilegon	70	371	28	136	170	789	268	1.296
Kota Serang	297	66	678	102	1.282	1.351	2.257	1.519
Kota Tangsel	788	382	0	31	1.384	1.481	2.172	1.894
Banten	6.536	6.168	6.621	9.505	22.459	34.262	35.616	49.935

Sumber: Supas 2015

## PENDIDIKAN

# 7

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang yang menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga Negara.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, salah satu fokus *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah memastikan supaya pada tahun 2015, anak-anak di seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara lengkap (UNDP, 2012). Di Indonesia, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP), atau bentuk lainnya yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

### 7.1 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Berbagai upaya

pemerintah telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi sekolah, salah satunya adalah dengan program pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar. Hal ini tidak hanya untuk pemenuhan salah satu hak dasar warga Negara, namun bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya warganya.

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa 94,75 persen dari 1,39 juta penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Banten telah mendapatkan pendidikan dasar. Sementara itu jika dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk usia 7-12 tahun di daerah perkotaan yang masih sekolah lebih besar dibandingkan penduduk yang di daerah perdesaan. Di daerah perkotaan mencapai 95,33 persen dari 917, 55 ribu penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah, sedangkan yang di perdesaan sebesar 93,61 persen dari 472,76 penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah.

Untuk kelompok usia 13-15 tahun, capaian partisipasi sekolah sebesar 89,38 persen dari 689,48 ribu penduduk. Sama halnya jika dilihat daerah tempat tinggal, penduduk yang di daerah perkotaan capaiannya lebih besar dibandingkan yang di daerah perdesaan. Sekitar 92,25 persen dari 455,99 ribu penduduk usia 13-15 tahun di perkotaan masih bersekolah,

sedangkan di yang perdesaan hanya 83,78 persen dari 233,49 ribu penduduk kelompok usia tersebut.

Penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah sebesar 57,04 persen dari 584,43 ribu penduduk. Sama halnya dengan kelompok usia sebelumnya, capaian partisipasi sekolah daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang di perdesaan, 61,16 persen penduduk di perkotaan masih sekolah dari 387,43 ribu penduduk, sedangkan yang di perdesaan sebesar 48,94 persen dari 197 ribu penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah.

Perbedaan capaian partisipasi sekolah di daerah perkotaan dan perdesaan diduga mengindikasikan kemudahan aksesibilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Partisipasi sekolah seseorang sedikit banyak ditentukan oleh status ekonomi rumah tangganya. Rumah tangga dengan status ekonomi tinggi cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan status ekonomi yang lebih rendah. Tingginya biaya pendidikan mendorong seseorang untuk meninggalkan bangku sekolah. Selain itu, biaya hidup (*cost of living*) yang tinggi juga menuntut seseorang lebih memilih kesempatan untuk bekerja (BPS, 2014).

Berdasarkan jenis kelamin tidak ada perbedaan signifikan APS antara yang laki-laki dengan yang perempuan untuk setiap jenjang pendidikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kesenjangan gender di bidang pendidikan sudah mulai hilang.

Tabel 7.1 Jumlah dan Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah Menurut Jenis Kelamin, Klasifikasi Daerah dan Kelompok Usia Sekolah di Banten, 2015

Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah	Jumlah Penduduk Usia Sekolah			Persentase Penduduk yang Masih Sekolah		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jenis</b>						
<b>Kelamin</b>						
Laki-laki	708.731	359.658	295.799	94,92	89,06	56,21
Perempuan	681.584	329.826	288.639	94,57	89,72	57,89
Laki-laki + perempuan	1.390.315	689.484	584.438	94,75	89,38	57,04
<b>Klasifikasi</b>						
<b>Daerah</b>						
Perkotaan	917.550	455.991	387.432	95,33	92,25	61,16
Perdesaan	472.765	233.493	197.006	93,61	83,78	48,94
Perkotaan + perdesaan	1.390.315	689.484	584.438	94,75	89,38	57,04

Sumber : SUPAS 2015

Partisipasi sekolah kelompok usia 7-12 telah mencapai lebih dari 90 persen di semua kabupaten/kota di Provinsi Banten, dengan variasi antar kabupaten/kota untuk kelompok usia ini sangat tipis. Capaian partisipasi sekolah terbesar terjadi di Kota Cilegon (97,04 persen) dan terendah di Kabupaten Lebak (92 persen). Perbedaan ini diduga karena aksesibilitas pendidikan di kedua daerah ini yang berbeda cukup nyata, Kota Cilegon merupakan daerah perkotaan dengan aksesibilitas pendidikan yang cukup mudah, sedangkan Kabupaten Lebak merupakan daerah perdesaan yang aksesibilitas pendidikannya relatif lebih sulit.

Tabel 7.2 Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Usia Sekolah di Banten, 2015

Kabupaten/Kota	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Pandeglang	95,27	86,92	48,59
Lebak	92,00	81,30	43,96
Tangerang	95,03	90,94	52,86
Serang	94,27	89,78	58,55
Kota Tangerang	94,64	89,19	65,51
Kota Cilegon	97,04	94,37	66,36
Kota Serang	94,35	87,70	63,02
Kota Tangerang Selatan	96,39	95,80	69,38
Banten	94,75	89,38	57,04

Sumber : SUPAS 2015

Untuk kelompok usia 13-15 tahun, capaian partisipasi sekolah cukup bervariasi antar kabupaten/kota. Partisipasi sekolah tertinggi di Kota Tangerang Selatan (95,80 persen) dan terendah di Kabupaten Lebak (81,30 persen). Sama hal dengan kelompok usia 7-12 tahun, ini dimungkinkan karena aksesibilitas terhadap sarana pendidikan yang cukup berbeda. Di samping itu, tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat di Kota Tangerang Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan di Kabupaten Lebak.

Variasi partisipasi sekolah yang cukup tinggi terjadi di kelompok usia pendidikan menengah 16-18 tahun, capaian tertinggi terjadi di Kota Tangerang Selatan (69,38 persen) dan terendah di Kabupaten Lebak (43,96 persen). Keterbatasan sarana pendidikan jenjang menengah dan status ekonomi rumah tangga juga sangat berpengaruh terhadap kesempatan penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan.

## 7.2 Melek Huruf

Melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi (UNESCO). Terdapat korelasi yang kuat antara kemampuan membaca dengan investasi dan kinerja seseorang. Membaca (keaksaraan) akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek lain menyangkut peningkatan kualitas hidup (BPS, 2012).

Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Indonesia telah melakukan kegiatan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang. Kegiatan PBA diawali sejak perang kemerdekaan, dimana para gerilyawan yang sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung secara aktif mengajari rekannya yang belum dapat membaca dan menulis. Keseriusan Pemerintah juga terlihat dengan dikeluarkannya Inpres RI No. 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Tahun 2015, besaran angka melek huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun ke atas di Banten sebesar 96,10 persen dengan kata lain, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas 96 orang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelamin terdapat perbedaan. AMH Laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, yaitu 97,70 persen laki-laki dan 94,44 persen perempuan. Sedangkan jika dilihat dari daerah tempat tinggal, angka melek huruf (AMH) penduduk

perkotaan lebih tinggi (97,00 persen) dibandingkan dengan AMH perdesaan sebesar 94,07 persen.

Terdapat disparitas yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dengan rasio sebesar 96,66 persen. Angka melek huruf merupakan produk pembangunan pendidikan di masa lalu. Banyak orang tua yang buta huruf. Banyak orang tua yang buta huruf karena mereka tidak pernah mengenyam pendidikan baik pendidikan formal maupun informal.

Tabel 7.3 Jumlah dan Angka Melek Huruf Penduduk Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi di Banten, 2015

Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah	Jumlah Penduduk 10 tahun ke atas	Angka Melek Huruf	Rasio
(1)	(2)	(3)	
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	4.879.107	97,70	96,99
Perempuan	4.691.327	94,44	
Laki-laki + perempuan	9.570.434	96,10	
<b>Klasifikasi Daerah</b>			
Perkotaan	6.441.873	97,00	96,98
Perdesaan	2.755.629	94,07	
Perkotaan + perdesaan	9.197.502	96,10	

Sumber : SUPAS 2015

Angka melek huruf di masing-masing kabupaten/kota telah melebihi 90 persen dengan variasi yang tidak terlalu besar. Capaian AMH terbesar terjadi di Kota Tangerang Selatan (98,24 persen) dan yang terendah terjadi di Kota Serang (94,20 persen).

Tabel 7.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Banten, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio AMH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pandeglang	97,11	94,31	95,74	97,12
Lebak	96,34	92,31	94,38	95,82
Tangerang	97,54	94,31	95,97	96,69
Serang	96,84	92,40	94,65	95,41
Kota Tangerang	98,77	96,10	97,46	97,30
Kota Cilegon	98,06	95,02	96,58	96,90
Kota Serang	97,12	91,13	94,20	93,83
Kota Tangerang Selatan	99,12	97,34	98,24	98,20
Banten	97,70	94,44	96,10	96,66

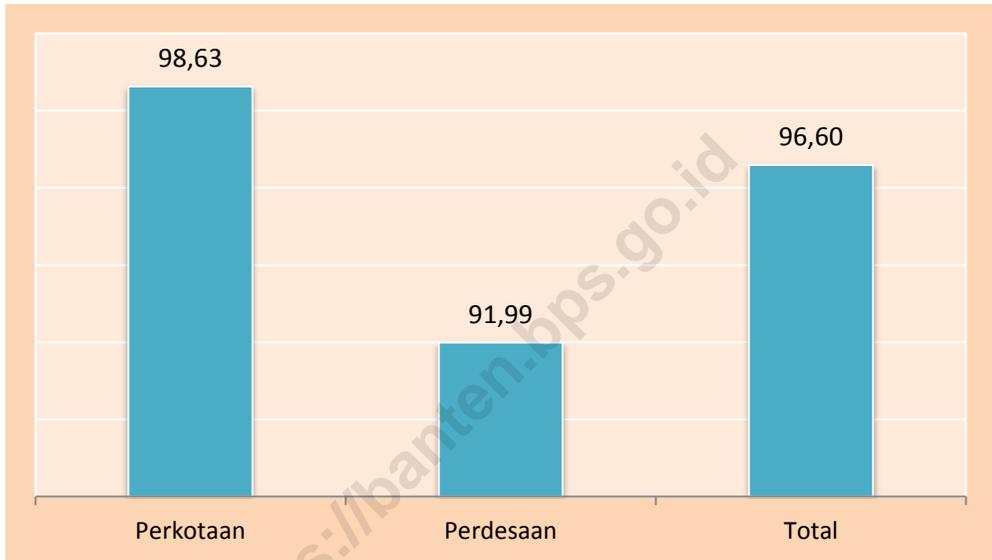
Sumber : SUPAS 2015

### 7.3 Kemampuan Berbahasa Indonesia

Bahasa tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, muncul dalam setiap komunikasi manusia. Fungsi bahasa secara umum yaitu alat interaksi sosial, sebagai alat untuk menyampaikan ide, konsep atau perasaan. Selain digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antar sesama, bahasa juga memiliki fungsi sosial dan budaya, seperti untuk menandakan identitas suatu kelompok, stratifikasi sosial dan hiburan. Berbahasa merupakan suatu kegiatan dalam proses untuk memahami dan mengerti.

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi masyarakat Indonesia dan merupakan bahasa nasional, sebagai identitas Bangsa Indonesia. Saat ini

Bahasa Indonesia tidak hanya dipelajari oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi orang asing juga banyak yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Pada umumnya, kemampuan berbahasa Indonesia meliputi 4 (empat) kemampuan, yaitu kemampuan berbicara, menyimak, membaca dan menulis (Tarigan, 1986).



Sumber : SUPAS 2015

Gambar 7.1 Kemampuan berbahasa Indonesia Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas di Banten, 2015

Hasil SUPAS 2015, 96,60 persen penduduk Banten usia di atas 10 tahun memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, tidak ada perbedaan yang signifikan kemampuan berbahasa Indonesia baik laki-laki maupun yang perempuan. Kemampuan berbahasa penduduk yang di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang di daerah perdesaan. 98,63 persen penduduk perkotaan usia 10 tahun ke atas memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, sedangkan penduduk perdesaan 91,99 persen yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

Disparitas persentase penduduk yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia antar kabupaten/kota di Banten tidak terlalu besar. Persentase terbesar penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia di Kota Tangerang Selatan (99,74 persen), sementara itu untuk yang terendah di Kabupaten Lebak (89,67 persen). Hampir seluruh penduduk di Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, ini mengingat letak geografis wilayah ini yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta, sementara Kabupaten Lebak merupakan daerah perdesaan yang cukup jauh dari daerah perkotaan.

Tabel 7.5 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Memiliki Kemampuan Berbahasa Indonesia Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal di Banten, 2015

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pandeglang	96,36	90,45	92,11
Lebak	97,29	88,43	89,67
Tangerang	98,11	97,03	97,92
Serang	96,95	94,01	94,94
Kota Tangerang	99,63	-	99,63
Kota Cilegon	97,87	-	97,87
Kota Serang	97,95	93,21	96,76
Kota Tangerang Selatan	99,74	-	99,74
Banten	98,63	91,99	96,60

Sumber : SUPAS 2015

## 7.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas SDM-nya. Kualitas SDM merupakan modal dalam menghadapi persaingan global.

Tahun 2015, hampir 50 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Banten telah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun. Penduduk dengan pendidikan tertinggi SD/MI/ sederajat sebesar 24,91 persen dan SMP/MTs/ sederajat sebesar 23,26 persen. Sementara itu masih terdapat penduduk yang belum menamatkan sekolah dasar sebesar 9,53 persen, bahkan tidak/belum sekolah sebesar 4,33 persen.

Tabel 7.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Banten, 2015

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk			Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk/belum prnh sekolah	124.530	243.036	367.566	2,88	5,83	4,33
Tidak punya ijazah SD	358.443	450.188	808.631	8,30	10,81	9,53
SD/MI/ sederajat	1.023.442	1.090.124	2.113.566	23,70	26,16	24,91
SMP/MTs/ se derajat	976.154	997.615	1.973.769	22,61	23,94	23,26
SMA/MA/S MK/	1.468.401	1.065.482	2.533.883	34,01	25,57	29,86

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk			Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
sederajat						
Perguruan Tinggi	367.173	319.992	687.165	8.50	7.68	8.10
Jumlah	4.318.143	4.166.437	8.484.580	100,00	100,00	100,00

Sumber : SUPAS 2015

Disparitas gender sangat terlihat di bidang pendidikan, penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan menengah ke atas sebesar 42,51 persen , sedangkan perempuan hanya sebesar 33,55 persen saja. Demikian juga untuk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak menamatkan SD, laki-laki sebanyak 11,18 persen sedangkan perempuan sebanyak 16,64 persen (Tabel 4.1).

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, 48,43 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di perkotaan telah menamatkan pendidikan menengah ke atas, sedangkan yang di perdesaan hanya sebesar 13,72 persen. Demikian sebaliknya, untuk penduduk yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum menamatkan SD di perdesaan sebesar 21,76 persen sedangkan yang di perkotaan hanya sebesar 10,45 persen saja. Seperti yang telah disinggung di bagian terdahulu bahwa adanya ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan disebabkan oleh ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan penduduk.

Tabel 7.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Daerah Tepat Tinggal dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Banten, 2015

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk 15 th+			Persentase		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/belum pernah sekolah	185.569	181.997	367.566	3,13	7,11	4,33
Tidak punya ijazah SD	433.831	374.800	808.631	7,32	14,65	9,53
SD/MI/ sederajat	1.086.275	1.027.291	2.113.566	18,33	40,14	24,91
SMP/MTs/ sederajat	1.349.910	623.859	1.973.769	22,78	24,38	23,26
SMA/MA/ MK/ sederajat	2.235.334	298.549	2.533.883	37,72	11,67	29,86
Perguruan Tinggi	634.677	52.488	687.165	10,71	2,05	8,10
Jumlah	5.925.596	2.558.984	8.484.580	100,00	100,00	100,00

Sumber : SUPAS 2015

Persentase terbesar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan menengah ke atas terjadi di Kota Tangerang (56,79 persen), terbesar kedua adalah Kota Tangerang Selatan (62,84 persen). Kedua kota ini merupakan daerah perkotaan penyangga ibu kota Jakarta dengan tingkat persaingan kualitas SDM yang sangat ketat, sehingga tingkatan pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan.

Tabel 7.8 Jumlah dan Persentase Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Banten, 2015

Kabupaten/ Kota	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan					
	Tdk/ belum Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/MI/ Sederajat	SMP/ MTs/Seder ajat	SMA/ SMK/ MA/sedera jat	Perguruan tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandelang	33.651 (4,17)	114.289 (14,16)	321.878 (39,88)	210.217 (26,05)	99.168 (12,29)	27.867 (3,45)
Lebak	78.031 (8,89)	109.295 12,46	394.227 (44,93)	176.222 (20,09)	93.510 (10,66)	26.064 (2,97)
Tangerang	107.340 (4,51)	193.519 (8,13)	577.256 (24,24)	635.738 (26,70)	748.759 (31,44)	118.720 (4,99)
Serang	57.225 (5,53)	152.749 (14,75)	303.889 (29,35)	276.316 (26,69)	206.840 (19,98)	38.226 (3,69)
Kota Tangerang	32.461 (2,15)	103.887 (6,90)	212.034 (14,07)	302.779 (20,10)	671.609 (44,58)	183.901 (12,21)
Kota Cilegon	10.735 (3,67)	25.111 (8,60)	55.327 (18,94)	68.408 (23,42)	106.504 (36,46)	26.032 (8,91)
Kota Serang	23.715 (5,34)	52.679 (11,87)	118.363 (26,66)	92.230 (20,78)	118.748 (26,75)	38.185 (8,60)
Kota Tangsel	24.408 (2,14)	57.102 (5,01)	130.592 (11,45)	211.859 (18,57)	488.745 (42,84)	228.170 (20,00)
Jumlah	367.566 (4,33)	808.631 (9,53)	2.113.566 (24,91)	1.973.769 (23,26)	2.533.883 (29,86)	687.165 (9,10)

Sumber : SUPAS 2015



## 8.1 Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Banten

### 8.1.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

Distribusi penduduk bekerja menurut kelompok umur menunjukkan pola huruf "U" terbalik, kecil pada usia muda kemudian meningkat pada usia dewasa dan kembali mengecil pada usia tua. Penduduk bekerja pada kelompok usia muda, khususnya pada kelompok umur 15-19 tahun cenderung rendah. Penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun sebagian besar masih bersekolah dan dianggap belum cukup umur untuk bekerja. Jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan cukup besar dari kelompok umur 15-19 tahun ke kelompok umur 20-24 tahun. Penduduk bekerja paling banyak adalah mereka yang berusia 25-29 tahun. Pada kelompok umur 25-29 tahun penduduk bekerja di Provinsi Banten mencapai sebanyak 726 ribu jiwa. Jumlah penduduk bekerja semakin sedikit pada kelompok umur yang lebih tinggi. Semakin bertambahnya umur, produktivitas penduduk semakin menurun sehingga penduduk bekerja pada kelompok umur tua cenderung rendah.

Tabel 8.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur di Provinsi Banten, 2015

Kelompok Umur	perkotaan	perdesaan	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-19	126.350	61.042	105.032	82.360	187.392
20-24	483.647	145.901	392.016	237.532	629.548

Kelompok Umur	perkotaan	perdesaan	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25-29	536.852	190.051	506.875	220.028	726.903
30-34	513.735	203.581	512.095	205.221	717.316
35-39	508.329	171.378	484.119	195.588	679.707
40-44	415.693	161.053	430.748	145.998	576.746
45-49	335.260	146.812	360.176	121.896	482.072
50-54	225.857	109.104	257.102	77.859	334.961
55-59	154.235	83.526	183.849	53.912	237.761
60-64	73.518	50.432	95.530	28.420	123.950
65+	49.557	52.345	75.975	25.927	101.902
Total	3.423.033	1.375.225	3.403.517	1.394.741	4.798.258

Sumber: Supas 2015

### 8.1.2 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan

Penduduk bekerja di Provinsi Banten sebagian besar masih berpendidikan rendah. Persentase terbesar penduduk bekerja di Banten adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 34,20 persen dari total penduduk bekerja atau sebanyak 1,64 juta jiwa. Persentase penduduk bekerja terbesar berikutnya ialah mereka yang berpendidikan SMA sederajat. Kondisi ini berlaku pada penduduk bekerja laki-laki maupun penduduk bekerja perempuan. Penduduk bekerja di perkotaan sebagian besar berpendidikan SMA sederajat, sedangkan penduduk bekerja di perdesaan sebagian besar berpendidikan SD ke bawah. Dapat dilihat bahwa kualitas tenaga kerja di perdesaan masih sangat rendah jika dibanding di perkotaan. Tingginya jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan rendah dimungkinkan karena penduduk dengan pendidikan rendah siap menerima

pekerjaan apapun tanpa kualifikasi khusus. Sedangkan penduduk dengan pendidikan tinggi cenderung untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

Tabel 8.2 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Terakhir di Provinsi Banten, 2015

Pendidikan Terakhir	perkotaan	Perdesaan	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<=SD	800.738	840.189	1.170.475	470.452	1.640.927
SMP/MTS/ sederajat	646.148	303.951	677.869	272.230	950.099
SMA/MA/ sederajat	1.164.664	168.212	988.770	344.106	1.332.876
SMK	297.273	16.932	233.488	80.717	314.205
Diploma I/II/III	126.101	7.491	72.588	61.004	133.592
Universitas	388.109	38.450	260.327	166.232	426.559
<b>Total</b>	<b>3.423.033</b>	<b>1.375.225</b>	<b>3.403.517</b>	<b>1.394.741</b>	<b>4.798.258</b>

Sumber: Supas 2015

### 8.1.3 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 9 kategori lapangan usaha seperti terlihat pada tabel 8.1.4. Di Provinsi Banten, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor industri. Penduduk yang bekerja pada sektor industri mencapai 1,07 juta jiwa atau sebesar 22,39 persen dari total penduduk bekerja. Penduduk bekerja di perkotaan paling banyak bekerja pada sektor industri, sedangkan penduduk bekerja di perdesaan paling banyak bekerja pada sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja dimana industri lebih banyak terdapat di perkotaan sementara lahan pertanian lebih banyak terdapat di

perdesaan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki paling banyak bekerja pada sektor industri (721 ribu jiwa) sementara pekerja perempuan paling banyak bekerja pada sektor jasa (365 ribu jiwa).

Tabel 8.3 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Banten, 2015

Lapangan Usaha	perkotaan	perdesaan	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	160.018	601.373	572.919	188.472	761.391
2	17.720	26.221	40.066	3.875	43.941
3	875.246	199.275	721.457	353.064	1.074.521
4	73.532	17.668	76.173	15.027	91.200
5	151.720	81.452	228.896	4.276	233.172
6	690.709	162.952	535.811	317.850	853.661
7	261.105	84.906	315.704	30.307	346.011
8	385.475	43.010	312.429	116.056	428.485
9	807.508	158.368	600.062	365.814	965.876
Total	3.423.033	1.375.225	3.403.517	1.394.741	4.798.258

Sumber: Supas 2015

Keterangan :

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri
4. Listrik, Gas dan Air Minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
8. Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

#### 8.1.4 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

Sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Banten adalah buruh/karyawan. Sebanyak 59,81 persen penduduk bekerja adalah buruh/karyawan. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun perdesaan, persentase terbanyak ialah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan antara persentase penduduk perkotaan dan perdesaan yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Sebanyak 68,90 persen penduduk perkotaan bekerja sebagai buruh/karyawan sementara penduduk perdesaan yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 37,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di perkotaan lebih banyak lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja untuk buruh/karyawan. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, yang paling mencolok ialah pekerja keluarga dimana pekerja keluarga perempuan mencapai 157 ribu jiwa (11,26 persen) sementara pekerja keluarga laki-laki hanya 75 ribu jiwa (2,23 persen). Keadaan ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja hanya untuk membantu pasangan/orang tua/saudara yang menghasilkan pendapatan.

Tabel 8.4 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Banten, 2015

Status Pekerjaan	perkotaan	perdesaan	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
berusaha sendiri	591.964	338.975	698.805	232.134	930.939
berusaha dibantu buruh tdk tetap/buruh tdk dibayar	74.937	134.509	148.067	61.379	209.446
berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	106.043	49.823	123.002	32.864	155.866
buruh/karyawan/pegawai	2.358.424	511.446	2.029.838	840.032	2.869.870

Status Pekerjaan	perkotaan	perdesaan	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
pekerja bebas pertanian	58.733	131.600	155.798	34.535	190.333
pekerja bebas non pertanian	139.348	69.436	172.046	36.738	208.784
Pekerja keluarga/tdk dibayar	93.584	139.436	75.961	157.059	233.020
Total	3.423.033	1.375.225	3.403.517	1.394.741	4.798.258

Sumber: Supas 2015

### 8.1.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja

Penduduk yang bekerja penuh di Provinsi Banten sebanyak 4,11 juta jiwa atau sebesar 85,58 persen dari total penduduk bekerja. Persentase penduduk yang bekerja penuh di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan yang di perdesaan. Sekitar 3,07 juta penduduk bekerja (89,67 persen) di daerah perkotaan adalah pekerja penuh. Sementara itu di daerah perdesaan, pekerja penuh hanya sekitar 1,04 juta jiwa atau 75,40 persen. Di perdesaan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dimana pada umumnya petani bekerja hanya setengah hari. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang bekerja penuh sebanyak 3,02 juta jiwa (88,65 persen) sedangkan penduduk perempuan yang bekerja penuh sekitar 1,09 juta jiwa (78,09 persen). Lebih rendahnya persentase penduduk perempuan yang bekerja penuh disebabkan sebagian dari mereka bekerja untuk membantu orang lain memperoleh penghasilan, seperti ibu rumah tangga yang membantu suaminya dalam memperoleh penghasilan. Seperti yang telah disinggung di depan bahwa cukup banyak perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga.

Tabel 8.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja di Provinsi Banten, 2015

Jam Kerja	perkotaan	perdesaan	laki-laki	perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-7	17.665	7.278	13.776	11.167	24.943
8-14	49.310	34.403	42.457	41.256	83.713
15-24	120.307	121.362	114.081	127.588	241.669
25-34	166.282	175.226	215.995	125.513	341.508
0 dan 35+	3.069.469	1.036.956	3.017.208	1.089.217	4.106.425
Total	3.423.033	1.375.225	3.403.517	1.394.741	4.798.258

Sumber: Supas 2015

## 8.2 Disparitas Antar Wilayah

### 8.2.1 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Karakteristik wilayah mempengaruhi lapangan usaha yang banyak digeluti oleh penduduknya. Kabupaten Pandeglang dan Lebak merupakan salah satu sentra pertanian di Provinsi Banten, sehingga tidak mengherankan apabila lebih dari 50 persen penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian. Sedangkan di Tangerang baik itu kabupaten maupun kota merupakan kawasan industri sekaligus kawasan bisnis di Provinsi Banten. Di kedua wilayah tersebut sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak. Kawasan industri lainnya adalah Kabupaten Serang, di Kabupaten ini sektor industri menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sekitar 26,43 persen tenaga kerja bekerja di sektor industri. Namun selain terkenal dengan kawasan industri, sebagian besar daerah di Kabupaten Serang adalah perdesaan dan lapangan usaha lainnya yang menjadi tumpuan penduduk adalah sektor pertanian. Kota

Tangerang Selatan adalah kawasan bisnis lainnya di Provinsi Banten. Di wilayah ini sebagian besar orang yang bekerja berada di sektor jasa, sektor perdagangan, dan sektor lembaga keuangan.

Tabel 8.6 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pandeglang	236.543	3.204	9.212	3.006	11.648	46.559	24.811	9.119	75.844	419.946
Lebak	250.266	20.433	25.070	4.575	28.114	58.227	29.384	16.301	57.802	490.172
Tangerang	111.765	7.637	554.039	35.891	51.893	200.571	87.589	111.600	228.825	1.389.810
Serang	120.758	2.601	139.788	6.275	48.144	82.005	37.422	21.870	70.078	528.941
Kota Tangerang	7.065	3.927	222.934	18.883	26.734	191.767	70.128	111.416	242.508	895.362
Kota Cilegon	9.491	2.137	28.842	3.286	15.140	29.794	8.028	26.182	27.745	150.645
Kota Serang	19.149	1.516	46.095	5.652	14.779	84.533	18.086	6.976	57.872	254.658
Kota Tangsel	6.354	2.486	48.541	13.632	36.720	160.205	70.563	125.021	205.202	668.724
<b>Total</b>	<b>761.391</b>	<b>43.941</b>	<b>1.074.521</b>	<b>91.200</b>	<b>233.172</b>	<b>853.661</b>	<b>346.011</b>	<b>428.485</b>	<b>965.876</b>	<b>4.798.258</b>

Sumber: Supas 2015

Keterangan :

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri
4. Listrik, Gas dan Air Minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
8. Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

### 8.2.2 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

Sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Banten berstatus buruh/karyawan/pegawai. Kondisi ini juga terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota. Sebagian besar penduduk bekerja di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten selain Kabupaten Pandeglang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Persentase terbesar pekerja berstatus

buruh berada di Kota Tangerang Selatan. Sebesar 75,63 persen penduduk bekerja di Kota Tangerang Selatan adalah buruh. Pada umumnya, di perkotaan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja buruh. Sementara di Kabupaten Pandeglang, sebagian besar pekerjaannya berstatus berusaha sendiri. Sebesar 29,16 persen penduduk bekerja di Kabupaten Pandeglang berstatus berusaha sendiri. Jika dikaitkan dengan lapangan usahanya, penduduk bekerja di Kabupaten Pandeglang sebagian besar adalah petani yang menggarap sendiri lahan pertaniannya.

Tabel 8.7 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/ Kota	1	2	3	4	5	6	7	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pandeglang	122.460	52.526	17.121	103.067	61.813	14.238	48.721	419.946
Lebak	121.006	65.778	19.853	156.113	27.256	26.337	73.829	490.172
Tangerang	238.816	25.047	38.661	940.617	53.056	50.736	42.877	1.389.810
Serang	129.170	24.036	14.139	274.088	36.606	32.803	18.099	528.941
Kota Tangerang	143.342	9.720	17.154	655.699	2.885	47.621	18.941	895.362
Kota Cilegon	21.770	6.594	11.020	93.121	2.810	10.649	4.681	150.645
Kota Serang	50.932	18.296	12.803	141.416	4.041	12.880	14.290	254.658
Kota Tangsel	103.443	7.449	25.115	505.749	1.866	13.520	11.582	668.724
Total	930.939	209.446	155.866	2.869.870	190.333	208.784	233.020	4.798.258

Sumber: Supas 2015

Keterangan:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tdk tetap/buruh tdk dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas pertanian
6. Pekerja bebas non pertanian
7. Pekerja keluarga/tdk dibayar



## PERUMAHAN



Perumahan atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan perumahan juga akan meningkat setiap tahun. Pemerintah sadar betul dan dengan berbagai upaya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar ini. Namun sayangnya usaha ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Ketidakmaksimalan ini tercermin dari jumlah pemenuhan kebutuhan perumahan yang tak terpenuhi (housing backlog) yang terus bertambah hingga mencapai 13,6 juta unit dan jumlah pemukiman kumuh yang terus meningkat mencapai 59.000 hektar (BPS 2010 dan Kemenpera). Untuk menangani ini, pemerintah Jokowi-JK sudah meluncurkan program unggulan berupa pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Menurut Undang-undang nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.

Rumah merupakan cerminan tingkat kesejahteraan pemiliknya.. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Secara umum rumah dapat dikatakan layak huni apabila memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Selain itu, rumah layak

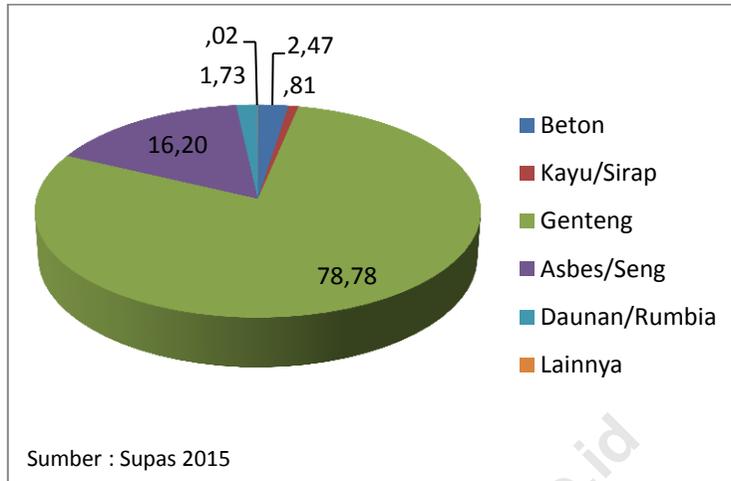
huni juga ditentukan oleh fasilitas penerangan, air minum, dan tempat pembuangan akhir kotoran/tinja.

## 9.1 Keadaan Perumahan

Keadaan perumahan yang baik ditentukan oleh kualitas fisik perumahan dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai, sehingga akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Rumah yang ditempati oleh masyarakat seharusnya memenuhi syarat sebuah rumah layak huni. Rumah layak huni memiliki atap selain daunan/rumbia, dinding bukan bambu dan lantai terluasnya bukan tanah dengan luas lantai perkapita minimal 10 meter persegi. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan perumahan maka wajib tersedia penerangan listrik, air minum bersih dan sehat (tidak berbau, berasa dan berwarna) dan tempat pembuangan akhir kotoran di tangki septik.

### 9.1.1 Kualitas Fisik Rumah Sisi Material

Indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Hasil Supas 2015 menunjukkan bahwa sekitar 2.877.467 rumah tangga (96,26 persen) di Provinsi Banten tinggal di rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis atap yang tergolong tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu atap berupa daunan/rumbia dan lainnya sebesar 51.011 rumah tangga (1,74 persen). Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang menggunakan atap daunan/rumbia terbesar dibanding daerah lainnya. Faktor kemiskinan menjadi pengaruh utama masih banyaknya penggunaan daunan/rumbia sebagai atap rumah.



Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Banten, 2015

Penggunaan dinding dapat dikatakan memenuhi syarat rumah layak huni jika dinding tersebut tidak lembab dan tidak tembus angin. Jenis dinding yang memenuhi syarat rumah layak huni adalah tembok (BPS Provinsi Banten, 2016). Rumah tangga yang menggunakan dinding tembok di Provinsi Banten pada tahun 2015 sebesar 2.519.512 (86,03 persen). Sedangkan rumah tangga yang menggunakan dinding kayu sebesar 66.951 rumah tangga (2,29 persen). Penggunaan dinding selain tembok dan kayu oleh rumah tangga di Provinsi Banten yaitu berupa bambu masih mencapai 338.070 rumah tangga (11,54 persen) dan dinding lainnya sebesar 3.945 rumah tangga (0,13 persen).

Tabel 9.1 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/kota	Jenis Dinding Terluas			
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab Pandeglang	165.843	10.306	115.274	900
Kab Lebak	187.200	15.959	117.894	1.659
Kab Tangerang	729.079	17.842	67.819	551
Kab Serang	293.785	8.102	29.151	0
Kota Tangerang	524.326	6.908	4.723	321
Kota Cilegon	94.733	1.672	319	272
Kota Serang	136.833	2.843	1.090	0
Kota Tangerang Selatan	387.713	3.319	1.800	242
<b>Banten</b>	<b>2.519.512</b>	<b>66.951</b>	<b>338.070</b>	<b>3.945</b>

Sumber : Supas 2015

Kabupaten Lebak merupakan kabupaten dengan rumah tangga pengguna dinding bambu terbesar yaitu sekitar 117.894 rumah tangga. Terbesar kedua adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 115.274 rumah tangga. Dinding bambu merupakan salah satu kriteria yang masuk dalam dinding tidak layak. Penggunaan atap dan dinding yang tidak layak di dua kabupaten tersebut memicu terdapatnya rumah tidak layak huni yang cukup tinggi. Berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal kedua kabupaten memiliki persentase status tempat tinggal milik sendiri terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang memiliki rumah sendiri namun tidak layak huni. Untuk mengatasi hal ini pemerintah perlu menganggarkan sejumlah dana untuk program bedah rumah yang tidak layak huni.

Tabel 9.2 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Kabupaten/kota	Jenis Dinding Terluas	
	Tanah	Bukan Tanah
(1)	(2)	(3)
Kab Pandeglang	26.564	265.759
Kab Lebak	9.272	313.440
Kab Tangerang	51.440	763.851
Kab Serang	23.716	307.322
Kota Tangerang	5.237	531.041
Kota Cilegon	1.651	95.345
Kota Serang	4.082	136.684
Kota Tangerang Selatan	967	392.107
<b>Banten</b>	<b>122.929</b>	<b>2.805.549</b>

Sumber : Supas 2015

Selain atap dan dinding rumah, lantai juga menjadi indikator rumah layak huni. Rumah tangga di Provinsi Banten yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai tanah pada tahun 2015 sebesar 122.929 rumah tangga. Artinya masih ada 4,20 persen rumah yang berlantai tanah. Apabila dibandingkan menurut kabupaten/kota, Kabupaten Pandeglang kembali memimpin persentase terbesar rumah yang berlantai tanah yaitu sebesar 26.564 rumah tangga (9,09 persen). Kemudian disusul oleh Kabupaten Serang dengan jumlah rumah yang berlantai tanah sebesar 23.716 rumah tangga (7,16 persen). Kemiskinan dan budaya masih menjadi faktor penyebab masyarakat masih menggunakan lantai tanah. Masyarakat masih mempertahankan rumah adat dan rumah warisan orang tua yang masih berlantai tanah.

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk memastikan kondisi rumah layak huni adalah luas lantai per kapita. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah

tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan dari hasil kajian pemerintah, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Sedangkan menurut American Public Health Association yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 m<sup>2</sup> (BPS, 2012). Berdasarkan data Supas 2015 rumah tangga dengan luas lantai perkapita minimal 10 m<sup>2</sup> sebanyak 2.326.747 rumah tangga (79,45 persen). Artinya masih ada 20,55 Persen rumah tangga atau sekitar 601.731 rumah tangga yang menempati rumah dengan luas perkapita yang tidak sesuai standar atau tidak ideal.

Tabel 9.3 Rumah Tangga Berdasarkan Luas Lantai Perkapita Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

	Luas Lantai Perkapita	
	<10	>=10
(1)	(2)	(3)
Kab Pandeglang	67.156	225.167
Kab Lebak	82.228	240.484
Kab Tangerang	164.487	650.804
Kab Serang	72.831	258.207
Kota Tangerang	147.679	388.599
Kota Cilegon	4.710	92.286
Kota Serang	18.580	122.186
Kota Tangerang Selatan	44.060	349.014
Banten	601.731	2.326.747

Sumber : Supas 2015

### 9.1.2 Fasilitas Rumah

Pemenuhan fasilitas perumahan diantaranya berupa fasilitas penerangan, air minum, tempat pembuangan akhir kotoran/tinja dan bahan bakar yang digunakan. Rumah yang sehat dan nyaman tentunya memiliki

fasilitas yang lengkap dan memadai. Fasilitas penerangan berupa listrik harus sudah tersedia. Selain itu keberadaan air bersih baik untuk minum, memasak, mandi dan kebutuhan lainnya juga harus terpenuhi. Keberadaan jamban dan pembuangan akhir tinja harus memenuhi kriteria rumah sehat.

Tabel 9.4 Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Menurut Tipe Daerah, Provinsi Banten, 2015

(1)	Sumber Penerangan			
	Listrik PLN Meteran (2)	Listrik PLN Tanpa Meteran (3)	Listrik Non PLN (4)	Bukan Listrik (5)
<b>Perkotaan</b>	1.891.548	138.425	10.677	2.136
<b>Perdesaan</b>	744.905	133.303	2.561	4.923
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>	2.636.453	271.728	13.238	7.059

Sumber : Supas 2015

Hasil Supas 2015 menunjukkan rumah tangga di Provinsi Banten yang telah menggunakan listrik mencapai 2.921.419 rumah tangga (99,76 persen). Penggunaan listrik termasuk mereka yang menggunakan listrik PLN baik dengan meteran dan tanpa meteran serta listrik dari non-PLN. Sebesar 7.059 rumah tangga (0,24 persen) masih menggunakan sumber penerangan bukan listrik seperti petromak/lampu tekan, aladin, lampu teplok, sentir, pelita, lampu karbit, lilin, biji jarak, dan lainnya.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air minum yang bersih dan mencukupi merupakan syarat untuk dapat hidup sehat. Rumah tangga yang menggunakan air minum isi ulang di Provinsi Banten sebanyak 720.780 rumah tangga (31,14 persen). Sumber air minum terbesar kedua yang digunakan rumah tangga adalah pompa yaitu sebanyak 429.701 rumah tangga (18,97 persen). Terdapat perbedaan yang nyata antara wilayah pedesaan dan perkotaan dalam penggunaan sumber air minum. Di daerah perkotaan sumber air minum terbesar adalah air isi ulang sedangkan di pedesaan sumber air minum terbesar adalah sumur

terlindung. Penggunaan air isi ulang ini dirasa lebih praktis oleh masyarakat perkotaan, karena tidak perlu repot merebus air dan banyak menghabiskan bahan bakar. Selain itu banyak tempat pengisian air minum isi ulang dengan biaya terjangkau. Sedangkan masyarakat pedesaan lebih memilih merebus sendiri air minum dari sumur terlindung.

Tabel 9.5 Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Air Minum Menurut Tipe Daerah, Provinsi Banten, 2015

Sumber Air Minum	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan	523.545	14.997	538.542
Air Isi Ulang	720.780	191.137	911.917
Leding Sampai Rumah	62.143	17.711	79.854
Leding Eceran	44.790	10.064	54.854
Pompa	429.701	125.821	555.522
Sumur Terlindung	209.230	238.969	448.199
Sumur Tak Terlindung	22.359	121.297	143.656
Mata Air Terlindung	18.029	60.572	78.601
Mata Air Tak Terlindung	7.904	64.613	72.517
Air Sungai	1.115	31.866	32.981
Air Hujan	2.591	8.309	10.900
<b>Lainnya</b>	599	336	935

Sumber : Supas 2015

Salah satu fasilitas penting lainnya dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Berdasarkan hasil Supas 2015, sebanyak 2.279.071 rumah tangga (77,82 persen) telah menggunakan jamban sendiri. Sedangkan yang menggunakan jamban bersama dan jamban umum sebanyak 213.780 rumah tangga (7,30 persen). Dan ternyata masih ada 435.627 rumah tangga (14,88 persen) yang tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

Kabupaten Lebak merupakan kabupaten dengan persentase tidak mempunyai fasilitas buang air besar tertinggi yaitu sebesar 38,44 persen dengan jumlah rumah tangga 124.054. Kabupaten Pandeglang menyusul di urutan kedua dengan persentase yang tidak memiliki fasilitas buang air besar sebesar 33,25 persen dengan jumlah rumah tangga 97.184. Urutan ketiga adalah Kabupaten Serang dengan persentase sebesar 31,74 persen dengan jumlah rumah tangga 105.065. Menanggapi situasi ini pemerintah Provinsi Banten harus serius dalam mengusahakan jamban yang layak bagi rumah tangga di ketiga kabupaten tersebut. Mengingat lebih dari seperempat rumah tangga di ketiga kabupaten tersebut yang tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

Keberadaan sanitasi yang layak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Namun, akses terhadap sanitasi layak bukan hanya ditentukan oleh tingkat kesejahteraan rumah tangga, namun sering pula dipengaruhi oleh faktor budaya/kebiasaan. Masyarakat perdesaan lebih memilih sungai atau kebun sebagai tempat buang air besarnya karena faktor kebiasaan dan budaya. Padahal hal ini sangat tidak mendukung kampanye hidup bersih yang digalakan pemerintah.

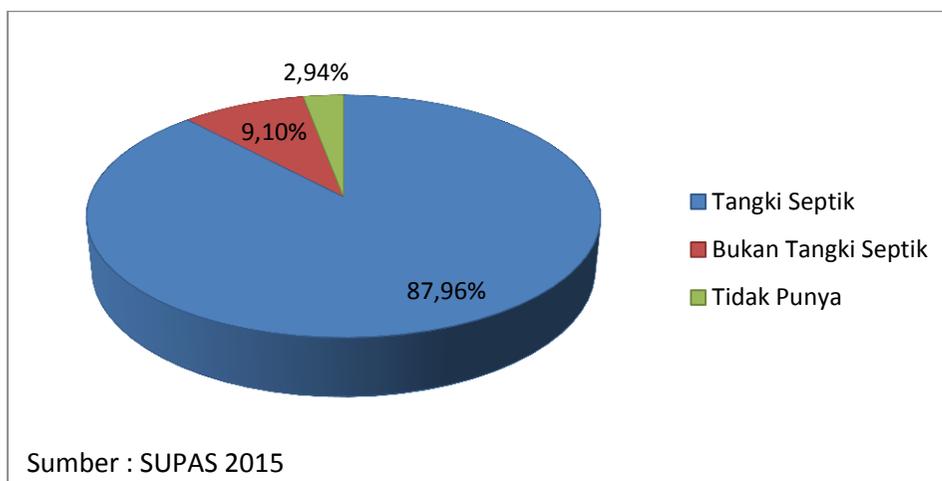
Tabel 9.6 Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

Kab/Kota	Fasilitas Buang Air Besar			
	Jamban sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kab Pandeglang</b>	174.540	11.525	9.074	97.184
<b>Kab Lebak</b>	179.695	13.102	5.861	124.054
<b>Kab Tangerang</b>	650.018	59.188	24.594	81.491
<b>Kab Serang</b>	210.538	11.914	3.521	105.065
<b>Kota Tangerang</b>	476.528	54.127	1.488	4.135
<b>Kota Cilegon</b>	89.836	2.034	1.378	3.748
<b>Kota Serang</b>	116.309	2.991	1.516	19.950

Kab/Kota	Fasilitas Buang Air Besar			
	Jamban sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	381.607	11.169	298	0
Banten	2.279.071	166.050	47.730	435.627

Sumber : Supas 2015

Tempat penampungan kotoran/tinja juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Tempat penampungan berupa lobang tanah atau tanah terbuka dapat mencemarkan sumber air di dekatnya dan dapat menimbulkan bau yang kurang sedap di sekitarnya. Tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik. Menurut hasil Supas 2015, rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai pembuangan akhir tinja sebanyak 2.192.820 rumah tangga (87,96 persen). Sedangkan yang menggunakan bukan tangki septik sebesar 226.828 rumah tangga (9,10 persen) dan sebanyak 73.203 rumah tangga (2,94 persen) tidak mempunyai penampungan akhir tinja.



Gambar 9.2 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Provinsi Banten, 2015

Fasilitas lainnya berkaitan dengan pemanfaatan energi rumah tangga adalah penggunaan bahan bakar memasak. Sumber energi yang digunakan untuk memasak diantaranya listrik, gas, minyak tanah, briket/arang/batubara, kayu bakar dan lainnya. Penggunaan bahan bakar/energi utama memasak di Banten terbesar adalah gas yaitu sebanyak 2.212.080 rumah tangga (75,54 persen). Kayu bakar menempati urutan terbesar kedua dengan penggunaan sebanyak 576.202 rumah tangga (19,68 persen).

Kayu bakar merupakan jenis bahan bakar memasak yang paling murah, dan relatif mudah didapatkan karena banyak tersedia di alam. Namun, penggunaan bahan bakar kayu memberikan dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, polusi udara dan efek rumah kaca. Selain itu, penggunaan kayu bakar dalam jangka panjang dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya hutan.

Tabel 9.7 Penggunaan Bahan Bakar/ Energi Utama Memasak Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Banten, 2015

	Bahan Bakar/ Energi Utama Memasak						
	Listrik	Gas	Minyak Tanah	Arang/ Briket/ Batubara	Kayu Bakar	Tidak Pakai	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab Pandeglang	6.710	115.467	677	0	167.755	1.211	503
Kab Lebak	3.431	114.205	1.086	0	203.414	576	0
Kab Tangerang	8.877	720.066	6.207	394	63.871	15.452	424
Kab Serang	5.092	209.456	861	257	112.904	2.327	141
Kota Tangerang	44.601	471.533	2.535	1.590	4.202	11.817	0
Kota Cilegon	1.404	89.033	428	0	6.052	79	0
Kota Serang	1.814	120.169	1.525	235	15.936	1.087	0
Kota Tangsel	10.943	372.151	2.822	553	2.068	4.537	0
Banten	82.872	2.212.080	16.141	3.029	576.202	37.086	1.068

Sumber : Supas 2015

Penggunaan kayu bakar di Kabupaten Pandeglang dan Lebak tertinggi daripada bahan bakar yang lainnya. Hal ini diduga karena kayu

bakar lebih mudah didapatkan di kedua tempat tersebut. Sehingga lebih banyak menggunakan kayu bakar untuk memasak. Beberapa rumah tangga mempunyai gas elpiji namun tidak digunakan sebagai bahan bakar utama dalam memasak karena dirasa gas elpiji lebih mahal. Selain itu ada juga yang masih takut menggunakan gas elpiji dikarenakan takut meledak dan tidak tahu cara penggunaannya.

## 9.2 Pemenuhan Kebutuhan untuk Perumahan

Tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal berupa rumah. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah. Hal ini tentu saja akan berlawanan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah akan kesulitan untuk mempunyai rumah.

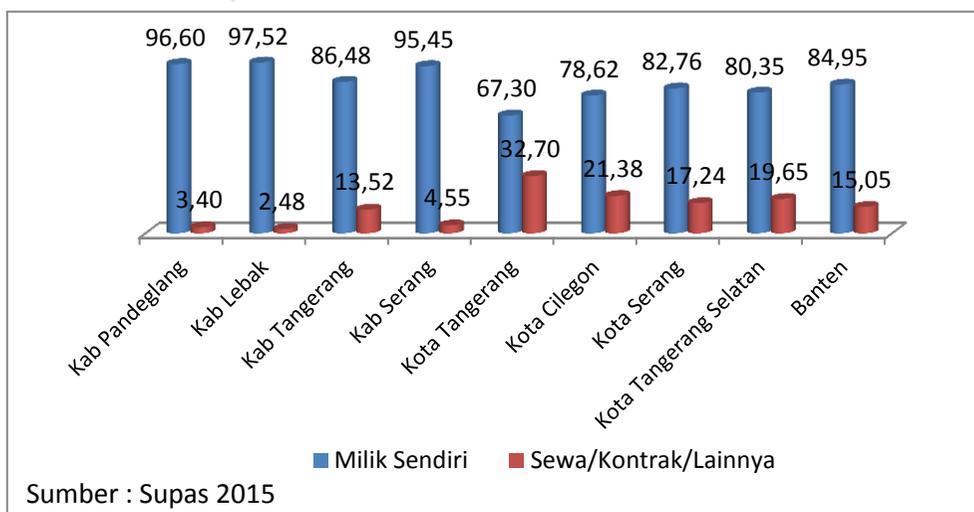
Pemerintah melalui program sejuta rumah sejak April 2015 memberikan bantuan rumah murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM). Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), non-MBR dan pegawai negeri sipil (PNS) dengan penghasilan maksimal 4 juta per bulan. Dengan adanya program sejuta rumah diharapkan semua lapisan masyarakat dapat memiliki rumah layak dan mengurangi pemukiman kumuh.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Supas 2015, persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri di Provinsi Banten sebesar 84,95 persen dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.487.623. Rumah tangga

yang status kepemilikan rumahnya sewa, kontrak dan lainnya sebesar 15,05 persen (440.855 rumah tangga). Apabila dibandingkan menurut wilayah terdapat perbedaan yang signifikan, 97,52 persen rumah tangga di perdesaan menempati rumah milik sendiri sedangkan yang di perkotaan hanya 79,49 persen. Karakteristik di perkotaan yakni banyak pendatang dan belum mampu memiliki rumah sendiri sehingga harus menyewa/mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Disamping itu, harga rumah di perkotaan juga relatif tinggi.

Kota Tangerang merupakan kota dengan status kepemilikan tempat tinggal milik sendiri terkecil 360.915 rumah tangga (67,30 persen). Sisanya sebanyak 175.363 rumah tangga (32,70 persen) memiliki status kepemilikan tempat tinggal sewa, kontrak dan lainnya. Telah disampaikan di Bab V bahwa Kota Tangerang merupakan salah satu wilayah yang banyak dihuni oleh kaum migran. Mereka belum mampu untuk mempunyai rumah sendiri karena tingginya harga rumah, sehingga rumah kontrakan menjadi pilihan. Pemerintah Provinsi Banten perlu membangun rumah susun (rusun) dalam rangka program sejuta rumah agar semua rumah tangga dapat memiliki rumah yang layak huni.



Gambar 9.3 Persentase Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal



## PERUBAHAN IKLIM



### 10.1 Pengetahuan tentang Perubahan Iklim

Perubahan iklim global (*global climate change*) pada dasarnya merupakan dampak dari pemanasan global (*global warming*) yaitu peningkatan suhu udara yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, CFC, HFC, N<sub>2</sub>O) di atmosfer. Efek rumah kaca sudah terjadi sejak Revolusi Industri pada abad 19, dimana banyak lahan hijau yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman penduduk. Radiasi sinar matahari dengan leluasa dipancarkan ke bumi dan terperangkap dalam rumah-rumah kaca. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi yang berakibat pada pemanasan global dan perubahan iklim. Fenomena ini memiliki dampak penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi.

Perubahan iklim global akan memberikan dampak yang sangat parah bagi Indonesia karena posisi geografis yang terletak di garis ekuator, antara dua benua dan dua samudera, merupakan negara kepulauan dengan 81.000 km garis pantai dan dua pertiga wilayah berupa lautan, serta populasi penduduk nomor empat terbesar di dunia. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut diantaranya adalah :

1. Meningkatnya frekuensi bencana alam akibat cuaca ekstrim (tanah longsor, banjir, kekeringan, badai tropis, dll.)
2. Mengancam ketersediaan air
3. Mengakibatkan pergeseran musim dan perubahan pola hujan
4. Menurunkan produktivitas pertanian
5. Meningkatkan temperatur akan mengakibatkan kebakaran hutan

6. Mengancam biodiversitas dan keanekaragaman hayati
  7. Menaikkan permukaan air laut yang menyebabkan banjir permanen dan kerusakan infrastruktur di daerah pantai
  8. Menimbulkan berbagai penyakit (Tifus, Malaria, Demam Berdarah, dll.)
- (<http://oryza-sativa135rsh.blogspot.co.id/2011/06/perubahan-iklim-global-indonesia>.)

Kegagalan Indonesia yang disebut-sebut sebagai paru-paru dunia dalam menyelamatkan diri dari perubahan iklim memberikan andil yang cukup besar terhadap permasalahan perubahan iklim global. Menghadapi perubahan iklim global, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara nasional hingga 26% pada tahun 2020 dengan menggunakan sumber pendanaan dalam negeri, serta penurunan emisi hingga 41% jika ada dukungan internasional dalam aksi mitigasi. Kegiatan ini dituangkan dalam Program Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kurniatun, 2007).

Mengingat pentingnya masalah perubahan iklim, pada SUPAS 2015 dikumpulkan pula informasi tentang perubahan iklim. Unsur-unsur perubahan iklim yang dapat dikenali adalah munculnya fenomena adanya peningkatan suhu global, ketidakpastian musim, kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan dan banjir terus menerus dan kenaikan permukaan air laut yang akhirnya membuat puluhan bahkan ratusan pulau kecil di Indonesia tenggelam (BPS, 2015).

Informasi mengenai perubahan iklim diperoleh dari kepala rumah tangga atau pasangannya atau anggota rumah tangga lainnya yang sudah dewasa. Dari total 2.928.478 rumah tangga, hanya sebesar 37,41 persen atau sebanyak 1.095.553 rumah tangga yang pernah mendengar tentang perubahan iklim. Keberadaan rumah tangga yang pernah mendengar tentang perubahan iklim tersebar di daerah perkotaan sebesar 45,23 persen dan yang di perdesaan hanya sebesar 19,38 persen. Keberadaan rumah

tangga belum pernah mendengar tentang perubahan iklim di Banten sebesar 62,59 persen cukup mengkhawatirkan, karena akan sulit untuk mengatasi penyebab perubahan iklim apabila masyarakat belum pernah mendengar perubahan iklim itu sendiri. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang perubahan iklim baik penyebab maupun dampaknya.

Tabel 10.1 Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mendengar tentang Perubahan Iklim, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Pernah Mendengar tentang Perubahan Iklim			
	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pandeglang	69.042	23,62	223.281	76,38
Lebak	33.534	10,39	289.178	89,61
Tangerang	330.285	40,51	485.006	59,49
Serang	92.620	27,98	238.418	72,02
Kota Tangerang	290.396	54,15	245.882	45,85
Kota Cilegon	32.654	33,67	64.342	66,33
Kota Serang	49.029	34,83	91.737	65,17
Kota Tangsel	197.993	50,37	195.081	49,63
Banten	1.095.553	37,41	1.832.925	62,59

Dari total rumah tangga yang pernah mendengar tentang perubahan iklim 1.095.553 rumah tangga, sebanyak 784.918 rumah tangga atau 71,65 persen rumah tangga di Banten mengetahui apa itu perubahan iklim. Mereka tersebar di wilayah perkotaan sebanyak 703.528 rumah tangga dan sebanyak 81.390 rumah tangga bertempat tinggal di perdesaan.

Tabel 10.2 Jumlah Rumah Tangga yang Pernah Mendengar dan Mengetahui tentang Perubahan Iklim, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Tahu tentang Perubahan Iklim			
	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pandeglang	23.340	33,81	45.702	66,19
Lebak	16.165	48,20	17.369	51,80
Tangerang	230.560	69,81	99.725	30,19
Serang	63.452	68,51	29.168	31,49
Kota Tangerang	225.342	77,60	65.054	22,40
Kota Cilegon	24.514	75,07	8.140	24,93
Kota Serang	40.077	81,74	8.952	18,26
Kota Tangsel	161.468	81,55	36.525	18,45
Banten	784.918	71,65	310.635	28,35

Tabel 10.3 Jumlah Rumah Tangga yang Mengetahui Dampak Perubahan Iklim Menurut Wilayah, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Suhu Semakin Panas, Musim Hujan tidak Menentu dan Kelangkaan Air Bersih merupakan Akibat Perubahan Iklim					
	Ya		Tidak		Tidak Tahu	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandeglang	19.922	85,36	1.029	4,41	2.389	10,24
Lebak	14.123	87,37	772	4,78	1.270	7,86
Tangerang	204.104	88,53	9.329	4,05	17.127	7,43
Serang	57.849	91,17	2.773	4,37	2.830	4,46
Kota Tangerang	215.750	95,74	4.938	2,19	4.654	2,07
Kota Cilegon	23.958	97,73	276	1,13	280	1,14
Kota Serang	35.885	89,54	2.590	6,46	1.602	4,00
Kota Tangsel	142.293	88,12	11.146	6,90	8.029	4,97
Banten	713.884	90,95	32.853	4,19	38.181	4,86

Perubahan iklim menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan oleh makhluk hidup termasuk manusia. Dari 784.918 rumah tangga yang tahu tentang perubahan iklim, 713.884 rumah tangga diantaranya

menyatakan bahwa suhu udara yang lebih panas, musim hujan yang tidak menentu dan kelangkaan air bersih merupakan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Sedangkan 32.853 rumah tangga menyatakan bahwa suhu udara yang lebih panas, musim hujan yang tidak menentu dan kelangkaan air bersih bukan dampak dari perubahan iklim dan sisanya yaitu sebanyak 4,86 persen (38.181 rumah tangga) menyatakan tidak tahu.

## 10.2 Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Tiga dampak utama dari perubahan iklim seperti telah dibahas sebelumnya adalah suhu udara yang lebih panas, musim hujan yang tidak menentu dan kelangkaan air bersih. Ketika dampak-dampak tersebut sudah mulai dirasakan oleh penduduk, maka upaya pencegahan dari hal-hal kecil dalam rumah tangga harus mulai dilakukan. Suhu udara bumi yang semakin panas sebagai akibat meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Sifat dari GRK adalah menahan/menyerap radiasi gelombang panas dari sinar matahari yang dipantulkan bumi keluar dari atmosfer, sehingga panas matahari tersebut terperangkap di bumi yang mengakibatkan suhu udara bumi menjadi panas. Suhu udara yang lebih panas tidak hanya dirasakan pada siang hari, namun juga pada malam hari.

Dari 2.928.478 rumah tangga, sebesar 78,96 persen (2.312.364 rumah tangga) merasakan suhu udara yang lebih panas selama 5 tahun terakhir. Sebanyak 1.495.012 rumah tangga (64,65 persen) melakukan upaya untuk mengurangi suhu yang semakin panas, sementara sisanya (817.352 rumah tangga) tidak melakukan upaya apapun untuk mengurangi suhu. Upaya rumah tangga dalam mengurangi akibat suhu yang semakin panas dapat berupa memasang/menggunakan AC atau kipas angin, menanam pohon dipekarangan rumah yang membuat rumah lebih sejuk, tidak membakar sampah, dan sebagainya.

Suhu udara yang lebih panas selama 5 tahun terakhir paling banyak secara berurutan dirasakan oleh penduduk di Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Pandeglang dan terakhir Lebak. Banyaknya rumah tangga yang merasakan suhu udara yang lebih panas selama 5 tahun terakhir berbanding lurus dengan banyaknya rumah tangga yang melakukan upaya untuk mengurangi suhu yang panas. Sebanyak 91,36 persen rumah tangga di Kota Tangerang merasakan suhu yang semakin panas 5 tahun terakhir. Dan sebanyak 86,29 persen dari rumah tangga yang merasakan suhu udara yang semakin panas, melakukan upaya untuk mengurangi suhu.

Pergeseran musim yang tidak menentu juga merupakan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Musim hujan yang lebih singkat dengan intensitas hujan yang besar, selain menimbulkan banjir (efek jangka pendek) juga akan berdampak pada pertanian dan kebutuhan air bersih (efek jangka panjang). Jika musim kemarau lebih lama berlangsung maka bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen akan terjadi. Selain itu pergeseran musim juga akan menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebanyak 83,02 persen rumah tangga di Provinsi Banten merasakan musim hujan tidak menentu dalam 5 tahun terakhir. Dari 2.431.361 rumah tangga yang merasakan musim hujan tidak menentu dalam 5 tahun terakhir, hanya sebesar 29,52 persen yang melakukan upaya untuk mengurangi akibat dari musim hujan yang tidak menentu. Upaya mengurangi dampak buruk dari musim hujan yang tidak menentu dapat dilakukan rumah tangga dengan membersihkan saluran air/got dari sampah, sehingga apabila saluran air lancar diharapkan tidak terjadi banjir walaupun hujan lebat. Upaya lain bisa dengan memperbesar saluran air yang ada atau meninggikan struktur bangunan rumah, dan sebagainya.

Tabel 10.4 Jumlah Rumah Tangga yang Merasakan Suhu Udara Lebih Panas 5 Tahun Terakhir, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Merasakan Suhu Udara yang Lebih Panas 5 tahun Terakhir		Melakukan Upaya Mengurangi Suhu yang Panas			
			Ya		Tidak	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandeglang	234.621	80,26	107.493	45,82	127.128	54,18
Lebak	134.774	41,76	15.432	11,45	119.342	88,55
Tangerang	655.241	80,37	377.473	57,61	277.768	42,39
Serang	276.015	83,38	207.271	75,09	68.744	24,91
Kota Tangerang	489.953	91,36	422.796	86,29	67.157	13,71
Kota Cilegon	80.257	82,74	67.621	84,26	12.636	15,74
Kota Serang	115.820	82,28	83.076	71,73	32.744	28,27
Kota Tangsel	325.683	82,86	213.850	65,66	111.833	34,34
Banten	2.312.364	78,96	1.495.012	64,65	817.352	35,35

Dampak berikutnya dari perubahan iklim adalah ketersediaan air berkurang sebesar 10-30 persen di beberapa kawasan perumahan di daerah tropika kering. Kelangkaan air bersih yang dirasakan dapat berupa berkurangnya volume air bersih dari sumber air (sumur, pompa, PAM, sungai, mata air, dan lain-lain) yang ada ataupun kejadian kekeringan pada sumber air, sehingga konsumsi air bersih rumah tangga pada waktu tertentu menjadi terbatas ataupun langka. Dari hasil SUPAS 2015, hanya 23,45 persen rumah tangga yang merasakan kelangkaan air bersih dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dapat diartikan bahwa kelangkaan air bersih masih dapat diatasi dengan baik di Provinsi Banten.

Tabel 10.5 Jumlah Rumah Tangga yang Merasakan Musim Hujan tidak Menentu 5 Tahun Terakhir, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Merasakan Musim Hujan tidak Menentu 5 tahun Terakhir		Melakukan Upaya Mengurangi akibat dari Musim Hujan tidak Menentu			
			Ya		Tidak	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandeglang	247.621	84,71	51.307	20,72	196.314	79,28
Lebak	186.394	57,76	16.605	8,91	169.789	91,09
Tangerang	684.544	83,96	186.445	27,24	498.099	72,76
Serang	283.271	85,57	103.526	36,55	179.745	63,45
Kota Tangerang	495.380	92,37	186.833	37,72	308.547	62,28
Kota Cilegon	82.559	85,12	35.745	43,30	46.814	56,70
Kota Serang	118.631	84,28	32.646	27,52	85.985	72,48
Kota Tangsel	332.961	84,71	104.669	31,44	228.292	68,56
Banten	2.431.361	83,02	717.776	29,52	1.713.585	70,48

Tabel 10.6 Jumlah Rumah Tangga yang Melakukan Upaya Mengurangi Kelangkaan Air Bersih, Provinsi Banten 2015

Kab/Kota	Menanam/Memelihara Tanaman Tahunan	Membuat Sumur Resapan	Membuat Lubang Resapan Biopori	Memanfaatkan Air Bekas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pandeglang	88.683	10.068	361	7.301
Lebak	82.103	9.427	2.671	4.556
Tangerang	272.090	26.810	40.749	77.316
Serang	111.147	6.455	2.383	27.743
Kota Tangerang	129.243	12.186	15.445	97.591
Kota Cilegon	30.903	3.508	925	9.652
Kota Serang	48.919	9.650	4.595	18.077
Kota Tangsel	143.574	20.295	25.610	36.619
Banten	906.662	98.399	92.739	278.855

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kelangkaan air bersih diantaranya adalah menanam atau memelihara tanaman tahunan di pekarangan, membuat sumur resapan, membuat lubang resapan biopori dan memanfaatkan air bekas (cuci sayur, buah/beras dan wudhu) untuk keperluan lain. Keberadaan tanaman tahunan di pekarangan rumah yang ditanam langsung di tanah (bukan di pot/drum) berguna untuk resapan air utamanya air hujan dan menambah cadangan air tanah serta mencegah sumber air tanah dari kekeringan. Pada umumnya tanaman tahunan merupakan tanaman perkebunan, dengan ciri-ciri berkayu keras dan dapat dipanen sepanjang tahun sesuai dengan musimnya dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali, seperti misalnya tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan dan lain-lain.

Pada Tabel 10.6 terlihat bahwa upaya terbesar yang sudah dilakukan oleh masyarakat Banten dalam rangka mengurangi kelangkaan air bersih adalah menanam atau memelihara tanaman tahunan di pekarangan rumah yaitu sebanyak 906.662 rumah tangga, 617.378 rumah tangga di perkotaan dan 289.284 rumah tangga di perdesaan. Pemanfaatan air bekas pakai untuk keperluan lainnya menempati urutan kedua dan sudah dilakukan oleh 278.855 rumah tangga. Sebanyak 238.409 rumah tangga di perkotaan melakukan upaya memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain, sedangkan di perdesaan hanya sebanyak 40.446 rumah tangga. Contoh upaya yang dimaksud seperti menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran/buah-buahan untuk menyiram tanaman, menggunakan air bekas wudhu untuk menyiram tanaman, untuk membilas pakaian untuk mengepel lantai atau membersihkan lantai kamar mandi, dan sebagainya.

Sedangkan upaya mengurangi kelangkaan air bersih dengan membuat sumur resapan dan lubang resapan biopori belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Rumah tangga yang membuat sumur resapan hanya sebanyak 98.399 rumah tangga, di perkotaan sebanyak 68.009

rumah tangga dan di perdesaan sebanyak 30.390 rumah tangga. Sumur resapan adalah sumur yang dirancang untuk menyerap air hujan atau buangan air dari kamar mandi agar dapat meresap ke dalam tanah. Sumur ini menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu (minimal 1,5 meter) dan permukaannya tertutup. Untuk mempercepat penyerapan air, bagian dalam sumur biasanya diisi oleh batu pecah, bata merah, ijuk, dan arang, dimana batu disusun berongga. Untuk rumah yang memiliki talang air, air hujan dari talang air biasanya akan dialirkan ke sumur resapan melalui pipa. Sementara untuk rumah yang tidak memiliki talang air, maka sumur berada dibawah taman/parit.

Lubang resapan biopori adalah lubang dengan diameter 10 sampai 30 cm dan kedalaman 30 sampai 100 cm yang diisi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir di sekitarnya, sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah tanah dan tumbuhan di sekitarnya, serta dapat juga membantu pelapukan sampah organik menjadi kompos yang bisa dipakai untuk pupuk tumbuh tumbuhan. Lubang resapan biopori memperbesar daya tampung tanah terhadap air hujan, mengurangi genangan air, yang selanjutnya mengurangi limpahan air hujan turun kesungai. Dari total rumah tangga 2.928.478 rumah tangga, hanya sebesar 3,17 persen (92.739 rumah tangga) yang membuat lubang resapan biopori sebagai upaya mengurangi kelangkaan air bersih. Rumah tangga di perkotaan yang membuat lubang resapan biopori jauh lebih banyak dibandingkan rumah tangga di perdesaan (94,84 persen : 5,16 persen). Masyarakat perkotaan mempunyai pengetahuan yang lebih tentang lubang resapan biopori dibandingkan dengan masyarakat perdesaan.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik Provinsi Banten**  
Jln. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Kav. H1-2, Serang  
Website : <http://banten.bps.go.id>,  
Email : [bps3600@bps.go.id](mailto:bps3600@bps.go.id)

